

KIPRAH PEREMPUAN PARLEMEN

Dr. dra. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si.

Kiprah Perempuan Parlemen

Penulis : Marlinda Irwanti; Editor : Novo Indarto ; Cover Design: Novo Indarto ; Lay Out: Novo Indarto ; Tenaga Ahli : Rizky Fauzi ; Asisten : Diny Maulina ; 2019, 250 + viii hal ; ilus : 14 x 21,5 cm

Hak Cipta @ 2019 pada penulis
Hak Publikasi pada Penulis

Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa ijin tertulis dari penulis

Cetakan Pertama 05 04 03 02 01
23 22 21 20 19

Novo Production
+62 838 4000 1415

ISBN. 978-623-91520-0-0



Sambutan
Wakil Presiden Republik Indonesia

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil 'alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang atas berkah dan rahmat-Nya, ibu Marlinda Irwanti bisa menelurkan karya berbentuk buku yang sangat menginspirasi ini.

Buku ini menunjukkan bahwa anggota DPR RI mengemban tugas mulia yang cukup berat. Sebagian besar waktunya harus rela dipersembahkan bagi kemaslahatan masyarakat. Ibu Marlinda merupakan salah satu akademisi yang menyumbangkan ilmunya demi kemajuan bangsa dan negara. Keterwakilan aspirasi akan membuat masyarakat puas pada kinerja parlemen, dan saya melihat salah satunya dari ibu Marlinda.

Saya mengenal ibu Marlinda sejak saya menjadi Ketua Umum Partai Golkar dan kemudian saya menjadi Wakil Presiden ke-10. Waktu itu ibu Marlinda aktif sebagai kader Golkar di KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar) dan juga aktif sebagai pengurus Partai Golkar. Saya menjadi *key informan* ketika ibu Marlinda melakukan penelitian disertasi tentang “*Komunikasi Partai Golkar di Era Jusuf Kalla Tahun 2004 – 2009*”. Saya bersama pak Akbar Tandjung dan teman-teman pengurus lain hadir dalam promosi doktor Marlinda.

Ibu Marlinda merupakan pribadi yang tangguh, pantang menyerah, dan senantiasa mengejar apa yang dicita-citakan. Saya mengucapkan selamat atas peluncuran buku Dr. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si. sekaligus mengucapkan terima kasih telah turut berpartisipasi dalam memajukan serta mengawal kemajuan pendidikan bangsa Indonesia.

Semoga tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa akan semakin tercapai menjadi lebih tinggi lagi dan semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua. *May God bless all of us.* Amiin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dr. (H.C.) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla



Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla. Courtesy of terasjakarta



Bapak Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Courtesy of liputan6



Sambutan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga buku ibu Marlinda Irwanti bisa diluncurkan pada peresmian Perpustakaan Nasional, sesuai bidang Komisi X dimana beliau berada. Pembuatan buku ini merupakan contoh positif yang bisa ditiru oleh anggota dewan lainnya.

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Komisi X DPR RI) merupakan satu dari sebelas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang Pendidikan, Olahraga, dan Sejarah. Ruang lingkup dan pasangan kerja Komisi X ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015

Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015.

Buku ibu Marlinda ini memperlihatkan bahwa beliau telah melaksanakan tugas di Dapilnya dengan baik. Dengan terjun langsung, masyarakat merasa keterwakilannya dijaga betul oleh anggota dewan. Di media bisa kita temukan bahwa ibu Marlinda telah mengucurkan dana aspirasinya yang tidak kecil yaitu sebesar 55,4 milyar rupiah di daerah pemilihannya. Buku yang bisa diakses masyarakat luas ini juga bisa memperlihatkan kinerja anggota parlemen di Gedung DPR RI telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Semoga langkah ibu Marlinda Irwanti yang positif ini diikuti oleh anggota-anggota dewan lainnya. Terus semangat dan semoga Tuhan memberkahi.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A.



Teruntuk keluarga tersayang, teman-teman yang baik,
para profesor yang menginspirasi, dan masyarakat dimana
saya selalu belajar arti kehidupan.

Semoga semua langkah selalu diberkahi Allah SWT
dan selalu meninggalkan jejak energi positif.



Sekapur Sirih

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT. Shalawat serta salam, semoga selalu tercurah kepada *nabiyullah* Muhammad SAW, para sahabat, *thabiut-thabi'in*, dan para pengikutnya yang setia hingga hari akhir nanti.

Saya sangat bersyukur bahwa buku ini bisa saya selesaikan dan dapat dilaunching di gedung baru Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, salah satu ikon pendidikan nasional. Ini menjadi sebuah prasasti tersendiri di lubuk hati saya yang teramat dalam. Buku ini bisa tersusun tidak lepas dari bantuan dan dukungan beberapa pihak. Kolega dan staf juga telah

banyak membantu selama saya mengemban amanah di parlemen, untuk itu saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Buku ini memuat sedikit jalan hidup saya dan utamanya kiprah saya di parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah SWT sehingga buku ini tidak luput dari kekurangan di sana-sini, untuk itu saya mohonkan maaf yang sedalam-dalamnya.

Buku ini saya dedikasikan untuk teman-teman anggota dewan yang telah berjuang menyampaikan aspirasi ke rakyat maupun pemilih dengan tulus ikhlas, baik menjadi anggota lagi maupun tidak. Bagi yang tidak terpilih, kita tidak boleh menyesali apa yang telah diperjuangkan untuk rakyat. Untuk para calon anggota legislatif di pemilu legislatif yang akan datang, semoga isi buku ini bisa memberikan pengetahuan tentang bagaimana pola atau sistem yang harus dilakukan. Bagi teman-teman anggota di Komisi 2, mudah-mudahan bisa tercipta undang-undang yang lebih baik lagi untuk meminimalisasi pragmatisme.

Saya dan teman-teman khususnya di parlemen tentu mempunyai keinginan untuk mensejahterakan rakyat sehingga selagi kita masih diberi kehidupan oleh Allah SWT bisa digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat atau pemilih, bukannya malah untuk berkamufase. Saat kita duduk di bangku parlemen, banyak sekali kesempatan untuk lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara khususnya mensejahterakan rakyat.

Lingkup tugas di bidang Pendidikan, Olahraga, dan Sejarah di Komisi X merupakan bidang yang sangat familiar bagi saya sehingga saya menikmati setiap detik yang saya lalui di dalamnya. Semoga buku ini memberi manfaat positif bagi masyarakat.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 1 September 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Marlinda Irwanti', with a stylized flourish at the end.

Dr. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si.

Anggota DPR RI/A-280





Daftar Isi

Sambutan Wakil Presiden	iii
Sambutan Ketua DPR	vii
Sekapur Sirih	xi
Daftar Isi	xv
Bab 1 Kiprah Perempuan Parlemen	2
Badan Legislasi	10
Badan Sosialisasi	18

Empat Pilar Kebangsaan	19
RUU Pemajuan Kebudayaan	109
Taman Shulthanah Shafiatuddin	110
RUU Sisnas Iptek	120
Testimoni Parlemen	139
Bab 2 Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPR RI	155
Bab 3 Sekilas Komisi X	160
Bab 4 Keterwakilan Perempuan	177
Bab 5 Komunikasi dan Sinergitas dengan Konstituen	193
Mitra Kerja	196
Pertukaran Program	250
E-Voting	259
Testimoni Konstituen	264

Kiprah Perempuan Parlemen

Bab 6 Problematika Caleg Perempuan	294
Dapil	296
No Urut	298
Tekanan Penguasa	302
Afirmasi	302
Aspirasi	303
Bab 7 Penutup	307
Narasi Pemikiran Marlinda	311
Sekilas Penulis	357
Biodata Parlemen	359
Pendidikan	360
Karir	362
Organisasi	364
Penghargaan	367
Buku	369
Galeri Penutup	371

**Perempuan itu bagaikan lentera
Penerang di tengah kegelapan malam**

(Marlinda Irwanti)

Bab 1



Kiprah Perempuan Parlemen

Sebelum memaparkan apa dan bagaimana seorang perempuan bisa berkiprah di parlemen, saya perlu sedikit menceritakan bagaimana saya masuk kedalam parlemen. Pada tanggal 23 Agustus 2016, saya dilantik sebagai anggota DPR Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Fraksi Partai Golkar dari daerah pemilihan Jawa Tengah X menggantikan Budi Supriyanto. Bersama saya, dilantik pula Sutriyono menggantikan Gamari Sutrisno dari FPKS Daerah Pemilihan Jawa Tengah III. Pembacaan sumpah janji pelantikan dipandu oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin.

Saya masuk Komisi X sesuai dengan *concern* saya, utamanya di bidang pendidikan. Saya berjanji akan mengoptimalkan peran maupun fungsi DPR dalam bidang legislasi, *budgeting*, dan pengawasan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.



Saya menyadari, rintangan dan tantangan pasti ada karena berhubungan dengan hal yang kompleks. Pun demikian, saya akan berusaha bersinergi dan terbuka untuk meminimalisasi kesulitan. Pengalaman berpolitik di parpol tempat saya bernaung dan concern saya di bidang pendidikan sejak lama akan membantu saya mengabdikan pada masyarakat melalui Senayan.

Menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berarti harus siap mengikuti jadwal kegiatan parlemen seperti Rapat Kerja dengan Kementerian, Rapat Dengar Pendapat, Panitia Khusus, Pembuatan Rancangan Undang-Undang, Badan Legislatif, dan lain-lain.

Saat pertama kali duduk di kursi DPR RI, sebuah amanat yang tidak ringan.



"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat."

(Saat pengambilan sumpah oleh Ketua DPR RI)

Saat diangkat dan diambil sumpah oleh Ketua DPR RI





Penandatanganan surat pengangkatan.

Bersama anak saya Raudha setelah
pelantikan di gedung DPR RI



Sedikit kilas balik ke belakang, saya sudah cukup lama terjun di dunia politik. Pertama kali adalah melalui MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong)¹ lalu masuk ke Partai Golkar. Saat saya bergabung, Ketua Umumnya kala itu adalah bapak Soeghandi dengan bang Abdullah Puteh sebagai salah satu ketua, sampai akhirnya Ketua Umum dijabat oleh ibu Mien Soegandi. Saya cukup aktif sebagai generasi muda MKGR



Bersama para tokoh Partai Golkar

¹ MKGR bersama Kosgoro dan SOKSI merupakan organisasi pendiri Golkar. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu. Golkar menjadi mayoritas tunggal sejak Pemilu 1971. Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar dan tidak lagi menjadi mayoritas tunggal. Dinamika politik dilalui dan pada Pemilu 2019 ini, perolehan suara Partai Golkar menempatkannya pada posisi ketiga dan perolehan kursi menempatkannya pada posisi kedua.

waktu itu, hingga pernah menjadi Ketua Umum Gerakan Perempuan MKGR dan sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum.

Partai Golkar adalah partai yang mengantarkan saya menjadi anggota DPR RI. Saya menjadi anggota Golkar sejak 1990 {hingga saat ini sudah 29 tahun}. Dalam kepengurusan, saya berkarir dari Jakarta Selatan kemudian DKI Jakarta, kemudian masuk Dewan Pimpinan Pusat mulai dari bidang sampai wakil sekjen. Pencapaian tersebut saya raih penuh perjuangan, mengingat begitu banyak kader Golkar yang mempunyai kualitas baik. Satu hal yang unik dalam kepengurusan Partai Golkar adalah, hampir semua Ketum merupakan “Lulusan Slipi” (kantor Golkar). Sekarang, saya adalah ketua Partai Golkar yang turut mendeklarasikan diri menjadi Calon Ketua Umum Golkar (Caketum).



Deklarasi pencalonan Ketua Umum Partai Golkar tanggal 18 Juli 2019.

Kiprah Perempuan Parlemen

Jabatan saya selama di parlemen atau sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Komisi X
2. Badan Legislasi (Baleg)
3. Badan Sosialisasi MPR (1 tahun terakhir)

Tentang Komisi X telah saya jelaskan pada Bab 3 sebelumnya. Adapun tentang Badan Legislasi adalah sebagai berikut :

BADAN LEGISLASI

Badan Legislasi atau Baleg adalah badan yang dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan setiap masa sidang. Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota komisi, yang mencerminkan Fraksi dan Komisi. Untuk Periode 2014 – 2019, Badan Legislasi memiliki 74 (tujuh puluh empat) orang anggota yang mewakili 10 fraksi. Salah satu diantaranya adalah saya.

Saya senang dengan posisi saya di Badan Legislasi karena bisa terjun langsung membuat Undang-Undang dan mengawasi prosesnya. Harapan saya tentunya agar Undang-Undang yang kami hasilkan betul-betul menjadi peraturan yang bermanfaat bagi kemaslahatan rakyat Indonesia.

Bagaimanapun, Undang-Undang dibuat oleh manusia sehingga konten di dalamnya sangat tergantung pada manusia-manusia pembuatnya. Sudah lama kita mendengar rumor adanya undang-undang yang hanya menguntungkan golongan tertentu dan merugikan masyarakat Indonesia pada umumnya, atau adanya undang-undang yang merugikan kaum perempuan. Kehadiran saya di Baleg saya harapkan mempunyai fungsi kontrol terhadapnya.

Badan Legislasi DPR dibentuk pertama kali pada tahun 1999 melalui Peraturan DPR tentang Tata Tertib DPR RI yang ditetapkan pada tanggal 23 September 1999. Untuk Periode Keanggotaan 2014 – 2019, dasar hukum Badan Legislasi adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



Suasana salah satu rapat Baleg tanggal 17 Juni 2019

Kiprah Perempuan Parlemen

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Sebagaimana seharusnya sebuah lembaga, untuk memudahkan koordinasi dan melakukan tugasnya Baleg mempunyai susunan keanggotaan yang terdiri dari pimpinan dan anggota :

1. Pimpinan

Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Kiprah Perempuan Parlemen

Pimpinan Badan Legislasi DPR RI telah mengalami beberapa kali pergantian yang disahkan dalam Rapat Intern Badan Legislasi yang dipimpin oleh salah seorang Pimpinan DPR, yaitu Pimpinan DPR RI yang membidangi Politik dan Keamanan (Korpolkam).

Adapun untuk komposisi paket Pimpinan Badan Legislasi saat ini sebagai berikut :

Ketua	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. (FPGerindra)
Wakil Ketua	: Arif Wibowo (FPDI Perjuangan)
Wakil Ketua	: M. Sarmuji, SE., M.Si. (FPG)
Wakil Ketua	: H. Totok Daryanto, SE (FPAN)
Wakil Ketua	: Drs. Sudiro Asno., AK (FPHanura)

2. Anggota

Seperti halnya Pimpinan Badan Legislasi DPR RI, Anggota Badan Legislasi DPR RI juga telah mengalami beberapa kali pergantian dari Fraksi-Fraksi. Saat ini jumlah Anggota Badan Legislasi berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) orang dengan komposisi sebagai berikut:

F-PDI Perjuangan	: 14 orang
F-PG	: 11 orang
F-Gerindra	: 9 orang
F-PD	: 8 orang
F-PAN	: 5 orang

Kiprah Perempuan Parlemen

F-PKB	: 6 orang
F-PKS	: 5 orang
F-PPP	: 5 orang
F-Nasdem	: 5 orang
F-Hanura	: - orang

Tugas Badan Legislasi (berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD), adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
2. Mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan Prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah dan DPD;
3. Mengoordinasikan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, dan gabungan komisi;
4. Menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang usul Badan Legislasi dan/atau Anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

Kiprah Perempuan Parlemen

5. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi, sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR;
6. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional perubahan;
7. Melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
8. Melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang
9. Menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan DPR;
10. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
11. Melakukan sosialisasi program legislasi nasional dan/atau Prolegnas perubahan;



Audiensi Asosiasi DPRD kota / kabupaten seluruh Indonesia dengan Baleg, mengenai persyaratan calon kepala daerah dari PNS, TNI / POLRI, Pegawai BUMN / BUMD, anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam UU No 10 Tahun 2016.

Kiprah Perempuan Parlemen

12. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan setiap akhir tahun sidang untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR; dan
13. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Badan Legislasi memiliki wewenang antara lain :

1. Melakukan kunjungan kerja pada masa rese atau pada masa sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR;
2. Mengadakan rapat koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus yang mendapat penugasan membahas rancangan undang-undang, yang hasil rapatnya diinventarisasi dan dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan prolegnas;
3. Melakukan inventarisasi dan evaluasi dengan mempertimbangkan pelaksanaan:
 - Prolegnas satu masa keanggotaan;



Saat Baleg menerima Koalisi Perempuan Indonesia untuk menindaklanjuti putusan MK, untuk merevisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ketentuan Pasal 7.

Kiprah Perempuan Parlemen

- RUU Prioritas Tahunan
- Penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang dalam satu masa keanggotaan
- Jumlah rancangan undang-undang yang belum dapat diselesaikan
- Masalah hukum dan perundang-undangan

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Legislasi DPR RI, Baleg DPR RI didukung oleh:

1. Sekretariat Badan Legislasi DPR RI, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Kepala Bagian
 - b. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Rapat
 - c. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - d. 6 (enam) orang Staf Pelaksana
2. Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI yang berjumlah 10 (sepuluh) orang
3. Badan Keahlian DPR, yang terdiri dari :
 - e. Peneliti
 - f. Legal Drafter

Kiprah Perempuan Parlemen

Bidang Legislasi yang sudah diselesaikan Komisi X periode 2014 – 2019 dan saya turut andil atau ikut membahas adalah sebagai berikut :

1. UU No 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan
2. UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
3. UU No 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

BADAN SOSIALISASI

Saya menjadi anggota Badan Sosialisasi MPR di satu tahun terakhir masa jabatan. MPR mempunyai Badan Sosialisasi yang beranggotakan 45 orang. Badan Sosialisasi tersebut mempunyai tugas khusus untuk mensosialisasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada seluruh lapisan masyarakat.

Program Sosialisasi Empat Pilar tersebut mirip Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional), lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategik ketahanan nasional, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Dulu saat saya mengikuti pelatihan di Lemhannas durasi programnya cukup panjang yaitu 9 bulan untuk PPSA XVII dan 7 bulan untuk PPRA. Para kepala daerah wajib mengikuti pelatihan Lemhannas karena sangat penting untuk ketahanan bangsa utamanya para pemimpin. Kini, durasi diperpendek menjadi 3 minggu saja demi efisiensi. Demikian pula Badan Sosialisasi pernah diwacanakan beberapa hari, namun karena efisiensi maka cukup dilaksanakan selama 1 hari.

Menjaga Empat Pilar menjadi hal yang harus dilakukan oleh warga negara. Bangsa ini bisa terbentuk karena perjuangan dari para pendahulu. Dahulu para pemuda dari berbagai etnik maupun golongan yang tergabung dalam *jong* dari Jawa, Sumatra, Sulawesi, Ambon, Betawi, Sunda, pemuda Islam, dan dari daerah serta organisasi pemuda lainnya telah bersatu padu menggagas berdirinya negara Indonesia. Sosialisasi Empat Pilar merupakan amanah dari UU MD3. Sosialisasi bisa diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.



Empat Pilar Kebangsaan merupakan soko guru (tiang penyangga yang kokoh) yang membuat seluruh rakyat Indonesia merasa aman, nyaman, sejahtera, tentram dan terhindar dari berbagai jenis gangguan dan bencana.

Empat Pilar Kebangsaan dicituskan oleh bapak Taufiq Kiemas sesaat setelah menjadi Ketua MPR RI tahun 2009. Empat Pilar tersebut adalah :

- Pancasila
- Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- Bhineka Tunggal Ika

Suatu negara pasti memiliki sistem keyakinan atau *belief system* yang menjadi landasan hidup seluruh rakyatnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sistem keyakinan tersebut berisikan konsep, prinsip, dan nilai yang dianut oleh satu negara. Banyak yang menyebut sistem keyakinan sebagai sebuah *philosophische grondslag* (filosofi).

Satu pilar yang kuat dan kokoh akan mampu menangkal berbagai jenis gangguan dan ancaman baik dari dalam negara itu sendiri maupun dari luar. Sistem keyakinan yang dimiliki Indonesia haruslah mampu menjamin terwujudnya keamanan, ketertiban, keadilan, kenyamanan, dan kesejahteraan bagi semua warga negaranya.



Salah satu dokumen Sosialisasi 4 Pilar. Beberapa foto lainnya saya ada dalam Bab 6 tentang Komunikasi dan Sinergitas dengan Konstituen.



SOSIALISASI 4 PILAR

Searah jarum jam :

Sosialisasi 4 Pilar tanggal 9 April 2019 di SMK Islam Warungpring Pemalang, S4P tanggal 10 April 2019 di SMK Peternakan Lembah Hijau Batang, S4P tanggal 11 Maret 2019 di SMK NU Maarif 01, S4P di SMKN 1 Blado tanggal 2 Februari 2019, dan S4P di SMK Al Falah Moga Pemalang tanggal 30 Maret 2019.





SOSIALISASI 4 PILAR

Searah jarum jam :

Sosialisasi 4 Pilar tanggal 11 April 2019, S4P tanggal 12 April 2019 di Unikal Pekalongan, S4P tanggal 23 September 2017 dengan sambutan Bupati Batang, S4P tanggal 1 Maret 2019 di SMK NU Nusahada Reban, S4P di SMK IT Warungpring tanggal 7 Februari 2019, dan S4P di SMK Islam Randudongkal tanggal 9 Februari 2019.





Beberapa dokumentasi Sosialisasi 4 Pilar di beberapa kota.



Marlinda Poernomo: Empat Pilar MPR 'Benteng' Pengaruh Narkoba



Gatra.com | 26 Mei 2018 07:41



JATENG

Pilkada Jangan Pecah Bangsa

BATANG- Sebanyak 101 daerah mulai dari provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahap II pada 15 Februari 2017 seperti telah diputuskan KPU. Dari 76 Kabupaten, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi salah satu Kabupaten yang akan menggelar pilkada. Dalam prosesnya, pilkada kerap memicu konflik, terutama bagi kelompok yang tidak puas.

Anggota Komisi X DPR Marinda Irwanti atau akrab disapa Linda Poernomo dalam keterangan persnya usai menggelar sosialisasi empat pilar pada 13-15 September 2016 di Kabupaten Batang, Jateng, menyatakan, siapa pun yang mengikuti pilkada harus siap menang dan kalah. Ia menegaskan, konflik akibat pilkada akan merugikan semua pihak, karena akan menghambat proses pembangunan di daerah tersebut.

Ditegaskannya, perbedaan pilihan politik tidak boleh mencederai persatuan dan kesatuan bangsa. "Setiap orang bebas memilih, mau kuning, mau biru, mau merah, silakan, pilihan boleh berbeda tapi harus diingat kita tetap satu warga negara kesatuan Republik

Sosialisasi Empat Pilar yang saya lanjutkan dengan himbauan agar pilkada jangan sampai memecah belah bangsa. Berbeda pilihan boleh namun semua tetap satu NKRI.

Salah satu bukti bahwa Sosialisasi 4 Pilar seharusnya dilakukan di berbagai elemen masyarakat adalah saat saya melakukan sosialisasi di Rumah Komunitas Holistik Difabel Kota Pekalongan.

Tentu cara yang dilakukan harus menyesuaikan dengan kondisi peserta yang menyandang keterbatasan. Keterbatasan tidak mengurangi semangat dan motivasi mereka.



Dibantu ibu guru dengan bahasa isyarat, saya menjelaskan 4 Pilar MPR dan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Para difabel atau penyandang disabilitas bisa mendapatkan hak memilih pada pemilu 2019. Mereka menyambut gembira karena bisa mengikuti pesta demokrasi. Bagaimanapun, penyandang disabilitas adalah Warga Negara Indonesia yang hak dan kewajibannya sama dengan warga negara lainnya.

Saya yakin mereka juga mampu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari karena mereka saling membantu dan menolong untuk berinteraksi dan beraktifitas. Saya berharap MPR membuat buku *braille* tentang 4 Pilar yang bisa digunakan komunitas difabel. Dengan sorak penuh kegembiraan mereka meneriakkan NKRI harga mati dan mereka akan menjaga Indonesia dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. Menjadi tanggung jawab kita semua berempati dan ikut mendorong difabel agar bermanfaat bagi mereka sendiri, keluarga dan bangsa Indonesia.



Sosialisasi Undang - Undang Disabilitas. Perubahan UU No. 8 Tahun 2016 dari paradigma CHARITY – BASED (pelayanan berdasarkan kasihan) ke pendekatan RIGHT – BASED (pembedaan nuhan hak). Sebuah KESETARAAN HAK PENYANDANG DISABILITAS. Mereka menjadi subyek pembangunan yang turut aktif berkarya di tengah masyarakat sesuai minat dan potensi masing - masing serta berhak menikmati hasil pembangunan. Ayo berikan HAK mereka. Mari melihat mereka dengan HATI.



Pembacaan puisi saat Semiloka Kartini Era Digital di Senayan.

Suara Perempuan Parlemen

Aku datang
membawa misi
bukan sekedar cari kursi
apalagi sekedar
memenuhi kuota
yang tak terisi

Aku kini
telah jadi anggota
parlemen

Aku ingin menyuarakan
derita rakyat
aku ingin menyuarakan
tugas perempuan
yang semakin berat
aku ingin menyuarakan

Kesetaraan perempuan
pada pendidikan
pada nelayan
pada pegawai rendah
pada petani perkebunan

Aku ingin menyuarakan
kesejahteraan
Keadilan
dan suara-suara
anak jalanan

Ah

Mana suaramu
tak terdengar
sayup-sayup sampai

Mana produk
undang-undangmu

yang memproteksi
yang melindungi kami
dan melindungi NKRI

Mana?

Ya

Aku akan tetap bersuara
menggelorakan semangat
para perempuan
untuk bersama
berjuang

Melalui kursi
parlemen ini

Ya

Memang masih banyak
yang belum selesai

ami terus berjalan
terus menyuarakan
urusan anak dan perempuan
urusan kesejahteraan
dan urusan
undang-undang

Kartini
aku terus
akan menyuarakan
suaramu
melanjutkan
perjuanganmu

Habis gelap
terbitlah terang.



Patung Kartini di depan Museum Kartini.
Perempuan Indonesia sebaiknya pernah mengunjungi museum ini.



Menjadi narasumber Pengembangan Kemitraan dalam Peningkatan Potensi Perempuan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada tanggal 7 Agustus 2019.



Turut mendukung Baiq Nuril dalam memperjuangkan Amnesti. Rapat Pleno tanggal 24 Juli 2019 mendukung secara aklamasi tanpa pertentangan. Terima kasih pak Jokowi atas Kepres Amnesti untuk Baiq Nuril. Semoga martabat perempuan semakin dihormati dan media sosial bisa



Atas : Bersama Ketua DPR menerima perempuan FPG dan KPPG, melaporkan kesiapan perempuan dlm pileg 2019 dan peringatan Hari Kartini

Bawah : Bersama Ketua DPR menerima Lembaga Seni Budaya dan Olah Raga Muhammadiyah mendiskusikan "Budaya menjadi Kekuatan Bangsa Untuk Menghindari Kekerasan"



Kiprah Perempuan Parlemen

RUU PEMAJUAN KEBUDAYAAN

RUU Pemajuan Kebudayaan awalnya berjudul RUU Kebudayaan namun sepakat diubah lantaran muatan RUU tersebut merujuk Pasal 32 ayat (1) UUD 1945. Undang-undang tersebut dibuat dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia yang awalnya merupakan gagasan antarkementerian, yang dipimpin oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penunjukan Kemendikbud sebagai koordinator atau pimpinan antar-kementerian didasarkan pada surat Presiden RI nomor R.12/Pres/02/2016 tertanggal 12 Februari 2016, perihal Penunjukan Wakil untuk Membahas RUU tentang Kebudayaan. Kementerian lain yang masuk dalam tim tersebut adalah Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agama, dan Kementerian Hukum dan HAM.

UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 27 April 2017. Undang-undang tersebut meliputi investasi, sistem pendataan kebudayaan terpadu, hingga penghargaan bagi orang yang berkontribusi terhadap kemajuan kebudayaan.

Salah satu contoh pemajuan kebudayaan yang bisa dilakukan pemerintah, misalnya seperti yang pernah saya lakukan di Aceh berupa maha karya Taman Sulthanah Shafiatuddin. Taman itu merupakan contoh ide / pemikiran akan pentingnya kebudayaan yang dikembangkan berdasar *local wisdom* yang ada.

TAMAN SULTHANAH SHAFIATUDDIN merupakan inisiatif saya, berbentuk sebuah lokasi wisata seperti Taman Mini Indonesia Indah namun isinya khusus daerah Aceh. Di sana kita bisa melihat 23 rumah khas Aceh di setiap daerahnya, dilengkapi sarana prasarana tempat wisata pendidikan. Lokasinya terletak di kota yang sangat strategis sehingga mudah dijangkau siapa saja. Semua struktur dalam taman masih ada hingga sekarang meski beberapa bagian kurang terawat.

Di taman tersebut, keluarga bisa berwisata sambil menikmati aneka kuliner khas Aceh dan mengenalkan adat budaya Aceh pada anak-anak. Saya memilih nama Ratu Shafiatuddin sebagai nama taman tersebut karena beliau adalah salah satu pemimpin Aceh yang mampu memimpin Aceh dengan adil dan makmur meski seorang perempuan. Saya ingin masyarakat tahu bahwa seorang perempuan juga bisa menjadi pemimpin.

Taman tersebut mampu menggambarkan Aceh yang kental adat istiadatnya. Lokasi Aceh yang strategis di ujung pulau Sumatra menjadikan pelabuhannya selalu disinggahi kapal dagang berbagai bangsa. Apabila pemilik pelabuhan adalah kerajaan yang lemah, maka berbagai bangsa asing akan berebut menguasai Aceh. Kenyataannya tidak demikian. Aceh berdaulat dan merupakan satu-satunya kerajaan nusantara yang paling sebentar dijajah bangsa asing.



Sketsa Sulthana Shafiatuddin hasil rekonstruksi pelukis Belanda, dalam buku *"59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Kepemimpinan Ratu"* karya A Hasjmy (1977).

Saya merasa perlu sedikit menguraikan latar belakang ide saya membuat Taman Sulthana Shafiatuddin karena sangat berkaitan dengan tema buku ini, yaitu "Kiprah Perempuan".

Masyarakat Indonesia tentu pernah mendengar sebagian dari sederet nama pahlawan Aceh perempuan seperti Puteri Lindung Bulan, Ratu Nihasiyah Rawangsa Khadiyu, Laksamana Malahayati, Ratu Shafiatuddin, Ratu Naqiatuddin, Ratu Zakiatuddin, Ratu Kamalat, Cut Nyak Dhien, Teungku Fakinah, Cut Meutia, Pecut Baren, Pocut Meurah Intan, dan Cutpo Fatimah.

Dari sederet nama tersebut, saya sangat tertarik dengan Ratu Shafiatuddin. Beliau adalah putri tertua Sulthan Iskandar Muda yang termasyhur. Ketika Sulthan Iskandar Muda wafat, beliau tidak mempunyai putra mahkota. Diangkatlah suami Shafiatuddin, yaitu Sulthan Pahang yang kerajaannya ditaklukkan Iskandar Muda. Saat Sulthan Pahang (=Sulthan Iskandar Tsani) wafat 4 tahun kemudian, kejadian yang sama terulang kembali. Mereka tidak mempunyai putra mahkota. Kerabat terdekat juga tidak mempunyai anak laki-laki.

Maka, semua mata tertuju pada Shafiatuddin. Berbagai kelebihan ada pada dia. Dia putri sulthan termasyhur. Dia istri sulthan terakhir. Shafiatuddin yang mempunyai nama lahir Putri Sri Alam ini menguasai bahasa Arab, Persia, Spanyol, dan Urdu. Ia juga memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu fikih, sejarah, mantik, falsafah, tasawuf, dan sastra. Sebagian melihatnya pantas menjadi ratu. Namun, para ulama dan kaum Wujudiyah tidak sepakat. Mereka berpandangan bahwa perempuan tidak pantas menjadi pemimpin.

Kericuhan ditengahi oleh Nuruddin ar-Raniri, seorang ulama besar yang disegani semua kalangan. Beliau memberikan argumen – argumen bahwa dalam Islam perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin. Maka diangkatlah Putri Sri Alam menjadi ratu Aceh. Gelarnya adalah *Paduka Sri Sulthanah Ratu Shafiatuddin Tajul-'Alam Syah Johan Berdaulat Zillu'llahi fi'l-'Alam binti al-Marhum Sri Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam Syah*.

Shafiatuddin menunjukkan kualitas kepemimpinannya. Ia seakan-akan ingin menunjukkan bahwa perempuan juga mampu menjadi pemimpin. Di masa kepemimpinannya, Aceh ternyata mencapai kegemilangan. Masa genting seiring datangnya ancaman VOC tahun 1639 dijawab Shafiatuddin dengan membentuk barisan perempuan untuk menguatkan benteng istana. Periode gemilang pada

era kepemimpinan sang ayah yang redup saat era kepemimpinan sang suami bangkit kembali. Hubungan diplomasi dengan kerajaan – kerajaan lain berjalan baik. Berbagai bidang maju pesat seperti bidang ekonomi, agama, hukum, sastra, seni, dan budaya. Shafiatuddin memberikan penghargaan bagi pahlawan perang berupa tanah. Ia juga mendirikan perpustakaan dan di kemudian hari memperbesarnya sehingga ilmu pengetahuan berkembang pesat. Beberapa cendekiawan terlihat eksistensinya di masa kepemimpinan Shafiatuddin, yaitu Hamzah Fanshuri, Nuruddin Ar-Raniry, dan Syekh Abdurrauf Singkel. Para ulama tersebut menelurkan karya – karya monumental karena kerajaan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan.

Meski tetap berdaulat, Sulthanah Shafiatuddin menciptakan suasana kerukunan antar umat beragama. Pada saat Ramadhan, ia berpuasa dan berkali-kali minta maaf pada setiap tamu bahwa ia tidak bisa menyajikan makanan dan minuman pada siang hari Ramadhan. Ratu menunjukkan sikap toleransi beragamanya dengan mengizinkan sejumlah rahib Fransiskan mendirikan gereja guna melayani para pemeluk Katolik di Aceh.

Setelah memimpin dengan bijak, Sulthanah Safiatuddin pun wafat. Ia bertahta selama 34 tahun (1641 – 1675), sebuah masa kepemimpinan yang sangat



Stempel Kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Ratu Shafiatuddin. Namanya tertera di lingkaran tengah, sementara lingkaran sekelilingnya merupakan nama-nama Raja Aceh yang memerintah sebelumnya. [Repro: Prominent Women In The Glimpse of History]

panjang melebihi masa kepemimpinan Presiden Soeharto (32 tahun). Meski masa kerajaan, seorang raja bisa sewaktu-waktu digulingkan kalau banyak yang tidak menyukai atau ditaklukkan kerajaan lain kalau lemah. Kenyataannya rakyat mencintainya dan kerajaan lain tidak berani menyerang. VOC dan negara-negara Eropa bahkan harus berpikir ulang kalau ingin menyerang Aceh di masa kepemimpinan Shafiatuddin.

Ratu Shafiatuddin tidak mempunyai putra mahkota namun telah menyiapkan penggantinya. Tidak tanggung – tanggung, tiga calon ratu ia persiapkan, menunjukkan pemikirannya yang panjang tentang kaderisasi. Uniknya, ketiga calon ratu yang telah diumumkan sebelumnya tersebut adalah perempuan dan bukan berasal dari kaum bangsawan. Hal itu menunjukkan bahwa Sulthanah Shafiatuddin sangat menjunjung kualitas. Tidak banyak yang tahu tentang kisah – kisah tersebut, namun dengan pilihan nama beliau sebagai nama taman, saya harapkan masyarakat Indonesia menjadi tahu bahwa perempuan juga bisa menunjukkan kiprahnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri tercinta ini.



“Prosesi pemakaman dilakukan dengan keagungan kerajaan. Diikuti jejeran pangeran-pangeran dan para bangsawan. Sebanyak 260 gajah berhiaskan sutra mewah dan gading diimbuhi emas dan perak, lainnya dihiasi bendera-bendera dengan benang emas dan perak. Badak-badak dan kuda Persia dengan hiasan-hiasan mahal dari logam mulia. Barisan perempuan mengawal proses pemakaman. Peti sang raja dilapisi suassa dan diselimuti kain emas. Pada akhir prosesi, jenazah sang raja yang mangkat ditempatkan di pemakaman kerajaan di samping para leluhur. Ratusan hari mendatang, perempuan-perempuan datang membawakan tembakau, makanan, dan minuman lainnya sang raja masih hidup. Begitu jenazah sang raja berkubang tanah, dua meriam perak ditembakkan, suaranya menggema memenuhi malam, di sela teriakan-teriakan “Hiduplah Sang Raja !”. Selepasnya, seluruhnya tenang dan damai...”

Kesaksian Nicolaus de Graaff (ahli bedah Belanda di Aceh) saat menyaksikan pemakaman Iskandar Tsani tahun 1641. Ratu Shafiatuddin yang asli Aceh lebih termasyhur dari suaminya, sehingga kemungkinan suasana pemakamannya lebih besar dari penggambaran di atas.

Lukisan Ratu Shafiatuddin
[Repro: Prominent Women In The
Glimpse of History]



Gerbang masuk Taman Shulthanah Shafiatuddin



Monumen Shulthanah Shafiatuddin



Tiga contoh anjungan dari kabupaten yang berbeda di Taman Sulthanah Shafiatuddin





Atas : Bisa menjadi tempat event besar di malam hari.
Bawah : Masyarakat menikmati aneka kuliner Aceh setiap Minggu pagi.



Bawah :

Komisi X saat pengesahan RUU Pemajuan Kebudayaan. Hari Musik Nasional merupakan salah satu apresiasi pada kebudayaan Indonesia. Tanggal 9 Maret diambil dari hari lahir pahlawan nasional Wage Rudolf Supratman, musikus yang mengarang lagu kebangsaan Indonesia, "Indonesia Raya". Ada sumber lain yang mengatakan bahwa WR Supratman lahir pada tanggal 19 Maret 1903 di hari pasaran yang sama (Wage), namun tidak mengurangi nilai penghargaan bangsa pada beliau.



Kanan :

Cuplikan film "Wage". Saat sang komponis muda memperdengarkan lagu "Indonesia Raya" untuk pertama kalinya.



Kiprah Perempuan Parlemen

RUU SISNAS IPTEK

Salah satu pe-er besar kami di Senayan adalah penyempurnaan UU Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek. RUU Sinas Iptek yang digodog untuk menggantikan UU tahun 2002 tadi diharapkan dapat mengakselerasi iptek dan kegiatan riset di Indonesia.

Kelemahan dalam UU Nomor 18 Tahun 2002 perlu digantikan oleh UU Sinas Iptek ini. Selain belum mengatur mekanisme koordinasi antar lembaga dan sektor dalam tingkat rumusan kebijakan dan perencanaan program anggaran, UU sebelumnya juga belum mengatur secara jelas aspek pembinaan terhadap jaringan SDM Iptek.

Saat saya masuk menjadi anggota parlemen, pembahasan tentang UU Sinas Iptek telah melalui 5 kali masa persidangan yang artinya RUU Sinas Iptek selalu dibahas dalam setiap masa kerja anggota DPR RI namun tidak pernah mencapai penyelesaian selama 25 tahun. Sungguh masa yang sangat panjang sementara undang-undang tersebut sangat diperlukan demi pembangunan nasional. Kami bekerja secara marathon karena telah membulatkan tekad untuk menyelesaikan undang-undang yang menggantung sangat lama. Setiap hari kami pulang pagi selama sekitar 6 bulan terakhir, agar pada bulan Juli sebelum masa tugas sebagai anggota parlemen berakhir bisa selesai. Alhamdulillah kerja kami bisa kami selesaikan pada bulan Juli 2019.

Kiprah Perempuan Parlemen

Bagaimanapun, Pembangunan Nasional membutuhkan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi sementara setiap warga negara mempunyai hak dalam memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Indonesia semakin maju dan membutuhkan pengembangan maupun inovasi sesuai dengan zamannya. Karenanya, dibutuhkan suatu aturan mengenai sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pembangunan agar mampu memperkuat daya dukung iptek untuk mencapai tujuan negara serta meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa.

Tujuan disusunnya Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut (UU Sisnas Iptek) adalah untuk memajukan dan meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan serta teknologi yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi. Selain itu, UU Sisnas Iptek diharapkan mampu meningkatkan pemanfaatan iptek untuk pembangunan berkelanjutan, menjadi dasar pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat, memajukan peradaban, menjaga kelestarian, dan melindungi segenap bangsa Indonesia.

Saya berharap UU Sisnas Iptek bisa menjadi landasan pembangunan (*Sains based Policy*) dan menjadi satu kesatuan sistem perencanaan Pembangunan Nasional, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut disusun Rencana I untuk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi. Penyelenggara Iptek dapat dilakukan oleh peserangan, kelompok, badan usaha, lembaga pemerintah atau swasta, dan perguruan tinggi.

Kiprah Perempuan Parlemen

UU Sisas Iptek akan memperluas fungsi penelitian dan pengembangan menjadi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan. Aktivitas riset akan dikelola dari hulu hingga hilir secara terintegrasi. Keberadaan RUU Sisas Iptek juga akan memberikan perlindungan jika penelitian telah memenuhi segala kaidah dan etika keilmuan, juga mengatur pelarangan melakukan pengalihan material keanekaragaman hayati dan kekayaan alam Indonesia, kecuali uji materialnya tidak dapat dilakukan di Indonesia. RUU Sisas Iptek akan memberikan kepastian hukum bagi Indonesia untuk meminta dokumen-dokumen langka yg ada di luar negeri.

Beberapa gambaran isi undang-undang ini antara lain :

- Tentang hak atas royalti dari komersialisasi Kekayaan Intelektual dan ahli teknologi
- Intermediasi teknologi untuk mendorong implementasi hasil invensi dari lembaga penghasil teknologi kepada calon pengguna
- Fasilitas dari pemerintah tentang perlindungan kekayaan intelektual, kewajiban bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengembangkan dan menggunakan hasil invensi dan inovasi
- Kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan dalam bentuk Invensi dan Inovasi untuk Pembangunan Nasional
- Pemberian insentif bagi Badan Usaha yang menghasilkan Invensi dan Inovasi Nasional (Jaminan pembelian produk inovasi dan Jaminan pencantuman produk inovasi dalam katalog elektronik pengadaan barang/ jasa pemerintah)

Kiprah Perempuan Parlemen

- Etikan
- Wajib serah dan wajib simpan untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta investasi dan inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional (oleh presiden)
- Usia pensiun 70 tahun bagi jenjang jabatan fungsional ahli utama dan dapat diperpanjang apabila masih bersedia, kompetensi keilmuannya masih dibutuhkan, sehat jasmani dan rohani
- Sumber daya iptek diberikan perlindungan jaminan sosial dan bantuan hukum
- Adanya pendanaan penyelenggaraan IPTEK selain dari APBN, APBD, Dana abadi Penelitian, Badan Usaha, dan sumber lain yang tidak mengikat
- Badan Usaha yang mengalokasikan dananya untuk iptek akan diberikan insentif (dapat berupa pengurangan pajak sesuai peraturan perundang-undangan)
- Pengaturan sanksi administratif (peringatan tertulis, penghentian pembinaan, denda administratif, pencabutan izin, pencantuman para pelanggar dalam daftar hitam)
- Sanksi bagi orang asing yang melakukan pelanggaran (pidana 4 tahun dan denda paling banyak 4 miliar serta larangan memperoleh izin penelitian di wilayah Indonesia paling lama 5 tahun)
- Sanksi bagi orang yang tanpa hak dan secara melawan hukum mengalihkan spesimen lokal Indonesia ke luar negeri baik fisik maupun digital tanpa dilengkapi perjanjian pengalihan material (pidana paling

Kiprah Perempuan Parlemen

lama 2 tahun dan denda paling banyak 2 miliar dan larangan memperoleh izin penelitian), dan sanksi untuk orang atau badan usaha yang melakukan penelitian beresiko tinggi dan berbahaya.



Suasana salah satu rapat Panja Sisnas Iptek tanggal 26 Juni 2019



RUU Sisnas Iptek harus melalui proses panjang dan itu saya lalui satu demi satu.

Sebagai Wakil Ketua Pansus RUU Sisnas Iptek, saya harus mengadakan *Focused Group Discussion (FGD)* dan kunjungan kerja dengan lembaga-lembaga pemerintah seperti LIPI, BPPT, Kemenristekdikti, dan lain-lain.



Ketika memimpin rapat pansus Sisnas Iptek saat sedang memasuki FGD dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan lebih komprehensif sebelum masuk pada Daftar Isian Masalah.

Saat memimpin rapat, bersama Ketua Pansus pak Daryatmo



Di sela-sela Rapat Kerja Pansus Sisnas Iptek
dengan bapak menteri.



Membahas RUU Sisnas Iptek bersama Prof. Dimiyati





Para pendekar Pansus, DPR RI dan pemerintah, bekerja keras menyelesaikan undang-undang sebagai legacy periode ini, sudah 4 periode belum selesai.



Searah jarum jam :

- Bersama Lidia
- Bersama Prof. Eniya
- Sederet srikandi pansus Sisnas Iptek





Usai sidang RUU Sisnas Iptek bersama
Menristekdikti Prof. M. Nasir



FGD pansus Sisnas Iptek dengan Kepala Bappenas tanggal 4 April 2018

Foto bersama setelah diskusi



Kunjungan Kerja Panitia Khusus (pansus) RUU Sisnas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Ambon, Maluku tanggal 19 Oktober 2017.





Saat RUU Sisnas Iptek selesai dan disetujui Fraksi pada malam hari tanggal 15 Juli 2019, untuk dibawa ke Sidang Paripurna.

Setelah melalui serangkaian proses panjang, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, Rapat Paripurna ke-22 DPR RI Masa Persidangan V tahun 2018-2019 yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengesahkan RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sisnas Iptek) menjadi UU.

Segala tetes keringat serasa terpuaskan. Pengesahan ini alhamdulillah juga disambut baik oleh pemerintah, dalam hal ini Menristek Dikti Prof. M. Nasir, Ph.D., Ak.



Saat menunggu RUU Sisnas Iptek disahkan di Sidang Paripurna.

Mewakili Presiden, Menristek berharap Undang-Undang ini bisa memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia dan kemajuan bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang Sisnas Iptek diharapkan mampu menjadi lompatan besar untuk perkembangan iptek di Indonesia.



Rapat Paripurna DPR RI ke-22



RAPAT PARIP
DEWAN PERWAKILAN RAK
MASA PERSIDANGAN V T

SELASA, 1



Suasana setelah RUU Sisnas Iptek disahkan menjadi UU Sisnas Iptek.

Testimoni Parlemen



Anggota DPD Republik Indonesia

Gusti Kanjeng Ratu Hemas

Saya mengenal Ibu Marlinda jauh sebelum beliau menjalankan tugas sebagai Anggota DPR RI periode 2014 – 2019. Sebagai istri Gubernur Aceh, beliau rela meninggalkan tugasnya sebagai penyiar TVRI demi mengembangkan PKK di provinsi yang terletak paling barat Indonesia itu. Aceh dan Jogja sama-sama berstatus Daerah Istimewa namun masing-masing mempunyai latar belakang yang berbeda. Kesamaan dan perbedaan ini saling mendekatkan kami satu sama lain dalam komunikasi dan perjumpaan saya dengan beliau.

Perjumpaan berikutnya dengan Ibu Marlinda adalah saat beliau menjabat sebagai Anggota DPR RI, dan sekaligus juga sebagai Anggota dari Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPP-RI), sebuah forum koordinasi antara perempuan Anggota Legislatif DPR RI dan DPD RI guna memastikan keadilan dan kesetaraan gender menjadi *mainstream* dalam setiap pembentukan dan pembahasan peraturan perundang-undangan.

Beliau adalah seorang yang sangat komunikatif, ditempa bidang keilmuannya terkait komunikasi dan juga pengalamannya sebagai penyampai informasi, baik di radio maupun di TV. Saya mengenal Ibu Marlinda sebagai seorang

Kiprah Perempuan Parlemen

yang sangat aktif dalam kegiatan politik dan kegiatan akademik. Beliau seorang dosen yang mempunyai komitmen membangun pemerataan pendidikan di tanah air. Beliau konsisten mengabdikan dan memperjuangkan perbaikan sistem pendidikan Indonesia, terbukti dari kiprahnya di Komisi X DPR RI.

Beliau aktif menyuarakan pentingnya pemahaman utuh mengenai nasionalisme dan kebangsaan, agar masyarakat tetap bersatu dalam perbedaan. Masyarakat harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan, mengamalkan Pancasila, dan berperan aktif dalam mencegah penyebaran ujaran kebencian yang akan memecah belah bangsa. Beliau juga memberikan perhatian luar biasa kepada generasi milenial, agar mereka mampu menyerap informasi seluas-luasnya dengan belajar sungguh-sungguh dan rajin membaca buku. Ibu Marlinda senantiasa memotivasi generasi muda untuk mengasah cara berpikir kritis sehingga dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan.

Menjalankan tugas sebagai wakil rakyat di parlemen tentu tidaklah mudah. Namun, saya memperhatikan bahwa sosok Ibu Marlinda ini seolah tidak kenal lelah. Beliau selalu tersenyum menyejukkan, dan dengan penuh semangat selalu memberikan tanggapan dan perhatian dalam setiap perjumpaan. Sosok seperti beliau inilah yang saya harapkan akan selalu hadir di parlemen.



Anggota DPR Republik Indonesia

Arzetty Bilbina Setyawan, S.E., M.A.P.

Saya mengenal ibu Marlinda sudah lama sekali sejak sebelum menjadi istri gubernur maupun anggota DPR RI. Saya masih ingat pertama kali bertemu beliau saat masih menjadi presenter TVRI.

Orangnya luar biasa, cerdas, dan cantik. Ibu Marlinda merupakan contoh figur yang sempurna sebagai sosok perempuan. Perempuan yang peduli, perempuan yang berhati baik, dan perempuan yang sangat memperhatikan lingkungan.

Sebagai anggota DPR RI, beliau *masya Allah* sangat bagus. Saya sangat terkesan dengan beliau karena setiap hari di sebelah beliau. Pribadinya menyenangkan untuk diajak diskusi apa saja, sangat humble, hangat, welcome, dan helpful. Sebagai perempuan, ibu Marlinda merupakan figur perempuan yang sangat hebat.



Anggota DPR Republik Indonesia

Dr. Ir. Hetifah Sjaifuddian, M.P.P.

Saya mengenal ibu Marlinda sejak sama-sama aktif di Partai Golkar. Sebagai anggota DPR Republik Indonesia, saya mengenal ibu Marlinda Irwanti sebagai sosok yang sangat aktif memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

Atas komitmennya tersebut, beliau didapuk sebagai pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sinas Iptek). Waktu dan tenaganya didedikasikan sebagai Anggota DPR.

Secara pribadi, saya mengenal bu Marlinda sebagai sosok yang aktif, cerdas, dan selalu mudah bergaul. Hal yang selalu berkesan bagi saya dengan beliau tentu saja saat dalam rapat dan ketika mengusulkan produk kebijakan yang ramah terhadap perempuan, kami selalu kompak. Saya berharap pada bu Marlinda untuk terus berjuang dan berdedikasi sebagai aktivis perempuan.



Anggota DPR Republik Indonesia

Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi.T

Marlinda yang saya kenal adalah pribadi yang riang, ramah, dan senang menolong. Di tengah segala kesibukannya sebagai anggota DPR Republik Indonesia masih menyempatkan waktu untuk mengajar para mahasiswanya sebagai profesi utama sejak sebelum mnejadi anggota dewan.

Saya mulai intensif mengenal beliau sejak pindah ke Komisi X tahun 2017 dan pada beberapa tema pembahasan di panja-panja komisi kami bersama-sama, termasuk sejak 2018 bersama-sama di pansus RUU Sinas IPTEK.

Kesungguhan beliau mengabdikan diri pada dunia pendidikan tinggi membuat beliau mengawal isu-isu spesifik pendidikan tinggi secara serius. Semoga Allah memberkahi langkah-langkahnya dan semoga Allah memudahkan segala urusannya.



Anggota DPR Republik Indonesia

Dra. Sb. Wiryanti Sukamdani ES

Saya mengenal Ibu Marlinda tahun 2016. Beliau tipe pekerja keras yang bertanggung jawab, kritis, dan selalu menggunakan logika. Beliau juga pejuang dan petarung yang hebat dalam mempertahankan ideologi institusinya.

Bu Linda sering mengorbankan kepentingan pribadi jika tugas memanggil. Penyampaian pendapat atau kritiknya lugas, tegas, dan jelas. Mungkin ini sesuai dengan latar belakang beliau sebagai dosen. Bu Linda juga sosok yang disiplin, jujur, dan berkarya nyata. Ibu Marlinda pribadi yang lurus, ramah, elegan, cantik, murah senyum, dan grapyak (mudah bergaul).

Saya senang bergaul dengan beliau dan banyak belajar terutama mengenai cara komunikasi yang baik. Cara membawakannya harus dengan intonasi yang baik, sistematis, dan terprogram. Bu Linda adalah sosok yang hangat, penuh perhatian, dan setia kawan. Saya ucapkan selamat berjuang, semoga sukses selalu.



Anggota DPR Republik Indonesia
Rieke Dyah Pitaloka, S.S., M.Hum.

Ibu Marlinda, bundaku tersayang, adalah salah satu *my inspiring woman*. Beliau tidak pernah mengeluh meski perdebatan panjang dan melelahkan dalam pembahasan RUU Sisnas IPTEK.

Gaya kepemimpinannya keibuan, tapi sekaligus tangguh. Senyumnya mampu meredakan ketegangan dan menyatukan kami yang berasal dari berbagai fraksi. Dedikasinya untuk Indonesia kembali menjadi *evidence based policy* yang menjadi *tonggak legacy* penting bagi keberlangsungan masa depan republik tercinta ini.

Ibu sayang, ananda akan merindukanmu di DPR RI. Tapi, aku yakin jalan pengabdian dalam perjuangan untuk rakyat, bangsa, dan negara pasti pasti akan mempertemukan kita.

Terima kasih Ibu untuk kasihmu yang tulus.



Anggota DPR Republik Indonesia
Ratih Sanggarwaty, S.E.

Saya sudah lama mengenal ibu Marlinda, yaitu sejak menjadi istri Gubernur Aceh.

Saat menjadi anggota DPR RI, saya melihat kinerja beliau sangat memegang teguh pendiriannya yang tentunya mengarah pada hal yang positif. Beliau akan merasa mempunyai beban moral jika generasi muda Indonesia tidak menjadi lebih baik lagi. Inilah yang selalu beliau perjuangkan dalam dunia politik yang digelutinya.

Sebagai pribadi, beliau tidak pernah merasa ragu utk membagi ilmunya. Beliau juga selalu memberikan semangat pada siapapun agar jangan pernah menyerah.



Anggota DPR Republik Indonesia
Dr. Reni Marlina, S.Pd., M.Pd.

Ibu Linda Purnomo adalah seorang perempuan yang cerdas, tegas, energik, kritis dan tentu cantik. Gagasannya selalu bernas, kontekstual dan faktual.

Bertukar pikiran dengannya merupakan sesuatu yang mengasyikkan karena banyak gagasan yang sangat konstruktif dan solitif mengenai berbagai persoalan pendidikan, perempuan, dan sosial kemasyarakatan.

Sebagai anggota DPR beliau patut diteladani. Tingkat kehadirannya sangat tinggi. Kemampuan beliau dalam mengawal rapat-rapat terutama terkait dengan legislasi sangat luar biasa, disamping sifatnya yang konsisten dan komit.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memerlukan figur-figur seperti ibu Linda Purnomo.

Deputi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Prof. Dr-Eng. Eniya Listiani Dewi, B.Eng., M.Eng.



Saya bertemu pertama kali dengan ibu Marlinda pada tahun 2015. Saat itu saya sebagai Deputi Agro Industri dan Bio Teknologi mengundang beliau menjadi penanggap di acara BPPT yaitu Konggres Teknologi Nasional.

Setelah itu, kami sering bertemu di berbagai acara dan kesempatan, termasuk saat saya ajak beliau dalam kunjungan di wilayah Pematang Jaya yang menjadi Dapil beliau untuk meninjau pelaksanaan electronic system pemilihan kepala desa. Sebuah sistem yang sangat mudah, bisa digunakan simbol-simbol desa, dan diorientasikan untuk pemilu elektronik.

Beliau termasuk yang paling aktif dan antusias menanyakan hasil inovasi maupun inovasi BPPT. Beliau mendorong penuh pemerintah untuk wajib menggunakan hasil inovasi, hasil penemuan, dan hasil pengkajian BPPT untuk diterapkan dan digunakan masyarakat.

Kiprah Perempuan Parlemen

Saat finalisasi RUU Sisnas Iptek, kami bertemu tiap hari dan membahas RUU hingga larut malam. Sebagai salah satu pimpinan panja RUU Sisnas Iptek, beliau memimpin dengan sangat baik dan tegas.

Ibu Marlinda sepakat bahwa sisi ilmu pengetahuan secara garis besar terbagi dua. Yang pertama adalah dasar atau pengembangan (yang identik dengan LIPI) dan kedua berimplementasi dengan industri yang identik dengan BPPT.

Beliau juga banyak sekali mengerti akan bagaimana susahya hilirisasi teknologi seperti yang dialami motor Gesits dan lain-lain. Itulah kenapa beliau sangat senang kalau ada hasil teknologi karya anak bangsa yang bisa diterapkan dalam masyarakat. Kita membutuhkan wakil-wakil rakyat seperti ibu Marlinda.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB
Prof. Dr. Diah Natalisa, M.BA.



Saya berkenalan pertama kali dengan ibu Marlinda saat sama-sama menempuh pendidikan di Lemhannas PPSA 18 (April – Oktober 2011). Saat itu hanya ada 6 orang wanita dari total 50 orang peserta.

Bu Marlinda yang saya kenal adalah sosok perempuan yang sangat *care* dengan orang lain dan teguh dalam pendirian. Beliau aktif dalam setiap kegiatan baik di kelas maupun saat kunjungan di lapangan.

Sebagai sesama perempuan, diskusi kami komplit, mulai dari berbagai kegiatan selama pendidikan Lemhannas, diskusi soal pendidikan sampai *sharing* berbagai hal tentang urusan rumah tangga, kesehatan, dan jilbab.

Benar-benar sahabat yang menyenangkan. Semoga Bu Marlinda sebagai politisi tetap menyuarakan dan berjuang untuk kepentingan rakyat Indonesia. *Bravo* perempuan Indonesia! *Proud of you*, Bu Marlinda !



Marlinda adalah sosok perempuan nan cerdas dan aktif. Saya kenal beliau pada saat Pendidikan dan Pelatihan Singkat Lemhannas RI Angkatan XVIII di Jakarta. Pendidikan singkat ini berlangsung sekitar 7 bulan di tahun 2012. Komunikasi tetap terjalin, walaupun pendidikan telah usai.

Marlinda cerdas dalam artian cepat tanggap dan tepat pemikirannya dalam berdiskusi tentang masalah-masalah kebangsaan kenegaraan. Aktif dalam artian sebagai sosok perempuan yang giat dalam setiap tugas dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan sigap dan tuntas.

Marlinda sebagai sosok perempuan yang menjadi Anggota DPR RI, kiprahnya di bidang politik amat lugas dan profesional, baik dalam pemberdayaan perempuan maupun politik praktis.

Kiprah Perempuan Parlemen

Jiwa ilmiahnya di bidang politik tertanam dalam karya nyatanya sebagai penulis buku "Kiprah Perempuan Parlemen", sebuah bukti yang nyata.

Kiprahnya amat membanggakan sesama kolega dan sesama perempuan. Segala aktivitasnya sebagai anggota parlemen senantiasa diberitakan dan dikomunikasikan, sebagai pesan dan penggugah semangat bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan.

Selamat berjuang Dr. Marlinda, kiprahmu masih dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Semoga Allah SWT meridhoi setiap langkahmu demi kejayaan NKRI, baik secara nasional maupun global.

**Perempuan masa kini,
tak layu oleh hujan, tak gentar karena panas**

(Marlinda Irwanti)

Bab 2



Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPR RI

DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat yaitu merupakan sebuah lembaga tinggi negara yang anggota-anggotanya berasal dari anggota suatu partai politik yang memiliki peranan penting dalam setiap kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh negara. DPR sendiri merupakan sebuah lembaga yang digaji cukup besar dan ditambah lagi dengan berbagai macam fasilitas dan tunjangan lainnya yang membuat setiap orang ingin menjadi anggota DPR. Nah untuk anda yang ingin mengetahui fungsi DPR berikut ulasannya :

Kiprah Perempuan Parlemen

FUNGSI DPR RI

DPR RI mempunyai tiga fungsi utama, yaitu :

1. Fungsi legislasi sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.
2. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
3. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:

1. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
2. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
3. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)
4. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
5. Menetapkan UU bersama dengan Presiden
6. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU

Kiprah Perempuan Parlemen

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:

1. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
4. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara


Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)

WEWENANG DAN TUGAS DPR RI

Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:

1. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat

- 
- A nighttime photograph of the Gedung DPR RI (Indonesian House of Representatives Building) in Jakarta. The building is illuminated with various lights, and a large, colorful fountain display is in the foreground, featuring multiple jets of water lit up in red, green, blue, and yellow. The sky is dark, and the overall scene is vibrant and festive.
2. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
 3. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain
 4. Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
 5. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden
 6. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden

Suasana Gedung DPR RI di malam hari.

**Perempuan cantik itu relatif
Perempuan anggun dan menawan itu anugerah**

(Marlinda Irwanti)

Bab 3



Sekilas Komisi X

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dibagi kedalam komisi-komisi yang mempunyai ruang lingkup tugas dan mitra kerja masing-masing. Komisi DPR RI ini adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap. Jumlah Komisi DPR RI ditetapkan oleh DPR pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang.

Kiprah Perempuan Parlemen

Komisi menjadi unit kerja utama di dalam DPR. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotaan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi.

Komisi bisa mengadakan:

1. Rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri/pimpinan lembaga
2. Konsultasi dengan DPD
3. Rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya
4. Rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain
5. Rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan
6. Kunjungan kerja

Keputusan dan / atau kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah. Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya. Komisi

Kiprah Perempuan Parlemen

menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.

Komisi X

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Komisi X DPR RI) adalah salah satu dari sebelas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang Pendidikan, Olahraga, dan Sejarah. Ruang lingkup dan pasangan kerja Komisi X ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI

Jadi, Komisi X DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang :

2. Pendidikan
3. Olahraga
4. Sejarah

Saya sangat senang dan tertantang ditempatkan di Komisi X karena saya menyukai dunia pendidikan. *Background* saya adalah menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi dan pernah menjabat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi. Mungkin kecintaan saya pada dunia pendidikan ditularkan oleh ayah dan saya ingin menjadi profesor seperti beliau. Itulah kenapa saya bekerja secara totalitas sebagai anggota dewan di Komisi X.



Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyerap aspirasi dan masukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Kreatif yang diterima langsung oleh Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kantor Gubernur DIY4 Oktober 2018.



Kunjungan Kerja Komisi X. Beberapa di antara anggota Komisi X adalah artis Indonesia terkenal yaitu Jamal Mirdad dan Anang Hermansyah, juga public figure Edhie Baskoro Yudhoyono.

Kiprah Perempuan Parlemen

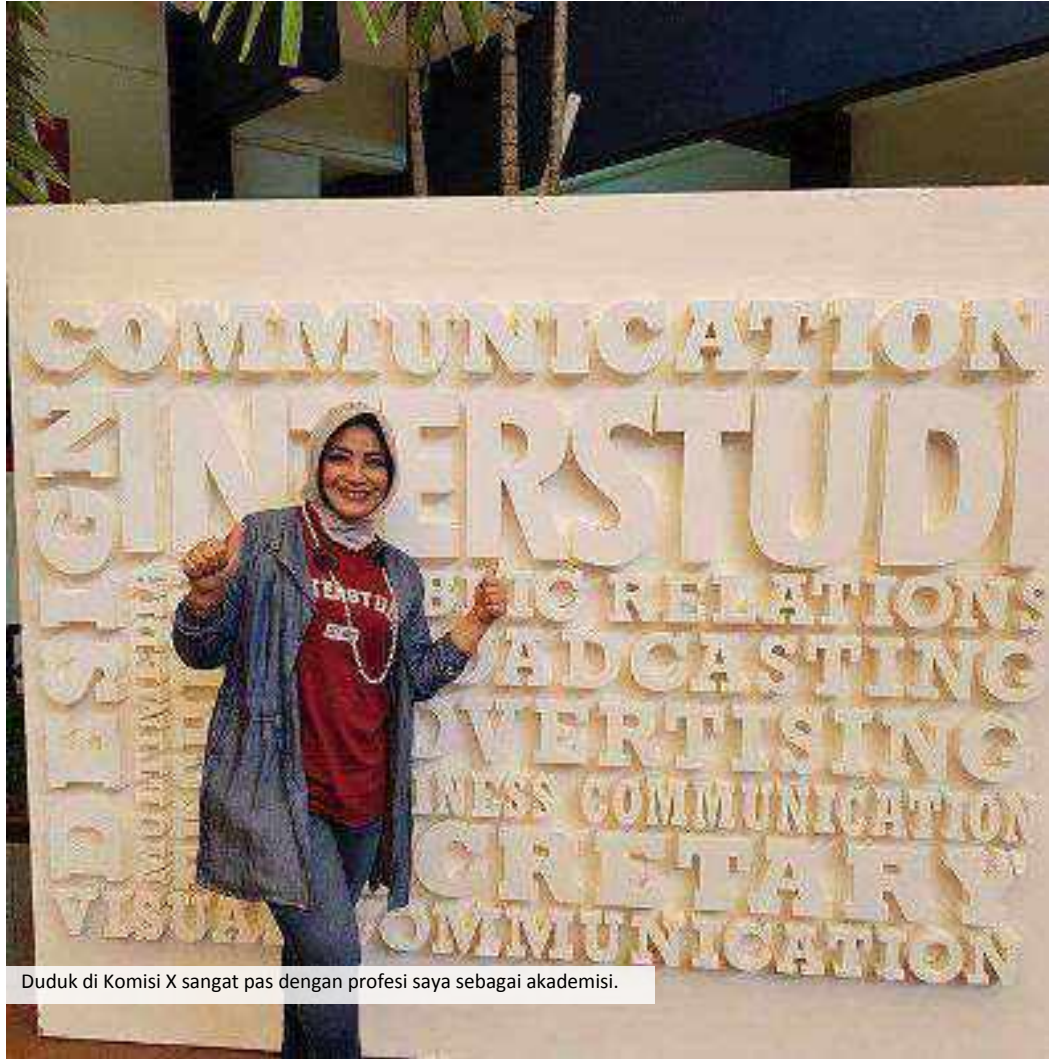
Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014 – 2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi X DPR RI adalah sebagai berikut :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian Pemuda dan Olahraga
4. Perpustakaan Nasional
5. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Bidang Pendidikan Tinggi)
6. Badan Ekonomi Kreatif

Adapun Panja Pengawasan yang sudah diselesaikan Komisi X periode 2014 – 2019 dan saya ikuti rapatnya setiap hari hingga pagi adalah :

1. Panja Program Indonesia Pintar (PIP)
2. Panja Perfilman Nasional
3. Panja Bantuan Operasional PTN
4. Panja Persiapan Asian Games XVIII Tahun 2018
5. Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata
6. Panja Beasiswa Dikti dan SM3T
7. Panja Sarpras Dikdasmen

8. Panja Prodi Dokter Layanan Primer
9. Panja Evaluasi Dikdasmen
10. Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi
11. Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi
12. Panja Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah
13. Panja Pendidik dan Tenaga Kependidikan (baru akan disahkan)
14. Panja Kelembagaan dan Akreditasi Prodi PT (baru akan disahkan)



Duduk di Komisi X sangat pas dengan profesi saya sebagai akademisi.

Kiprah Perempuan Parlemen

PANJA PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) dari Komisi X DPR RI merekomendasikan sejumlah hal untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. **Pertama**, Panja PIP meminta data penyaluran PIP pada 2017 harus sesuai dengan data 2016. **Kedua**, data penyaluran PIP untuk 2017 harus final pada 2016 agar pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan tahun anggaran. Rekomendasi **ketiga**, Panja PIP meminta Kemendikbud mempertimbangkan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pendataan PIP, khususnya untuk anak tidak sekolah (ATS).

Keempat, Panja meminta untuk mengefektikan penjangkauan data siswa dari program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Indonesia Sehat (KIH) karena Kemendikbud belum memverifikasinya. Selanjutnya yang **kelima**, Panja meminta Kemendikbud memverifikasi bank penyalur, khususnya untuk pelayanan PIP pada siswa atau anak usia sekolah agar lancar, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah.

Keenam, selain menyalurkan PIP melalui Bank-Bank yang ditunjuk, dapat juga dilakukan Bank Daerah atau Kantor Pos untuk daerah tertentu. Kemudian **ketujuh**, penyaluran PIP dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam bentuk foto yang telah disempurnakan. Rekomendasi **kedelapan**, Panja PIP meminta Kemendikbud melakukan penyempurnaan petunjuk teknis pencairan PIP ke kepala sekolah sebab kepala Sekolah telah dilibatkan sejak awal pengusulan. Dan rekomendasi terakhir yaitu **kesembilan**, Panja PIP mendesak Kemendikbud untuk meningkatkan sosialisasi PIP.

Kiprah Perempuan Parlemen

PANJA PERFILMAN merekomendasikan tiga hal kepada pemerintah, yakni perbaikan kelembagaan Film nasional, membuka diri terhadap investasi asing, serta merevisi UU No. 33 Tahun 2019 tentang Perfilman. Ketiga rekomendasi tersebut disaring dari aspirasi dan masukan yang dihimpun para pemangku kepentingan perfilman nasional dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) maupun RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) di Komisi X DPR RI.

Perbaikan kelembagaan adalah perbaikan kebijakan pemerintah, yakni penyesuaian dan sinergitas dalam tugas dan fungsi empat lembaga perfilman nasional (meliputi Badan Perfilman Indonesia, Badan Ekonomi Kreatif, Pusat Pengembangan Film Kemendikbud RI, dan Lembaga Sensor Film). Selaras dan sinerginya lembaga perfilman nasional akan dapat menjaga kualitas produksi perfilman nasional yang diminati masyarakat. Adapun rekomendasi soal keterbukaan terhadap investasi asing di bidang perfilman sejalan dengan paket kebijakan Jilid 10 yang diterbitkan Pemerintah pada 11 Februari 2016.

PANJA BANTUAN OPERASIONAL PTN melakukan rapat kerja dengan Kemenristekdikti pada tanggal 10 Februari 2016 di Gedung Nusantara II. Rapat ini adalah tindak lanjut dari rapat terdahulu. Raker DPRI RI ini lebih menekankan pada bidang pengawasan yang merupakan amanat keputusan Raker pada 21 Oktober 2015. Amanat tersebut menyatakan bahwa Komisi X dan Kemenristekdikti sepakat pelaksanaan program Kemenristekdikti dilakukan Komisi X per masa sidang. Panja ini juga membahas realisasi dari pelaksanaan APBN 2015, persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN 2016,

Kiprah Perempuan Parlemen

Implementasi hasil Panja BOPTN, permasalahan beasiswa pendidikan tinggi, realisasi IBA PTS, dan proses dan penetapan kepangkatan dosen.

PANJA PEMASARAN DAN DESTINASI PARIWISATA menyerahkan laporan dan hasil kerjanya selama 5 bulan lebih kepada Menteri Pariwisata di Gedung DPR RI Senayan pada tanggal 6 Oktober 2016. Panja yang dibentuk 13 April 2016 ini telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka mengkaji dan mengidentifikasi berbagai permasalahan pariwisata di Indonesia.

Panja ini merekomendasikan Kementerian Pariwisata agar lebih meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L-Pemda dan pemangku kepentingan pariwisata terkait dengan beberapa bidang strategis antara lain bidang pelayanan kepabeanan, keimigrasian, karantina, bidang keamanan, dan ketertiban, hingga bidang sarana prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, bahan bakar minyak /solar (BBM), telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan. Para pemangku ini perlu diajak secara intens untuk berpartisipasi dalam memasarkan produk wisata Indonesia dalam persiapan dan perencanaan yang matang. Kemitraan pemerintah dan swasta seharusnya berkesinambungan dimana fungsi Pemerintah sebagai Kementerian Cluster C adalah sebagai fasilitator.

PANJA BEASISWA DIKTI DAN SM3T dibentuk untuk mendapatkan masukan mengenai proses seleksi dan pemberian beasiswa yang tepat. Berdasarkan masukan itu, panja memotivasi pemangku kepentingan pendidikan bersama-sama

Kiprah Perempuan Parlemen

menghasilkan SDM Indonesia yang berkualitas sehingga dapat memajukan kesejahteraan bangsa. Panja akan membahas mulai dari kriteria penentuan beasiswa, kuota penerimaan beasiswa setiap jenisnya, prestasi mahasiswa penerima beasiswa, hingga permasalahan yang dihadapi mahasiswa penerima beasiswa. Selain itu, Panja ini ingin mendapatkan gambaran umum secara langsung tentang pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi dalam program Bidikmisi (Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi), ADIK (Afirmasi Pendidikan Tinggi), PPA (Peningkatan Potensi Akademi dalam dan luar Negeri), SM3T (Program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), serta Beasiswa jenis lain yang berasal dari APBN dan APBD.

PANJA SARPRAS DIKASMEN merekomendasikan perlunya pemerintah segera menerbitkan regulasi untuk menyelesaikan perbaikan ruang kelas di seluruh Indonesia. Regulasi diperlukan untuk memperbaiki seluruh ruang kelas yang rusak, yang totalnya mencapai 1,3 Juta kelas atau 75 % dari jumlah ruang kelas di seluruh Indonesia.

Regulasi tersebut juga perlu memuat teknis penggunaan dan pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pendidikan agar tepat waktu, prosedural, serta taat hukum. Sumber pendanaan untuk perbaikan kelas selama ini bersumber dari anggaran Kemendikbud dan Transfer ke daerah berupa DAK Pendidikan. Ironisnya, porsi anggaran pendidikan dalam APBD, baik yang dialokasikan dari pusat maupun daerah sendiri, masih jauh dari ketentuan Undang-Undang sebesar 20%.

Kiprah Perempuan Parlemen

PANJA PRODI DOKTER LAYANAN PRIMER bertugas melakukan pengawasan, khususnya rencana Pendirian Prodi DLP seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.20 tahun 2013 tentang Pendidikan kedokteran. Program pendidikan DLP merupakan kelanjutan program profesi Dokter dan program Internship yang setara dengan program Dokter spesialis. Panja ini ingin mendapatkan berbagai masukan data-data factual terkait kondisi, kendala, dan permasalahan pendidikan kedokteran terutama tentang prodi DLP, Selain itu, juga kesiapan sarana dan prasarana perguruan tinggi sebagai penyelenggara program studi DLP.



Komisi X berkunjung ke Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda (SD, SMP, SMA, SMK) di Medan. Saya berada di bawah pohon Bisbul, pohon kerukunan yang berada di sekolah ini, di tengah-tengah tempat ibadah (Islam, Budha, Hindu, Kristen).

Kunjungan Kerja Komisi X ke Kota Palembang untuk melakukan pengawasan kegiatan Ekonomi Kreatif.



Kunjungan kerja masa reses ke Sumatra Utara.

Kunker Komisi X ke Jawa Timur untuk melakukan pengawasan dan mendengarkan aspirasi permasalahan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tanggal 29 Juni 2019.





Bersama teman-teman anggota DPR RI
Komisi X.



Bersama teman-teman anggota DPR RI Komisi X.

**Bangsa akan kuat dan maju jika kuat pemudanya,
guyup masyarakatnya, dan berpendidikan perempuannya.**

(Marlinda Irwanti)

Bab 4



Keterwakilan Perempuan

Saat Cornelia Hendrika Razoux Schultz-Metzer ditunjuk sebagai anggota Dewan Rakyat (Volksraad) perempuan pertama tahun 1935 di masa Hindia Belanda², masyarakat lokal yang di masa pendudukan Belanda mengajukan keberatan kalau kaum pribumi tidak dilibatkan di dalam dewan. Cornelia ternyata berusaha mengakomodir aspirasi perempuan pribumi.

² "De Eerste Vrouw in den Volksraad. Cornelia Hendrika Rezoux Schultz-Metzer". Het Nieuws van den Dag Voor Nederlandsch-Indië, Batavia. 15 July 1935.

Kiprah Perempuan Parlemen

Ia mengajukan mosi mendesak pemerintah kolonial memberikan hak pilih perempuan dari semua kelompok masyarakat. Sayangnya, usul tersebut tidak diindahkan oleh Dewan Rakyat.³

Setelah melalui aneka protes, pemerintah Hindia Belanda terpaksa menyetujui dan menjamin hak pilih pasif perempuan dari semua ras untuk mengikuti pemilihan di Dewan Kota (*Gemeente Raad*). Kaum perempuan punya hak dipilih namun masih belum mempunyai hak untuk memilih. Hak pilih pasif dan baru di tingkat kota tersebut memicu dilaksanakannya Kongres Perempuan Indonesia (KPI) III di Bandung pada bulan Juli 1938.

Kongres meminta pemerintah agar kaum perempuan mempunyai hak suara atau hak pilih aktif. Perjuangan tercapai dan tiga orang perempuan

³ Susan Blackburn dalam *Women and the State in Modern Indonesia*, Cambridge University Press, New York, 11 Nov 2004, hal.94





Emma Poeradiredja (duduk kedua dari kiri), pribumi perempuan pertama yang berhasil menjadi anggota *Volksraad*.

Kiprah Perempuan Parlemen

Indonesia berhasil duduk sebagai anggota Dewan Kota pada tahun 1939. Emma Poeradiredja berhasil menjadi anggota Dewan Kota Bandoeng,

Siti Sukaptinah (Nyonya Sunario Mangunpuspito) menjadi anggota Dewan Kota Semarang, Siti Sundari Sudirman menjadi anggota Dewan Kota Soerabaya, disusul Sri Oemiati (Yat) adik dr. Soetomo pendiri Budi Utomo mengisi kursi kosong di Dewan Kota Cirebon tahun 1941.

Selain empat orang perempuan yang berhasil menjadi anggota parlemen meski baru di Dewan Kota, semua masyarakat Indonesia mengenal sosok Kartini. Kartini merupakan simbol perempuan yang mampu bersinar di tengah kegelapan malam. Ia mampu mendobrak pandangan-pandangan sinis dan pesimis banyak orang terhadap perempuan, peranan perempuan, kemampuan perempuan dan keterlibatan perempuan serta kecerdasan perempuan melalui karya syair-syair dan surat-surat yang ditulisnya.

Pemikiran-pemikiran Kartini menarik perhatian dan mulai mengubah pandangan masyarakat mengenai kemampuan dan pola pikir seorang perempuan pribumi, sehingga menjadi inspirasi banyak tokoh dalam momentum Kebangkitan Nasional khususnya mengenai visi berfikir seorang perempuan pribumi pada masa itu. Kartini mampu menggambarkan inti dari sebuah perjuangan perempuan untuk merdeka dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkarya dan mendapatkan hak yang sama, yang merdeka dalam mewujudkan emansipasi wanita.

Kiprah Perempuan Parlemen

Seratus tahun lebih berlalu, sosok seorang Kartini memang telah tiada. Akan tetapi semangat, visi berfikir, dan karya-karyanya mampu memantik setiap perempuan Indonesia untuk mendapatkan kesempatan yang sama, untuk berani bersuara, untuk berani berkarya, untuk bersaing menembus cakrawala, untuk berani berbuat lebih untuk Indonesia, dan memecah sekat-sekat ketidakmampuan, ketidakmampuan dan ketidakmandirian dalam meraih mimpi-mimpi dan cita-cita masa depan yang lebih cerah.

Kini, perempuan ada hampir di semua lini kehidupan dan pekerjaan yang ada di Indonesia. Ada yang menjadi dokter, pengacara, birokrat, pilot, dosen, menteri, maupun sebagai politisi yang duduk menjadi anggota dewan / parlemen, baik tinggal di kabupaten, provinsi, bahkan di tingkat nasional.



Kartini saat mengajar.

Kiprah Perempuan Parlemen

Partisipasi perempuan dalam dunia politik Indonesia sudah dimulai sejak Indonesia merdeka, namun kesempatan dan tingkat partisipasi perempuan masih sangat rendah. Meskipun secara jumlah mayoritas penduduk Indonesia adalah perempuan, mereka tak lebih dari penduduk mayoritas yang bisu. Untuk itu, Indonesia sebagai negara yang demokratis, perlu menjamin kesetaraan politik bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia, tak terkecuali kelompok marjinal dan kaum minoritas.

Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 68 Tahun 1958 tentang ratifikasi Konvensi hak politik perempuan, yang didalamnya mengatur perwujudan kesamaan kedudukan (Non-Diskriminasi), jaminan hak persamaan dipilih dan memilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi politik. Namun demikian, peningkatan keterwakilan perempuan terjadi setelah berlakunya perubahan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yaitu pasal 28 ayat (2) yang menyatakan bahwa, *“setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*.

Ketentuan UUD 1945 ini menjadi landasan yang kuat bagi semua golongan warga Negara untuk bebas dari diskriminasi sistematis dan struktural dalam berbagai aspek kehidupan sehingga diharapkan dapat mengkomodifikasi norma-norma hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif.

Kiprah Perempuan Parlemen

Keterlibatan perempuan dari waktu ke waktu mulai mengalami peningkatan, meskipun pernah mengalami penurunan dari tahun 1992 ke 1999, namun setelah itu mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya adalah tren peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif, terutama sejak pemilihan umum 1999 hingga pemilu 2009. Pada pemilu 1999 (9,2 %), Pemilu 2004 (11,8%), Pemilu 2009 (18%), meskipun turun sedikit di Pemilu 2014 (17,32%).

Anggapan bahwa politik itu kotor dan politik itu identik dengan laki-laki dan tidak pantas untuk perempuan masih sangat melekat di pikiran para perempuan Indonesia. Tak heran jika keterwakilan maksimal perempuan masih sebatas mimpi.

Politik identik dengan sesuatu yang aneh dari pandangan femininitas karena politik terkait dengan kekuasaan, kesewenangan, pengerahan massa, dan kompetisi-kompetisi yang tidak melekat dari diri perempuan yang mengutamakan perdamaian dan harmoni, karena kekuasaan pada dasarnya netral, kekuasaan bisa digunakan untuk kebaikan dan atau sebaliknya.

Penegasan hak-hak politik perempuan diperkuat dan dibuktikan dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan (*Convention On The Political Rights*).

Ketentuan dalam konvensi PBB tentang hak-hak politik perempuan menjelaskan : *“Perempuan berhak memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa suatu diskriminasi.”*

Kiprah Perempuan Parlemen

Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik untuk menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.

Kenyataannya, persoalan ketimpangan gender tercermin jelas dengan masih rendahnya keterwakilan perempuan di struktur di semua lembaga perwakilan Indonesia. Berdasarkan data proyeksi penduduk Indonesia 2010 – 2035, dari total 261,9 juta penduduk Indonesia pada tahun 2017, penduduk perempuan berjumlah 130,3 juta jiwa atau 49,75 % dari populasi penduduk Indonesia.

Aspirasi masyarakat ber-gender perempuan agar suaranya terwakili oleh anggota parlemen perempuan berhasil difasilitasi dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di dalamnya juga mengatur pemilu tahun 2009.

Kiprah Perempuan Parlemen

Undang – Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik utamanya pasal 13 ayat 3 memberikan perhatian kesetaraan dan keadilan gender. Setahun kemudian, muncul Undang – Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu, Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyebutkan adanya syarat keterwakilan perempuan sebesar 30% agar bisa diverifikasi dalam proses pendaftaran bakal caleg.

Ketentuan yang berkaitan dengan afirmasi perempuan dalam politik juga diulangi dalam Undang – Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 2 menyebutkan angka yang jelas tentang keterwakilan perempuan di bidang politik, yaitu 30%. Besaran keterwakilan perempuan menyangkut pendirian dan pembentukan parpol, serta kepengurusan parpol di tingkat pusat. Tahun 2017, angka 30% juga masih muncul dalam Undang -Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang masih berlaku hingga sekarang.

Ketentuan perundang-undangan di atas membuat parpol mau tidak mau menyodorkan nama caleg perempuan sesuai persyaratan yang ditentukan. Masyarakat antusias mendaftar sebagai caleg karena diberi kemudahan. Sebagian dari caleg tersebut bukan kader partai yang mereka daftar, kadang bahkan tidak begitu dikenal oleh masyarakat dimana ia berasal. Kondisi tersebut menyebabkan para caleg perempuan tidak berhasil mendapatkan kursi. Mereka seakan hanya menjadi angka formalitas untuk memenuhi legalitas tindakan afirmatif.

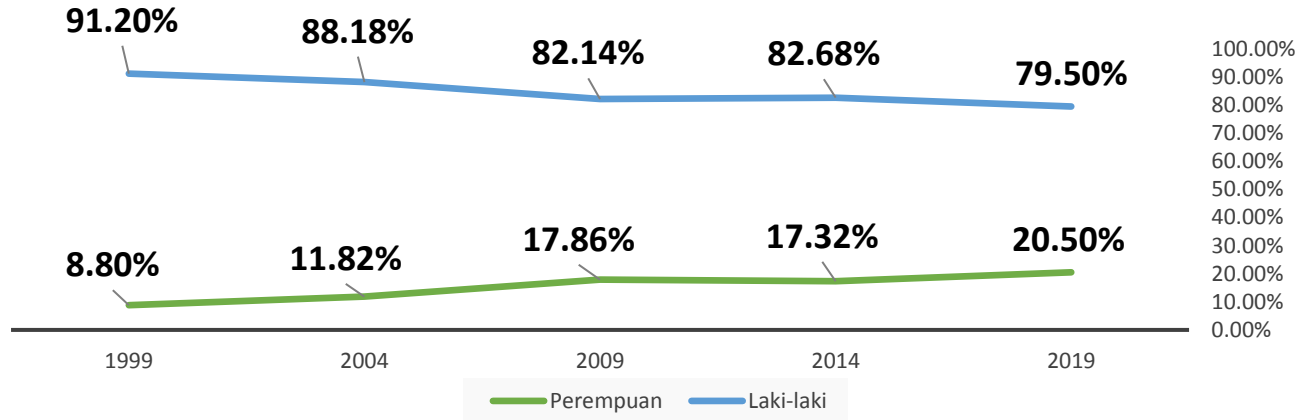
Kiprah Perempuan Parlemen

Ya, perempuan ditargetkan duduk di kursi parlemen sebanyak 30%. Hanya sepertiga dari keseluruhan jumlah anggota parlemen, meski separuh warga negara Indonesia adalah perempuan. Sayangnya, pemberian kuota 30% bagi perempuan belum pernah tercapai di republik ini. Jumlah anggota parlemen perempuan Senayan masih dibawah jumlah yang diharapkan. Otomatis, keterwakilan suara perempuan belum cukup tersalurkan.

Berdasarkan grafik perbandingan keterwakilan perempuan dengan laki-laki di DPR RI berdasarkan tahun pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 di bawah ini, terlihat sekali selisih jumlah yang sangat timpang. Jangankan selisih dengan laki-laki, angka anggota perempuan masih jauh dari angka 30%. Meski demikian, trend umumnya selalu naik. Puskapol mencatat, ada dua faktor yang mendorong peningkatan keterpilihan perempuan kali ini. Pertama, nomor urut. Mayoritas perempuan yang terpilih di Pemilu 2019 mendapat nomor urut 1. Kedua, adalah latar belakang. Sebanyak 53% dari anggota parlemen perempuan hasil Pemilu 2019 merupakan aktivis partai yang telah bertarung di pemilu sebelumnya, kerabat politisi, atau mantan kepala daerah.

Afirmasi 30 persen memberikan kesempatan perempuan duduk di kepengurusan partai dan caleg karena afirmasi ini mewajibkan partai menempatkan perempuan, namun sebenarnya dengan sistem suara terbanyak maka afirmasi perempuan tidak ada manfaatnya karena dalam perolehan suara laki laki dan perempuan sama-sama bersaing untuk memperoleh suara terbanyak di daerah pemilihannya.

Perbandingan Keterwakilan Perempuan dan Laki-laki di DPR Berdasarkan Tahun Pemilu



Sumber : Statistik Indonesia

Kiprah Perempuan Parlemen

Tindakan afirmatif dengan pemberian kuota 30% bagi kaum perempuan, merupakan hak konstitusional yang harus dipandang dengan proporsional dengan tidak mengesampingkan hak kedaulatan rakyat. Sebagai *stake holder* utama dalam negara demokratis, adalah hak rakyat untuk memilih para wakilnya untuk duduk di parlemen. Pengabaian terhadap hak rakyat untuk memilih para wakilnya merupakan pencederaan terhadap demokrasi dan kedaulatan rakyat.⁴

Apabila diklasifikasikan, kegagalan pencapaian target 30% keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hingga pusat memiliki beberapa alasan :

1. Kuatnya patriarki

Garis patriarki atau garis laki-laki masih menjadi garis yang kuat dan dominan di masyarakat Indonesia pada umumnya. Kaum laki-laki dianggap lebih kuat dan lebih bisa memimpin dari kaum perempuan, sementara perempuan dianggap kodratnya hanya di dapur saja. Tidak jarang hambatan semacam ini memang justru datang pertama kali dari keluarga.

2. Biaya politik yang mahal

Kampanye dan aneka kebutuhan logistik saat pemilu membutuhkan biaya yang sangat besar dalam sistem demokrasi liberal. Otomatis, perempuan yang lolos duduk di DPR RI adalah perempuan

⁴ Nalom Kurniawan, Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 (Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, hlm.1.

Kiprah Perempuan Parlemen

kalangan menengah ke atas. Perempuan kalangan menengah kebawah sangat sulit untuk menembus kursi DPR RI.

3. Belum ada sanksi

Undang-undang pemilu yang mengatur kuota 30% caleg perempuan belum dilengkapi dengan ketentuan sanksi bagi parpol yang mengabaikan atau tidak menjalankan ketentuan itu. Pada pemilu 2009, ada 13 partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif namun tidak mendapatkan sanksi apapun karena memang belum ada ketentuannya. KPU kemudian berusaha mengakomodasi melalui Peraturan KPU No 7 tahun 2013. Ketentuan itu menegaskan, KPU tidak akan menerbitkan daftar caleg tetap untuk parpol yang gagal memenuhi syarat keterwakilan perempuan di suatu dapil. Sayangnya, inisiatif KPU tersebut ditentang oleh DPR sendiri.

4. Keseriusan parpol

Seperti telah disinggung pada uraian di atas, hambatan terbesar dalam memenuhi target 30% keterwakilan perempuan kadang justru berasal dari partai politik sendiri. Kepengurusan parpol kadang masih sepi dari kader-kader perempuan. Kaderisasi juga kadang tidak serius mengakomodasi afirmasi 30% keterwakilan perempuan. Selama parpol melihat angka bakal caleg perempuan hanya sebagai formalitas belaka, maka keterwakilan perempuan sebanyak 30% tidak bisa terlalu diharapkan.

5. Nomor Urut

Analisis statistik dari data hasil pemilu menunjukkan, mayoritas caleg yang berhasil melenggang ke Senayan adalah mereka yang dinominasikan pada nomor urut satu. Dalam kesetaraan gender,

Kiprah Perempuan Parlemen

perempuan tidak perlu dispesialkan melebihi kaum laki-laki meskipun sebenarnya pemberian nomor urut satu bagi caleg perempuan akan menambah angka keterwakilan perempuan di parlemen. Pun begitu, penomoran urut seharusnya memperhatikan banyak hal seperti besaran sumbangsih caleg terhadap partai, lama mengabdikan, dan tentu kualitas personal. Sedikit study case pada pemilu 2019 baru saja, ternyata nomor urut satu pada dapil saya diberikan pada caleg lain padahal 3 (tiga) poin di atas lebih unggul saya yang kebetulan menyumbang 50.000 suara bagi partai pada pemilu 2014.

Senada dengan hal tersebut di atas, Pippa Norris dan Joni Lovenduski⁵ mempunyai pendapat yang mengerucutkan permasalahan keterwakilan perempuan dalam parlemen sangat tergantung pada tiga faktor dasar yaitu :

2. Faktor Sistematis
Termasuk di dalamnya adalah Undang-Undang Pemilu, sistem partai, dan sistem hukum negara yang bersangkutan.
3. Faktor Partai
Termasuk di dalamnya adalah ideologi dan aturan internal partai dalam mencalonkan perempuan sebagai anggota legislatif.
4. Faktor Individu Caleg
Termasuk di dalamnya adalah aspek motivasi dan sumber daya individu orang yang akan menjadi caleg.

⁵ Dalam *Political Recruitment: Gender, Race and Class in the British Parliament*, US, Cambridge University Press, 1995, hal.21

Kiprah Perempuan Parlemen

Individu caleg perempuan sendiri sebenarnya diminati oleh pemilih saat memenuhi beberapa kualitas yaitu kecerdasan (35%), bersih dari korupsi (26%), dan pengalaman di dunia politik (20%).⁶ Artinya, pemilih mengharapkan anggota parlemen perempuan yang kemampuan intelektualnya tinggi, praktik politiknya bersih, dan mempunyai jam terbang lama di dunia politik.

Keterwakilan perempuan di DPR RI sangat penting karena akan memberikan otoritas pada perempuan untuk membuat kebijakan yang berkontribusi besar pada pencapaian hak-hak perempuan, khususnya kesetaraan gender. Kadangkala, anggota DPR RI laki-laki tidak dapat sepenuhnya mewakili kepentingan perempuan karena adanya perbedaan pengalaman dan kepentingan antara keduanya.

Keterwakilan perempuan dalam parlemen dapat ditingkatkan kemungkinan keterpilihannya cara dengan penguatan dan peningkatan angka batas kuota. Selain itu, penempatan caleg perempuan pada nomor urut teratas dan penambahan caleg perempuan dalam daftar calon di semua Dapil juga dapat meningkatkan kemungkinan keterpilihan caleg perempuan. Bagaimanapun, partai politik menjadi kunci utama dari peningkatan keterwakilan perempuan parlemen.

⁶ Rakesh Sharma, Lauren Serpe, and Astri Suryandari. Indonesia Electoral Survey. USA : International Foundation for Electoral Systems (IFES) for the Australian Agency for International Development (AUSAID). November 2010. Hal.35.

**Tak pernah ada kata tidak bisa, perempuan harus jadi garda terdepan
pembangunan mental dan spiritual anak Indonesia**

(Marlinda Irwanti)

Bab 5



Komunikasi dan Sinergitas dengan Konstituen

Anggota DPR RI merupakan wakil rakyat sehingga harus mendengarkan suara rakyat. Karenanya, wakil rakyat harus turun langsung ke masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan yang efektif dan efisien. Beberapa program DPR yang harus dilakukan anggota DPR RI saya sinergikan dengan konstituen di dapil saya.

Bagaimanapun, tidak bisa dipungkiri bahwa rakyat membutuhkan wakil di Senayan sementara wakil rakyat juga membutuhkan konstituen. Sebuah simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Saling membutuhkan tersebut harus diakomodasi menggunakan komunikasi. Saya seorang yang mencintai pendidikan sehingga nilai aspirasi saya curahkan

**“Selama 3 tahun, setiap minggu saya selalu berkunjung ke dapil.
Biasanya antara hari Kamis hingga Minggu.”**

terutama di bidang pendidikan seperti pembangunan maupun perbaikan sarana prasarana di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi.

Dalam Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, saya mendapatkan Dapil Jateng X yang meliputi Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Batang, Kota Pekalongan. Daerah tersebut merupakan wilayah pantura yang merupakan dataran rendah berpantai di sebelah utara namun memiliki dataran tinggi berbatasan dengan rangkaian Dataran Tinggi Dieng di daerah selatan. Sebuah kondisi geografis yang sangat kontras. Orang pantai cenderung keras dan tidak sabaran, sementara orang pegunungan cenderung sabar. Berhubungan dengan masyarakat di empat kota yang temperamennya kompleks tentu membutuhkan pendekatan khusus.

Ilmu Komunikasi yang saya punyai cukup banyak membantu dalam berhubungan dengan mereka sebagai konstituen saya. Profesi saya dahulu saat menjadi penyiar, ternyata masih dikenal sebagian masyarakat. Hal tersebut memudahkan saya untuk masuk dalam komunikasi. Pengalaman saya saat berkeliling di 500 desa di Aceh dahulu juga sangat membantu saya. Tidak jarang saya harus turun jalan kaki karena lokasi yang harus saya kunjungi tidak bisa dilalui kendaraan baik roda empat maupun roda dua. Saya pernah menyeberangi sungai menggunakan kaki saya sendiri. Andaikan saat itu banjir, saya bisa



Wajah saya saat menjadi penyiar TVRI. Dulu hanya ada satu televisi nasional dan masyarakat pedesaan biasanya menonton bersama-sama tetangga sehingga mereka banyak mengenali saya.

Kiprah Perempuan Parlemen

terbawa arus sungai. Di akhir periode jabatan saya, area tersebut sudah bisa dijangkau menggunakan kendaraan. Pun demikian, sebagian masyarakat Dapil X masih menganggap wilayah tersebut merupakan pelosok pegunungan yang tidak mudah dijangkau. Para konstituen saya bisa bersaksi apa saja yang telah saya lakukan untuk mereka.

Saya mau bersusah-payah mengelilingi desa di 4 kabupaten / kota di dapil saya karena ingin membangun komunikasi 2 arah (*two way traffic communication*) dengan pemilih atau konstituen. Meski saya tidak mendapat kursi, namun sebagian masyarakat di Dapil X memberikan suara mereka pada saya sehingga saya berkewajiban membantu mereka dengan aspirasi yang saya punya. Saya tidak ingin menjadi anggota dewan yang jarang berkomunikasi dengan rakyat (pemilihnya). Saya juga tidak ingin menjadi anggota dewan yang membeli suara rakyat dengan amplop kemudian meninggalkan mereka setelah mendapat suara.

Kegiatan saya beraneka ragam. Kadang kunjungan kerja, kunjungan masa reses, pengawasan, pemberian bantuan, sosialisasi 4 pilar, dan lain-lain menyesuaikan mitra kerja. Setiap saya mengantarkan program pada para konstituen, saya bersentuhan langsung dengan mereka. Saya bisa mendengar langsung keluhan mereka dan melihat secara langsung kesulitan atau permasalahan yang ada. Saya adalah seorang dosen komunikasi dan memimpin sekolah tinggi komunikasi sehingga paham betul bahwa Ini merupakan jenis komunikasi 2 arah yang sangat penting untuk dijalankan.

Kiprah Perempuan Parlemen

Membangun komunikasi merupakan salah satu kekuatan anggota dewan untuk menjadi CERDAS di gedung parlemen. Dengan melakukan komunikasi semacam itu, seorang anggota DPR RI akan :

1. Mendapatkan *knowlegde* / pengetahuan langsung dari rakyat, menjadi data ketika rapat kerja dengan menteri-menteri terkait.
2. Mendapatkan pengalaman secara langsung tentang permasalahan yang ada, yang nanti di gedung parlemen bisa menjadi masukan bagi mitra kerja ketika akan membuat program untuk kepentingan rakyat.
3. Memperoleh data-data valid dan contoh-contoh kasus yang akan mencerdaskan anggota dewan untuk ikut menyelesaikan beberapa permasalahan mitra kerja di seluruh Indonesia

Seperti telah saya sebutkan pada Bab 3 bahwa pasangan kerja atau mitra kerja saya sebagai anggota dewan parlemen pusat ada 6 institusi, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan Nasional, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Bidang Pendidikan Tinggi), dan Badan Ekonomi Kreatif. Saya memanfaatkan hak tersebut dalam program-program yang sebisa mungkin memberi kemanfaatan bagi rakyat, seperti dapat saya uraikan sebagai berikut :

1. Kemendikbud

Pendidikan Dasar merupakan pondasi sebuah bangsa. Program yang saya salurkan bekerja sama dengan mitra kerja Kemendikbud adalah :

Kiprah Perempuan Parlemen

A. PIP (Program Indonesia Pintar) .

Selama kurang lebih 3 tahun, saya telah menyampaikan 20.000 PIP ke sekolah-sekolah di Batang, Pemalang, kota Pekalongan dan kab Pekalongan). Besarannya adalah sebagai berikut :

- SD 450 ribu per tahun
- SLTP 750 ribu per tahun
- SLTA 1 juta per tahun

Adalah sebuah fakta bahwa ternyata masih banyak keluarga tidak mampu yang kesulitan biaya dalam menyekolahkan anaknya. Bantuan sangat dibutuhkan terutama untuk tingkat SLTA karena wajib belajar Indonesia adalah 9 tahun sehingga sekolah negeri yang gratis hanya hingga tingkat SLTP. Banyak siswa yang menunggak saat menjelang ujian kelas 3. Bisa dibayangkan berapa banyak siswa putus sekolah kalau tidak ada PIP yang saya salurkan.

Pernah di satu SMK, para guru – orang tua – dan siswa menangis saat saya berikan bantuan PIP karena akhirnya bisa menyelesaikan pembayaran SPP, uang ujian, dan uang makan yang selama ini berhutang. Pihak sekolah berterima kasih karena beban sekolah dan pinjaman pada para guru bisa terselesaikan. Ada pula sebuah sekolah yang lokasinya jauh dari perumahan. Letaknya berada di dalam perkebunan yang kalau ditempuh jalan kaki sangat jauh. Para guru menyewa doplak (mobil angkutan terbuka) untuk menjemput anak-anak tidak mampu agar tetap bisa berangkat ke sekolah.



PIP

Searah jarum jam :

Pengawasan PIP SMK Al Husna Kandeman, Pengawasan PIP SDN Mangunharjo 01 Aspirasi PIP Marlinda untuk 75 siswa di SMK Bhakti Kencana Kab. Batang, Silaturahmi dan Penandatanganan Pakta Integritas Bidik Misi STIE Muh Pekalongan, Pengawasan PIP SDN Gondang 4, Pengawasan PIP SMK Bhakti Kencana Subah, dan Pengawasan PIP SDN Jatisari 01





PIP

Searah jarum jam :

Pengawasan PIP SDN Jatisari 02, Pengawasan PIP SDN Jatisari 03, Pengawasan PIP SMPN 6 Batang, Pengawasan PIP SMK Bhakti Praja 02 Batang, Pengawasan PIP SDN Sawah Joho 1, Pengawasan PIP SDN Terban, Pengawasan PIP SDN Warungasem 01





PIP

Search jarum jam :

Pengawasan PIP SDN Subah 01 , Pengawasan PIP SDN Subah 02, Pengawasan PIP SDN Subah 04, Pengawasan PIP + bantuan alat musik SD Tersono, Pengawasan PIP SD Harjowinangun 02, dan Pengawasan PIP SD Penundan Banyuputih.





PIP

Searah jarum jam :

Pengawasan PIP SDN Timbang 02 Banyuputih, Pengawasan PIP SDN Lebo 02 Gringsing, Pengawasan PIP SDN Lobang 01, Pengawasan PIP SMPN 1 Limpung, Suasana haru saat para siswa berpamitan karena saya tidak menjadi wakil aspirasi mereka lagi.





SARANA PRASARANA

Searah jarum jam :

Pengawasan Bantuan Laboratorium Komputer di SMP Muhammadiyah 10 Belik tanggal 12 April 2019

Pengawasan Bantuan Laboratorium Komputer di SMA Muhammadiyah 4 Belik tanggal 12 April 2019

Pengawasan PIP SMK Muhammadiyah 7 Randudongkal tanggal 11 April 2019





SARANA PRASARANA

Search jarum jam :

Pengawasan bantuan gapura SDN Plelen 02, Pengawasan bantuan dua gapura SDN Deles 01, dan Pengawasan bantuan pagar + gapura + PIP SDN Sukorejo.



Melihat Komitmen Anggota Komisi X DPR RI Meningkatkan IPM Batang Marinda Irwanti Beri Bantuan 20.000 Program PIP Setara Rp15 M

Kemajuan ilmu dan teknologi dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya. Oleh karenanya, anggota Komisi X DPR RI, Marinda Irawanti berkomitmen untuk turut membina Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Batang. Hal ini sebagai wujud kepeduliannya dalam meningkatkan kualitas masyarakat Batang yang telah mengutamakan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalam Daerah Istimewa, seperti apa?

NOVIA R. Batang

PENINGKATAN IPM Kabupaten Batang melalui salah satu bentuk program



BERIKAN - Anggota Komisi X DPR RI, Marinda Irawanti, capri membina kaum program PIP di Batang dan sekitarnya.

Marinda sebagai anggota DPR RI nomor 3, Komitmen berdedikasi sebagai wakil rakyat sebagai pembina masyarakat Batang yang telah menandatangani Perjanjian 2019 yang terdapat dalam 2017 oleh IPSI Kabupaten Batang nomor 67, untuk bisa meningkatkan IPM terdapat di seluruh wilayah.

Salah satu wujud untuk meningkatkan pembangunan

IPS Kabupaten Batang adalah dengan meningkatkan IPM penduduk. Untuk meningkatkan Marinda sebagai pembina kaum program PIP di Batang dan sekitarnya. Marinda sebagai pembina kaum program PIP di Batang dan sekitarnya.

Hal ini sebagai wujud kepeduliannya dalam meningkatkan kualitas masyarakat Batang yang telah mengutamakan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalam Daerah Istimewa, seperti apa?



BERSAMA MELAKUKAN - Anggota Komisi X DPR RI, Marinda Irawanti, melihat kaum program PIP.

Marinda sebagai pembina kaum program PIP di Batang dan sekitarnya. Marinda sebagai pembina kaum program PIP di Batang dan sekitarnya.

Hal ini sebagai wujud kepeduliannya dalam meningkatkan kualitas masyarakat Batang yang telah mengutamakan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalam Daerah Istimewa, seperti apa?

01 - 01 - 2019 10:05



BEASISWA MARLINDA

CHECK THIS OUT!



Marinda Irwanti



@beasiswamarlinda



@beasiswamarlinda



beasiswamarlinda@gmail.com



Program beasiswa saya sebarluaskan pula melalui sosial media yang lebih familiar bagi generasi milenial.



Penyerahan copy **Inpassing** IGTK Batang tanggal 10 April 2019. Sesuai UU Guru dan Dosen nomor 14 Tahun 2005, guru yang memenuhi syarat bisa mendapatkan tunjangan kesetaraan. Para guru TK swasta di Batang telah menunggu SK Inpassing selama 7 – 12 tahun. Mereka sudah berusaha kesana-kemari namun SK tidak turun. Saya mengajak para koordinator ke Jakarta dan akhirnya dalam waktu 2 minggu 100 SK bisa keluar. Air mata haru semoga menjadi berkah bagi kehidupan para guru pendidik bangsa dan menambah semangat mereka dalam mendidik generasi masa depan.



Kiprah Perempuan Parlemen

B. Bansos (Bantuan Sosial)

Selama kurang lebih 3 tahun, saya telah menyalurkan bantuan di 50 sekolah untuk pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan sekolah seperti pagar sekolah, MCK, dan lain-lain.

C. TIK (Komputer)

Selama kurang lebih 3 tahun, saya telah memberikan bantuan di 15 sekolah. Banyak sekolah yang lokasinya jauh di pelosok dan tidak mempunyai komputer, padahal proses administrasi di jaman modern saat ini sangat memerlukan komputer. Pelajar juga sebelumnya masih asing dengan komputer padahal di masa kompetitif ini komputer sangat dibutuhkan.

D. Bantuan pengadaan atau rehabilitas sarana dan prasarana sekolah seperti ruang kelas, ruang praktik, UKS, tempat parkir, pagar sekolah, toilet sekolah, peralatan mabel air, ruang perpustakaan, peralatan laboratorium, lapangan sekolah, peralatan komputer server dan soundsytem, dan lain-lain. Biasanya



Suasana rapat bersama Kemendikbud tanggal 24 Juni 2019

Kiprah Perempuan Parlemen

saya mengunjungi sekolah lebih dari satu kali. Pertama saat menyaring masukan, kedua saat menjalankan fungsi pengawasan penyaluran bantuan dan atau saat peresmian bantuan.

- E. SK Inpassing bagi guru TK
- F. Pendidikan Kecakapan dan Ketrampilan (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) bagi guru PAUD
- G. Alat permainan edukatif bagi PAUD dan TK
- H. Bantuan Komunitas Budaya

2. Kemenristekdikti

Melalui mitra kerja Kemenristekdikti, saya menyalurkan program-program yang lebih ditujukan bagi kemajuan pendidikan tinggi, utamanya di dapil saya sebagai *Pilot Project*.

A. Bidikmisi

Bidikmisi adalah program beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu. Selama kurang lebih 3 tahun, saya telah menyerahkan 300 bidikmisi dengan perincian :

- | | |
|---|---------------|
| - Universitas Pekalongan | 200 bidikmisi |
| - STIE Muhammadiyah (Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan | 75 bidikmisi |
| - STIE Pemasang | 25 bidikmisi |

B. PPA (Program Peningkatan Akademik)

PPA adalah program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi. Selama kurang lebih 3 tahun, saya telah memberikan beasiswa PPA ke 200 mahasiswa dari :

- Universitas Pekalongan

Kiprah Perempuan Parlemen

- Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
 - STIE Muhammadiyah Pemalang
 - STIKES Muhammadiyah
- C. Bantuan penelitian
 - D. Bantuan pengabdian masyarakat
 - E. Sarana dan prasarana kampus
 - F. Bantuan bibit buah tropis seperti jambu kristal dan pepaya
 - G. Bantuan helm
 - H. Bantuan bibit padi
 - I. Bantuan mesin air
 - J. Hibah program pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
 - K. Nonton bareng





ANEKA KUNJUNGAN

Searah jarum jam :

Kunjungan Spesifik ke SDN Terban tanggal 2 Maret 2019, Kunjungan ke SMK Al Falah Moga Pemalang tanggal 13 April 2019, Pertemuan dengan Keluarga Unikal, Pengawasan pelaksanaan bantuan RPS di SMK Muhammadiyah 2 Belik tanggal 12 April 2019, Peresmian Rusun Mahasiswa Putra Universitas Pekalongan bersama Menteri PUPR di kota pekalongan, dan Kunjungan ke pabrik Dian Pelangi tanggal 8 April 2019.





ANEKA KUNJUNGAN

Searah jarum jam :

Dialog dengan LP Maarif NU Bantarbolang tanggal 19 Februari 2019, Pakta Integritas Mahasiswa PPA tanggal 16 Januari 2019, dan RDP Ramah Tamah bersama warga desa Sawah Joho beserta Kapolsek Warungasem tanggal 11 April 2017.



3. KEMENPORA

Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Pembangunan nasional membutuhkan warga negara yang sehat. Berkaitan dengan hal tersebut, saya memberikan pancingan-pancingan yang muara akhirnya adalah agar masyarakat memulai aktifitas olah raga bagi yang belum memulai, dan memberi semangat berlomba bagi yang telah berolah raga.

A. Lapangan desa

Dalam satu tahun, saya memberikan bantuan untuk 6 lapangan desa agar masyarakat desa bisa berolah raga dan berkegiatan bersama.

B. Peralatan Olah raga

- Untuk pesantren (Tazaka dll)
- Sekolah-sekolah
- Club
- Organisasi pemuda

C. Pertandingan Olah raga

- Marlinda Cup (lomba bola volley di desa Bulu, Batang)
- Marlinda Cup (lomba badminton di Moga, Pemalang)

D. Paragames (lomba olah raga khusus disabilitas) di Kota Pekalongan

E. Wira usaha pemuda berupa pelatihan dan bantuan uang

Kiprah Perempuan Parlemen

Salah satu program bersama Kemenpora yang cukup menyentuh saya adalah program Turnamen Olahraga Disabilitas “*Holistic Paralympic*”. Meski mengalami keterbatasan, saya melihat semangat para atlet disabilitas untuk tetap berkarya. Hal itu seharusnya memberi semangat kawula muda untuk tetap berkarya karena telah dianugerahi berbagai nikmat Tuhan.



Penyandang Disabilitas memiliki hak yang setara dengan Warga Negara Indonesia lainnya. Mereka juga berhak untuk berprestasi di berbagai bidang termasuk olah raga.



Atas :

CD dari anak2 Disabilitas Holistic Inklusif Pekalongan dalam kegiatan Paralympic, berisi lagu-lagu yang menyentuh. Dengan segala kekurangan yang mereka miliki, mereka tetap berkreasi dan berbagi untuk orang lain.

Tengah :

UU No 8 Tahun 2016 menjunjung kesetaraan penyandang disabilitas

Kanan :

Banner dukungan saya terhadap Holistic Paralympic Kota Pekalongan 2018





Searah jarum jam :

Penyerahan Bantuan Bola Sepak dan Bola Volley ke Desa Mentosar 15 April 2019

Penyerahan Bantuan Bola Sepak Ke Dukuh Kutosari Desa Kutosari 15 April 2019

Penyerahan Bantuan Bola Sepak Ke Desa Tersono 16 April 2019

Penyerahan Bantuan Bola Sepak Ke Dukuh Mojo Desa Pungangan





Kij



Searah jarum jam :

Penyerahan bola sepak ke SMK Pariwisata Liberty Kab. Pemalang agar sekolah vokasi meningkat kualitasnya sehingga memudahkan lapangan pekerjaan, Penyerahan bola sepak di Desa Pungangan Kab. Batang agar mengolahragakan masyarakat sehingga muncul jiwa sportivitas, Penyerahan bola volley di SMKN 1 Blado Kab. Batang semoga bermanfaat dalam membina bibit olahragawan dari sekolah, Kunjungan Spesifik ke SD Negeri 4 Gondang tanggal 28 Februari 2019, dan Kunjungan ke Sekolah Adiwiyata SMPN 6 Batang tanggal 1 Maret 2019.





Marlinda Cup :

Suasana lomba dan penyerahan trophy.



4. KEMENPAR

Sektor pariwisata merupakan penyumbang devisa kedua, sebuah sumbangan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia sehingga saya mengadakan :

A. Pelatihan Pariwisata

- Marketing
- Promosi
- Pelatihan duta wisata

Saya mengadakan pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis sebanyak 7 – 8 kali setahun dengan peserta para pelaku wisata, travel agent, duta wisata, dan lain-lain. Saya menekankan peran kemandirian masyarakat dalam menjalankan dunia pariwisata. Pemerintah mempunyai dana 3 – 4 milyar untuk mensupport di tingkat kabupaten namun lokasi wisata harus dipoles oleh masyarakat atau pemerintah desa setempat terlebih dahulu. Tema pelatihan yang pernah saya adakan diantaranya adalah *“Bimbingan Teknis Sinkronisasi Promosi Pariwisata di Pasar Asia Selatan”*, *Bimtek Pengembangan Pemasaran Pariwisata”*, *Sosialisasi KUR”*, *Bimbingan Teknis Sinergitas Promosi Pariwisata Pasar China”*, dan *“Bimtek Mengampu DBPIK”*.

Majukan Usaha Pariwisata Lewat KUR

PEKALONGAN - Anggota Komisi X DPR RI, Dr. Marinda Iwanti Pongmomo memfasilitasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada puluhan pelaku usaha sektor Pariwisata di wilayah Pantura. Dalam acara ini, Dr. Marinda menggendong Kementerian Pariwisata dan Kementerian Koperasi dan UKM.

"Kita inginajukan pariwisata di Pantura. Usahanya di Pekalongan Raya yang meliputi Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Peralong, serta di kabupaten yang ada di sekitarnya," kata Marinda di sela-sela kegiatan sosialisasi KUR. Sektor pariwisata di Tanah Sunda Pekalongan, kata Iwanti.

"Apalagi Indonesia ini sangat potensial untuk pariwisata, danau, gunung, budaya, sejarah, seni, pelabuhan, dan lain-lain. Kita ingin mengajak masyarakat untuk memanfaatkan peluang ini. Kita ingin mengajak masyarakat untuk memanfaatkan peluang ini. Kita ingin mengajak masyarakat untuk memanfaatkan peluang ini."

Kita inginajukan pariwisata di Pantura. Utamanya di Pekalongan Raya yang meliputi Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Peralong. Pariwisata bisa maju dan berkembang



Anggota Komisi X DPR RI, Dr. Marinda Iwanti Pongmomo (di depan) saat sosialisasi KUR kepada pelaku usaha pariwisata di Pantura.

Di Pantura ada Pantura Raya yang meliputi Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Peralong. Pariwisata bisa maju dan berkembang

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita inginajukan pariwisata di Pantura. Utamanya di Pekalongan Raya yang meliputi Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Peralong. Pariwisata bisa maju dan berkembang.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita inginajukan pariwisata di Pantura. Utamanya di Pekalongan Raya yang meliputi Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Peralong. Pariwisata bisa maju dan berkembang.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita inginajukan pariwisata di Pantura. Utamanya di Pekalongan Raya yang meliputi Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Peralong. Pariwisata bisa maju dan berkembang.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita inginajukan pariwisata di Pantura. Utamanya di Pekalongan Raya yang meliputi Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Peralong. Pariwisata bisa maju dan berkembang.

Pariwisata akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi pengangguran. Pelaku wisata yang membutuhkan modal bisa dibantu pemerintah melalui KUR.



Bimbingan Teknis Sinkronisasi Promosi Pariwisata di Pasar Asia Pasifik dan Amerika di lokasi *pilot project* Pekalongan Raya, tanggal 7 Agustus 2019 atau sesaat sebelum masa jabatan saya berakhir. Promosi pemerintah di luar negeri harus disinkronkan dengan gerakan pelaku wisata di tingkat lokal.



Produk China memang membanjiri Indonesia namun jarang yang tahu bahwa wisman China juga mulai banyak berwisata ke Indonesia. Tujuannya justru lokasi-lokasi yang tidak populer. Karenanya diperlukan “Bimbingan Teknis Sinergitas Pemasaran Pariwisata Indonesia untuk Pasar China”



Searah jarum jam :

Kunjungan ke pegiat wisata Kabupaten Pemalang tanggal 14 April 2019, Kunjungan ke pegiat pariwisata Pekalongan tanggal 8 April 2019, dan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Guru se-Kabupaten Batang tanggal 26 Februari 2018.



Kiprah Perempuan Parlemen

5. BEKRAF

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Melalui Bekraf, saya mengadakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan mutu produk kreatif masyarakat di dapil saya, diantaranya :

- A. Sosialisasi RUU Bekraf
- B. Bimbingan teknis pengembangan publikasi produk kreatif di dalam negeri



Kiri :

Dikunjungi langsung oleh anggota DPR RI sudah memberi semangat tersendiri bagi mereka.

Kiprah Perempuan Parlemen

- C. Pelatihan Bekraf
- Marketing
 - HAKI
 - Kompetensi
 - Pendanaan



Salah satu RDP bersama Bekraf tanggal 17 Juni 2019



Bersama mitra Bekraf, saat menjadi narasumber sertifikasi profesi batik di Kota Pekalongan tanggal 1 - 2 Juli 2019. Semoga Pekalongan sebagai kota kreatif Batik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bersaing di pasar global.

Kiri atas adalah saat event Festival Batik di Pekalongan.

Kiprah Perempuan Parlemen

6. PERPUSNAS

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibu kota negara. Saya menggandeng Perpusnas untuk menyumbang :

- A. Buku-buku untuk berbagai komunitas di dapil
- B. Kegiatan Diskusi buku
- C. Pengadaan Taman Bacaan Marlinda
- D. Bantuan mobil perpustakaan keliling
- E. Bantuan motor perpustakaan keliling

Peringkat minat baca Indonesia tahun 2016 ada di urutan 60 dari 61 negara (Connecticut University), sementara tahun 2012 menurut Unesco index tingkat membaca orang Indonesia hanya 0,001 atau 1 : 1000.





Saya mendukung aneka usaha memajukan pendidikan nasional. Mobil perpustakaan keliling ini salah satu yang saya adakan dengan dana pribadi, bukan dana asosiasi. Semoga berguna bagi pendidikan dan bisa bermanfaat terus di masa depan.



Taman Bacaan MARLINDA berkeliling ke penjurupenjurude desa di Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang Jawa Tengah demi menggalakkan **GERAKAN LITERASI**.



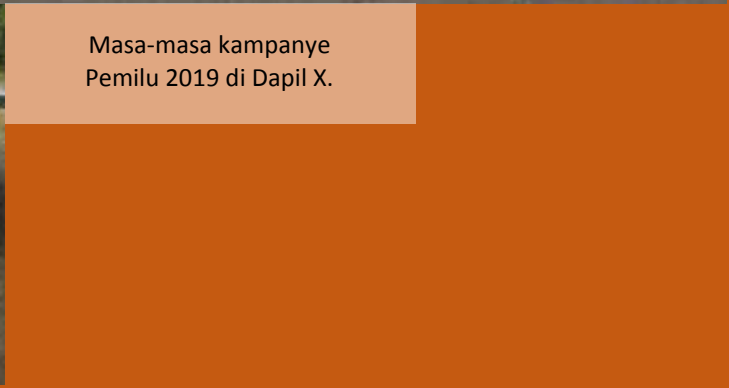
Mari Tingkatkan Minat Baca Untuk
Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.

Salam Literasi!





Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja dan memberikan bantuan setelah melihat kondisi sekolah di NTT. Kami berbagi keceriaan dengan anak-anak NTT. Mereka tetap cerita meraih masa depan meski kondisi sekolah seperti ini.



Masa-masa kampanye
Pemilu 2019 di Dapil X.

Masa-masa kampanye
Pemilu 2019 di Dapil X.



Masa-masa kampanye Pemilu 2019 di Dapil X

“Pemilu itu tidak hanya memilih presiden. Pemilu juga memilih anggota legislatif yang akan mewakili suara mereka di tingkat daerah, provinsi, maupun pusat.”



Kunjungan ke TBM Holistic dan Yayasan
Difabel Pekalongan – Jateng dan
pemberian bantuan buat disabilitas.
Mensyukuri nikmat Allah dengan
berbagi.





Anak-anak selalu antusias dan bersemangat setiap saya berkunjung. Semangat mereka selalu membuat saya tidak pernah menyesal menyalurkan aspirasi saya di sekolah-sekolah yang membutuhkan.

Kiri : Memberi pengertian pada anak-anak agar tidak terhasut isu radikalisme maupun narkoba.

Bawah : Anak-anak SD yang semangat bersekolah. Di pundak merekalah masa depan bangsa berada.



Berani tampil sejak masa remaja sangat penting bagi perempuan Indonesia.



Searah jarum jam :

- Di Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- Kunjungan Kerja Perorangan Ke Pekalongan dan Batang, Dalam Rangka Meningkatkan Minat Baca Siswa Sejak
- Safari Gerakan Nasional Gemar Membaca di Provinsi dan Kabupaten / Kota 2017. Implementasi Revolusi Mental melalui Gerakan Nasional Gemar Membaca dalam Rangka Meningkatkan Indeks Kegemaran Membaca Masyarakat





Berbagi Kebahagiaan, Tarawih keliling di Desa Purbo, bersama masyarakat di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah



Bersama Bapak Rudiantara (Meninfokom), Ustadz Anang (Pimpinan Pondok Pesantren Tazaka), dan Ketua Forum Pesantren Alumni Gontor.

Pesantren adalah salah satu benteng radikalisme yang melanda bangsa. Indonesia tumbuh dari keberagaman dan kita telah berhasil menyatukan diri. Jangan sampai pengorbanan para founding fathers sia-sia. Di Hari Kebangkitan Nasional tersebut, kami berbicara bagaimana menangkal radikalisme dari Pondok Pesantren Tazaka, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang.



Aspirasi Marlinda Irwanti dalam bentuk Bansos pagar sekolah di SD Surjo 3 Desa Surjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang

Seminar Universitas Pekalongan "
Perguruan Tinggi pada Era Revolusi
Industri 4.0





Sebagian dokumentasi Kunjungan Kerja



Sebagian dokumentasi Kunjungan Kerja

Sebagian dokumentasi Kunjungan Kerja





Sebagian dokumentasi Kunjungan Kerja



Sebagian dokumentasi Kunjungan Kerja

Pengobatan gratis di Desa Tembok,
Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang
tahun 2017



Simbolik
sumbangan buku

PERTUKARAN PROGRAM

Selain program sesuai mitra kerja yang telah ditentukan, seorang anggota DPR RI bisa bertukar program dengan anggota DPR RI lain yang berbeda bidang. Di lapangan, kadang memang kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan dapil tetapi tetap menjunjung kerangka pembangunan nasional.

Salah satu yang saya lakukan adalah memberikan hibah 10 ton benih padi untuk para petani di Pemalang, Pekalongan, dan Batang melalui Universitas Pekalongan yang lebih mengetahui medan pertanian secara teknis.

Benih yang diberikan kepada gapoktan – gapoktan bukan bibit sembarangan karena merupakan bibit unggul terobosan dari IPB. Penyaluran bantuan dikawal oleh Unikal dan didampingi prosesnya sejak penyemaian hingga panen dalam rangka pengabdian masyarakat Unikal. Diharapkan benih unggul itu bisa berkembang lebih lanjut.





PERTANIAN

Search jarum jam :

Kunjungan ke Poktan (Kelompok Tani) Peni Murni Kecamatan Bawang tanggal 10 April 2019, Pertemuan dengan petani nanas Belik, Pertemuan dengan petani jambu, Kunjungan ke petani padi Kecamatan Ulujami Pemalang, dan Kunjungan ke petani jambu kristal Desa Bandung Batang.



Kiprah Perempuan Parlemen

Pemalang sebagai salah satu wilayah Dapil saya merupakan sentra agrobisnis buah nanas terbesar di Jawa Tengah. Pada tahun 2015 saja, Pemalang memproduksi 20 ton nanas yang 99% berasal dari Belik. Banyaknya produksi nanas kadang belum sebanding dengan usaha pemerintah dalam membantu meningkatkan serapan pasar. Tidak jarang harga nanas anjlok di bawah seribu rupiah per buah meski di luar kota bisa dibandrol tinggi. Permasalahan-permasalahan klasik seperti transportasi atau permainan tengkulak masih menghinggap petani nanas Pemalang.

Naluri pendidik saya langsung tergerak untuk memberikan motivasi pada saat saya berinteraksi dengan mereka. Saya menganjurkan agar mereka mengubah produk dasar mereka menjadi produk jadi. Nanas yang murah di tangan petani bisa



Kiprah Pere

langsung diolah menjadi minuman sari buah, kripik buah, obat kumur, dan bahkan sabun cuci piring. Jangka waktu penyimpanan produk olahan akan lebih lama dibanding buah segar sehingga mereka memiliki waktu panjang untuk memasarkan produknya. Harga jual juga lebih mahal, berimpak besaran laba yang lebih banyak mereka raih.

Ide itu tentu bukan yang pertama, namun ternyata beberapa konstituen petani nanas tergerak hatinya untuk mengolah produk mereka menjadi olahan jadi. Tidak saya duga, mereka bahkan berterima kasih atas masukan tersebut dengan menjadikan merk dagang mereka menggunakan nama saya yang digabung dengan nanas (Marlinas = Marlinda Nanas).

Pemberian nama tersebut bukan sekedar untuk membuat saya senang namun dengan serius mereka



Minum sirup Marlinas (Marlinda – Nanas) agar sehat, segar, dan cantik.

tekuni. Salah satu bukti keseriusan mereka adalah dengan mendaftarkan produk mereka ke Dinas Perindustrian sehingga telah mendapatkan nomor P.IRT resmi. Saya sangat tersanjung dengan ketulusan mereka dan membantu mempromosikan ke lingkaran yang saya bisa.

Dalam menjalin komunikasi 2 arah dengan para petani nanas, saya tidak sungkan-sungkan untuk menginap di rumah penduduk. Ternyata mereka tidak keberatan bahkan sangat senang ada anggota DPR RI yang mau melihat langsung kehidupan mereka dan kondisi paska panen nanas yang harganya terjun bebas.



Selain produk olahan nanas Belik Pemaalng dalam bentuk minuman segar dan kripik buah yang kemudian menjamur, saya memaksimalkan potensi buah nanas kedalam bentuk obat kumur dan sabun cuci piring.

Bekerja sama dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, saya mengadakan penelitian bersama para dosen setempat yaitu Nuniek Nizmah Fajriyan, M.Kep., Sp.KMB, Urmatul Waznah, S.Si., Apt., dan Eko Mugiyanto, M.Farm., Apt.

Hasilnya adalah, bahkan kulit nanas yang biasanya hanya menjadi limbah tak berguna ternyata bisa digunakan untuk menjadi produk olahan bermutu tinggi dalam bentuk obat kumur dan sabun cuci piring.



Kiprah Peres

Kemasan menjadi salah satu kunci keberhasilan pemasaran dan saya mengadakan penyuluhan cara produksi hingga pembuatan kemasan dengan mendatangkan ahlinya yang telah belajar hingga manca. Lagi-lagi mereka sangat antusias.



Obat cuci piring anti kuman alami berbiaya minimalis.

Pemberian bantuan alat pembuat herbal kumur berbahan baku kulit nanas hanya sebuah stimulan agar setelah pelatihan para petani nanas tidak berhenti namun langsung berproduksi secara komersial dan berkreasi secara mandiri.

Sebelumnya saya juga menyalurkan mesin berukuran besar untuk mengolah nanas (hasil riset BPPT) agar digunakan oleh para petani nanas di Belik.

Saya tidak meminta sepeser pun hasil usaha mereka. Semua demi kesejahteraan rakyat, dalam hal ini dalam lingkup Dapil sebagai Pilot Project saya.



POSYANDU

Search jarum jam :

Pemberian bantuan makanan sehat untuk Posyandu Desa Tumbrep Bandar tanggal 9 April 2019, Posyandu Desa Deles, Posyandu Desa Tembelang Bandar, Posyandu Desa Cepoko Bandar, dan Posyandu Desa Candigugur.

Kiprah Perempuan Parlemen

E - Voting

Ada sebuah keprihatinan bahwa dalam Pemilu 2019 terjadi kegemparan soal perhitungan suara. Validitas dan akurasi sistem *Quick Count* dan *Real Count* bahkan menjadi ajang perselisihan tak berkesudahan hingga akar rumput. Jatuhnya korban KPPS, Panwas, dan Polisi hingga total 554 orang saat Pemilu 2019 di bulan April tersebut ternyata melebihi total jumlah korban bencana nasional selama 4 bulan berjalan tahun 2019 (Data BNPB : total 438 jiwa dalam 1.586 kejadian).

Sistem pemilu perlu ditimbang ulang. Sistem yang ada juga masih membuka peluang korupsi dan kecurangan pemilu. Terkait hal tersebut, saya kebetulan bekerjasama dengan BPPT telah menyalurkan teknologi e-voting pada PILKADES di lokasi *pilot project* di Kabupaten Pematang.

Pada bulan September 2016, dilaksanakan PILKADES secara serentak di 11 desa dalam 1 hari



menggunakan E-Voting dan E-Verifikasi secara sukses dengan tingkat kecurangan 0%. Mengulang kesuksesan sebelumnya, pada tahun 2018 juga dilaksanakan PILKADES di 18 desa di wilayah Kabupaten Pemalang. Semua dilakukan secara serentak dan telah terpilih 18 kepala desa tahap 1 tahun 2018 di Kabupaten Pemalang tanpa ada sengketa dan kecurangan.

Saya ingat, pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018, saya melakukan peninjauan bersama Bupati Pemalang dan BPPT untuk melihat langsung pelaksanaan E-Voting di desa Gintung dan Purwodadi. Keduanya adalah 2 desa dari total 172 desa yang sedang melaksanakan E-Voting PILKADES Tahap 3. Pelaksanaan sangat

DR. Marlinda Irwanti Poernomo, SE, M.Si : E-Voting Sudah Harus Dilaksanakan Pada Pilkades Di Seluruh Indonesia

Jurnalpemalang.com 28 Oktober 2018

Dibaca 66 kali



Jurnalpemalang.com, Pemalang – Hal itu disampaikan DR. Marlinda Irwanti Poernomo, SE, M.Si anggota DPR RI kepada wartawan saat meninjau Pilkades serentak di Kabupaten Pemalang pada Minggu (28/10/2018).

lancar dan saya sempat melakukan tanya jawab kepada peserta yang usianya diatas 50 tahun. Menurutnya, ia tidak mengalami kesulitan dan waktunya lebih cepat.

Inovasi dengan Teknologi E-Voting ini sangat bagus untuk terus dikembangkan. E-Voting sangat efisien dari segi waktu karena mampu memberikan hasil seketika. E-Voting sangat efisien dari segi biaya lebih dari 50% jika satu alat digunakan untuk 5 kali (Pilkades, Pilbub, Pilgub, Pileg dan Pilpres). Dan yang paling utama, E-Voting mampu menekan kecurangan hingga 0%.



eVoting, eVerifikasi, serta eRekapitulasi yang Inovatif ini sangat penting dalam melaksanakan pesta demokrasi kedepan yang Luber, Jurdil, Akurat, Cepat, Efektif, dan Mudah sesuai harapan kita semua baik DPR, Pemerintah, maupun Masyarakat Indonesia. Saya berharap E-Voting bisa dilakukan diseluruh Indonesia pada Pemilu 2024.

Korupsi dan kecurangan dalam pemilihan dapat ditekan secara maksimal karena efisien biaya, waktu dan logistik pemilu. E-Voting menguntungkan para kontestan yang ikut bertarung pada kontestasi pemilu utamanya kontestan yang jujur, baik Pilkades, Pilbup, Pilgub, Pileg, dan Pilpres karena tidak perlu keluar biaya yang besar untuk uang saksi dan lain-lain. Muaranya adalah, dihasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah dan fokus mengabdikan kepada masyarakat yang akan menjadikan Indonesia negara hebat.

SOSOK

DR Marlinda Irwanti M.Si

Tunaikan Amanah

Anggota DPR RI DR Marlinda Irwanti MSi berusaha selalu menjaga amanah. Sudah banyak dana aspirasi yang disalurkan ke masyarakat yang diwakilinya. Tak tanggung-tanggung, Dr Marlinda tahun 2017 mencairkan dana aspirasi sebesar Rp. 25,3 M dan tahun 2018 sebesar Rp. 29,9 M. "Setiap janji harus ditunaikan. Setiap aspirasi harus diwujudkan. Karena masyarakat sudah beri amanah pada saya. Meski pseudo suatunggal, saya jaga aspirasi dan amanah masyarakat," ucap politisi Partai Golkar asal Dapil 10 Jateng meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Pemasang.

Khusus untuk Kabupaten Batang, wanita ayu ini membantu menyalurkan program Indonesia Pintar sebesar Rp 10,4 M. Sebelumnya, tahun 2017, telah menyalurkan program Indonesia Pintar, untuk anak SD sebanyak 8.584 siswa, 4.111 siswa SMP dan 3.566 siswa SMA/SMK 3.566 siswa. "Saya juga salurkan beasiswa Bidikmisi 250 anak. Untuk SD bagi anak tak mampu, lupi berprestasi. Ada juga 300 program pembinaan akademik, bagi anak yang

tidak mampu dan tak mampu. Yang berprestasi, minimal IP 3,5," tutur Alumnus S3 Fakultas Dakwah Universitas Islam Indonesia (UII).

DR Marlinda ikut memfasilitasi pelatihan guna meningkatkan kesejahteraan melalui sektor pariwisata.

"Saya memfasilitasi pelatihan tentang HAKI, pelatihan *marketing*, UKM, fasilitasi mobil aspirasi perpusatkaan keliling dinas perpusatkaan Batang. Nilainya sekitar Rp 1M," tukas Wanita a s i I Jogjakarta ini. (Iwan)



Demi Rakyat, Marlinda Salurkan Aspirasi Hingga Rp 55,4 M

KOTA Sejak dilantik sebagai anggota DPR RI menggantikan Budi Supriyanto, DR Marlinda Irawati MSi sudah banyak menyalurkan dana aspirasi kepada masyarakat yang diwakilinya di daerah pemilihan 10 Jember, meliputi Kota Pekaongan, Batiang, Kah Pekalongan dan Pemalang.

Tidak tanggung-tanggung, Marlinda memberikan aspirasinya kepada rakyat yang memilihnya pada tahun 2017 sebesar 25,5 Milyar, dan pada tahun 2018 sebesar 29,9 Milyar rupiah, dengan total bantuan aspirasi Marlinda 2017-2018 berjumlah Rp 55,4 Milyar. "Setiap hari harus ditas-tas, dan setiap aspirasi harus diwujudkan. Meski penuh tantangan, saya pasti-



Wahid Nugroho

kan aspirasi terus berpijar," ungkapnya.

Diantara penerima aspirasinya Marlinda, khusus untuk Kabupaten Batiang, dibidang pendidikan dasar, dirinya telah membantu

program Indonesia Pintar sebesar Rp 10,4 milyar. Lalu pada tahun 2017, telah menyalurkan program Indonesia Pintar, untuk anak SD

ke hal 2 kol 5



Wahid Nugroho

BERSAMA - Anggota DPR RI, DR Marlinda Irawati MSi sedang berfoto dengan penerima beasiswa Widya Pramodya Kayu Adhi (22), dengan didampingi Warek II Unkal, DR Berry Diah Mardiana.

Testimoni Konstituen



Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Pekalongan
Dr. Ir. Benny Diah Madusari, M.Pi.

Saya mengenal ibu Marlinda sejak dua tahun yang lalu, sekitar Februari 2018. Sebagai seorang anggota DPR Republik Indonesia, saya melihat beliau benar-benar menyampaikan amanat masyarakat.

Beliau adalah teman dan partner yang gigih memperjuangkan pendidikan melalui aspirasi DPR tanpa pamrih, mau bermasyarakat, dan mengabdikan ke masyarakat baik dalam pendidikan maupun motivator bagi mahasiswa dalam mengisi kehidupan dalam kampus dan luar kampus untuk selalu bersemangat.

Pribadi beliau asik, cantik, dan senantiasa bergembira.



Ketua STIE Muhammadiyah Pekalongan
Sobrotul Intikhanah, S.E., M.Si.

Saya membayangkan setiap orang yang mengenal Ibu Marlinda pasti mengatribusikan dengan sosok yang sangat supel, ramah, tegas dan bersahaja, pekerja keras, dan berbagai sifat positif lainnya. Saya setuju dengan atribut tersebut, bahkan selama 2 tahun mengenal beliau saya masih ingin menambahkan atribut lainnya yaitu ibu Marlinda sosok yang sangat committed, tangguh, ceria, smart dan kritis.

Sebagai anggota DPR RI dapil X saya merasakan kehadirannya sebagai anggota dewan yang menjangkau aspirasi masyarakat di dapilnya, bukan yang terima informasi saja tapi langsung terjun ke lokasi di daerah pilihan beliau.

Beliau menjangkau aspirasi dan menyalurkan aspirasi tanpa tebang pilih, membantu semua level pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Keberadaan beliau sebagai anggota Komisi X DPR RI sangat dirasakan oleh kami yang berada di dapilnya. Kami sebagai masyarakat mengenal ibu Linda sebagai sosok yang mendukung kegiatan pendidikan, dan memberikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi.

Kiprah Perempuan Parlemen

Aspirasinya sungguh sangat kami rasakan. Ratusan mahasiswa kurang beruntung secara ekonomi menjadi saksi kiprah ibu Linda. Ratusan orang tua mahasiswa bidikmisi merasakan kinerja ibu yang membantu anak-anak mereka menapaki masa depan yang lebih baik. Tanpa minta balasan apapun selain doa tulus mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi. Cita-cita beliau sangat mulia yaitu membantu menyelesaikan tugas negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui anggota dewan. Tulisan ini ingin kami sajikan sebagai bentuk apresiasi kinerja Ibu Marlinda selama menjadi anggota DPR RI.

Seringkali ada kegelisahan di benak saya tentang persepsi anggota dewan yang “eksklusif – elit” dan sejauh mana sebetulnya mereka mengabdikan diri untuk rakyat sebagai wakil rakyat? Mengenalnya ternyata memporakporandakan *mindset* di pikiran saya. Sosoknya sangat *visioner, humble*, membumi, dekat dengan rakyat, bahwa mengenalnya 2 tahun serasa sudah 10 tahun karena diskusinya tidak pernah garing untuk mencermati persoalan pendidikan dari hulu hingga hilir. Itu menunjukkan intelektualitasnya yang tinggi. Ibu Marlinda mempunyai kepekaan terhadap kondisi pendidikan yang perlu di perbaharui, melalui Komisi X memperjuangkannya menjadi sebuah kebijakan yang berpihak pada rakyat bukan pada elite tertentu. Sangat cocok sebagai *role model* intelektual dan aktivis yang mengimplementasikan wanita yang mampu bergerak dan berkarya, menggerakkan pemberdayaan dan perubahan sosial untuk bangsa berawal dari akar masalah yang berada di masyarakat bukan dari Menara Gading.

Saya pernah satu hari bersama beliau. Beberapa jam saja saya sangat lelah melihat aktivitas beliau yang luar biasa padat. Saat sehari bersama, saya melihat ceriwis menjadi bagian dari dirinya tetapi hatinya baik dan pemaaf. Dalam aktivitas tak kenal lelah dan putus asa, tetap cantik sepanjang waktu, dan ramah kepada siapa saja.

Kiprah Perempuan Parlemen

Dari lubuk hati yang paling dalam saya berterima kasih dan bersyukur bertemu dengan sosok Dr. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si. saya senang bisa menjadi teman sekaligus mitra, bahkan saya memberanikan diri menyebutnya “saudara”. Sosoknya yang selalu mengembangkan diri untuk menjadi manusia yang sadar akan pentingnya edukasi dan pembelajaran menginspirasi saya untuk segera menyelesaikan studi doktoral saya yang tertunda dengan alasan kesibukan. Malu rasanya melihat ibu dengan segudang kesibukannya mampu menyelesaikan tugasnya menulis buku dan hasil penelitian lainnya. Semoga Ibu senantiasa berada dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, dan keberkahan dalam melanjutkan pengabdian. Doa saya semoga predikat Guru Besarnya segera diperoleh.

Keep up the good work Dr. Hj. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si.



Kepala SMK Muhammadiyah Pekalongan
Lies Triati Nur, S.H., S.Pd., M.Si.

Perkenalan dengan bu Marlinda pertama kali saat berkunjung ke SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan pada awal Februari 2017.

Beliau sangat memperhatikan pendidikan, salah satunya sekolah kami. Beliau memberikan dana aspirasi untuk pembangunan gedung RPS.

Sebagai anggota DPR, beliau adalah contoh perempuan yang kuat, disiplin, dan pekerja keras. Sementara itu, kepribadian beliau mudah bergaul, enak diajak ngobrol, dan *care*.

Kami sangat terkesan dengan kenangan bersama beliau ketika berkunjung ke sekolah. Meski kelas pejabat DPR RI, namun beliau mau duduk bareng – bareng menikmati makanan khas ndeso kluban bothok, keong, dan krupuk mie yang digoreng dengan pasir dan beliau santai menikmatinya. Semua guru dan karyawan di sekolah yang ketemu dispanya seperti sudah kenal lama.



Kepala SMP Negeri 2 Tersono, Batang
Suharyanti, S.Pd., M.Pd

Awal tahun 2018 saya pertama kali mengenal Ibu Dr. Marlinda Irwanti, S.E, M.Si. Beliau adalah sosok perempuan yang tidak hanya cantik dan pintar namun juga cantik dan membangun.

Sebagai anggota DPR Republik perempuan, kinerja beliau sangatlah membanggakan. Beliau penyeru perubahan, Ibu Pejuang Pendidikan dan sangat peduli terhadap kesehatan ibu dan anak. Sebagai anggota dewan, beliau sangat peduli dengan pendidikan, terbukti beliau sudah banyak memberikan aspirasi di sekolah- sekolah lewat PIP dan bantuan sarpras yang lain.

Bantuan nyata di sekolah kami SMP Negeri 2 Tersono, Kabupaten Batang, Jawa tengah adalah lewat aspirasi PIP dan alat – alat TIK. Aspirasi PIP sangat bermanfaat untuk siswa-siswa kami yang sebagian besar berasal dari keluarga kurang mampu. Adapun bantuan aspirasi lewat TIK sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah sehingga sekolah kami bisa melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Kiprah Perempuan Parlemen

Ibu Dr. Marlinda Irwanti, S.E, M.Si. adalah pribadi yang anggun, berwibawa, dan ramah. Beliau dekat dengan masyarakat dari semua kalangan. Hal ini terbukti saat beliau melakukan kunjungan kerja perorangan pada masa reses. Dengan penuh keramahannya, beliau menyapa dan menyatu dengan masyarakat.

Sebagai seorang komunikator politik, teruskan berkiprah, teruskan menyerukan perubahan, teruskan berjuang wahai Ibu Pejuang Pendidikan.



Kepala SMP Negeri 4 Gringsing, Batang

Sri Rusmiyati, S.Pd., M.Pd.

Saya mengenal Ibu Dr. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si. sebagai anggota DPR/MPR RI pada tahun 2016 yakni sejak beliau sering berkunjung ke Kabupaten Batang. Namun, saya mengenal beliau lebih dekat pada bulan Juli 2017, ketika beliau me-*launching* buku di Pagilaran, Kabupaten Batang.

Ternyata benar kabar yang saya dengar sebelumnya, bahwa beliau orang yang pintar, ramah pada siapapun, dan suka memberikan bantuan dana aspirasi ke sekolah-sekolah atau komunitas bacaan. Setelah selesai acara launching buku, pada saat ramah tamah banyak kepala sekolah mengajukan bantuan lewat aspirasi beliau berupa bantuan rehabilitasi gedung, bantuan komputer, buku-buku bacaan, maupun PIP.

Alhamdulillah, SMP Negeri 4 Gringsing termasuk salah satu dari banyak sekolah yang mendapatkan bantuan rehabilitasi gedung sekolah, bantuan komputer pembelajaran, dan beasiswa siswa (PIP) dari Kementerian Pendidikan lewat aspirasi beliau. Pada bulan September 2018, saat kunjungan masa reses Ibu Marlinda berkenan hadir di sekolah-sekolah untuk meninjau pelaksanaan bantuan lewat dana aspirasinya.

Kiprah Perempuan Parlemen

Menurut pendapat saya, kinerja Ibu Marlinda sebagai anggota DPR RI perempuan sangat baik. Amanah yang diberikan rakyat sudah dilaksanakan sebaik-baiknya. Hal ini dibuktikan dengan kerja keras dan kerja cerdasnya untuk *blusukan* meninjau langsung ke sekolah-sekolah di Kabupaten Batang, sehingga sangat membantu sekolah sesuai kebutuhannya untuk mendapatkan bantuan pemerintah, agar bantuan dari pemerintah tersebut tepat sasaran.

Tidak banyak anggota dewan yang memperhatikan sekolah – sekolah dan komunitas baca, namun Ibu Marlinda sangat konsisten dengan komitmen bidang tugasnya di MPR untuk memajukan pendidikan di Indonesia lewat bantuan aspirasi ke sekolah- sekolah dan komunitas baca di daerah-daerah. Menurut saya hal seperti inilah yang dapat “mendekatkan” anggota dewan dengan rakyat, sehingga rakyat benar-benar merasa terwakili suaranya karena diperhatikan kebutuhannya, terutama di bidang pendidikan.

Selain penampilannya yang cantik dan menarik, Ibu Marlinda juga ramah, pintar bergaul dengan siapa saja, menyenangkan bila bicara dan membuat orang betah berlama-lama berbincang dengan beliau. Dalam hal makanan beliau juga sangat sederhana, yakni berkenan dengan nasi pecel sebagai hidangan dalam setiap kunjungannya.

Pesan saya pada Ibu Marlinda, teruskan menjadi pribadi yang menyenangkan dan menebar manfaat bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam memajukan dunia pendidikan dan budaya baca masyarakat, meskipun pada periode ini suara yang mendukung Ibu belum bisa mengantarkan Ibu ke Senayan lagi, tetapi *Insy Allah* benih-benih kebaikan yang Ibu sebarkan di dunia pendidikan akan tumbuh subur di ladang-Nya dan mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah Ibu

Kiprah Perempuan Parlemen

yang kelak akan membawa Ibu ke surga-Nya. Mudah-mudahan Allah SWT selalu meridloi, merahmati langkah Ibu, dan memberikan yang terbaik buat Ibu dan keluarga. *Aamiin YRA.*



Kepala SD Negeri Tembok 01, Batang
Sri Kartini, S.Pd.SD.

Kami mengenal Ibu Marlinda sejak beliau menjadi penyiar TVRI, terlebih lagi setelah Ibu Marlinda menjadi anggota dewan tahun 2009 karena beliau beberapa kali berkunjung ke Desa Tembok, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang.

Kinerjanya sangat bagus, berkepribadian baik, santun, supel, humoris, dan sangat merakyat. Waktu reses beliau memanfaatkan untuk turun ke daerah-daerah mendekati diri dengan rakyat.

Beliau orang yang ramah dan bertanggung jawab, dan sangat aspiratif. Berkat beliau, sekolah kami mendapat bantuan RKB senilai Rp 158.000.000,00 Program PIP juga sangat bermanfaat dan membantu wali murid untuk meringankan beban kebutuhan siswa.

Kesan beliau, beliau sangat memperhatikan pendidikan dengan memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah dan siswa mendapatkan bantuan PIP. Mohon kinerja Ibu yang baik tetap dilanjutkan. SD Tembok 01 tetap mengharapkan

Kiprah Perempuan Parlemen

kehadiran ibu. Kenangan kami saat kunjungan ke SD, beliau sangat dekat dengan wali murid, anak-anak, dan masyarakat Desa Tembok.



Kepala SMP Negeri 6 Batang
Marjiyanti, S.Pd., M.Pd.

Kami keluarga besar SMP 6 Batang beserta wali murid sangat merindukan Ibu Dr. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si. Ibu yang cantik, murah senyum, ramah, suka berbagi, seorang motivator yang cerdas, simpati, suka membantu orang kecil, berjiwa besar, dan suka bergurau.

Di mata kami, ibu Marlinda adalah teladan di dunia pendidikan. Beliau adalah sosok anggota dewan yang amanah.

Terima kasih ibu. Semoga Allah memberikan rahmat, taufik, dan hidayat kepada ibu beserta keluarga sehat dan sukses selalu.



Kepala SD Negeri Sukomangli 02, Batang
Kartini, S.Pd.

Saya mengenal Ibu Marlinda sekitar tahun 2017 pada saat kegiatan pemberian BANSOS (Bantuan Pagar Sekolah / Pembuatan Tebing), PIP, dan alat kesenian untuk beberapa sekolah di Kabupaten Batang.

Dalam kinerja, menurut saya beliau adalah orang yang tekun, ulet, pekerja keras, dan memiliki komitmen. Ketika ada usulan dari pihak sekolah langsung ditanggapi, diusulkan, dan ditindaklanjuti dengan memberikan bantuan melalui BANSOS.

Secara kepribadian saya melihat Ibu Marlinda sebagai orang yang rendah hati, sederhana, dan merakyat. Beliau orang yang peduli, cepat akrab dengan siapapun, menghargai sesama, dan selalu ingin memperjuangkan nasib wong cilik. Ketika bersama beliau, rasanya sudah dianggap menjadi keluarga sendiri.

Semoga Ibu Marlinda diberi kesehatan, kesuksesan, dan kesempatan untuk memperjuangkan masyarakat kecil.



Kepala SD Negeri Kalisalak 03 Limpung, Batang

Dardiningsih, S.Pd. SD

Saya mengenal Ibu Marlinda pertama kali tahun 2017 saat beliau menjadi pembicara seminar Empat Pilar Kebangsaan. Beliau sosok anggota DPR yang peduli dengan masyarakat tingkat bawah, menengah, maupun atas dan mau terjun langsung menyerap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat di bawah.

Ibu Marlinda adalah seorang anggota dewan yang sangat peduli dengan masyarakat, terutama di dalam dunia pendidikan. Terbukti beliau memberikan dana aspirasinya untuk perkembangan dunia pendidikan seperti pembuatan perpustakaan sekolah, rehabilitasi gedung, pembuatan pagar sekolah, dan tidak hanya di bidang sarana dan prasarana akan tetapi beliau juga memikirkan masyarakat yang kurang mampu dengan mengusulkan program PIP untuk siswa kurang mampu.

Pribadi beliau ramah, mudah bergaul, dan bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Ibu Dr. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si. adalah sosok anggota DPR yang aktif mewakili kaum perempuan dan mampu bersaing dengan kaum laki-laki, mau turun terjun langsung menyapa masyarakat bawah, dan menyerap aspirasi dari masyarakat hingga terealisasi. Anggota dewan seperti inilah yang kami harap bisa terus berjuang menyampaikan aspirasi masyarakat.



Kepala SD Negeri Sukorejo, Batang
Harlinah Rahmi Yuwana, S. Pd.

Sejak mengenal Ibu Marlinda Irwanti tahun 2018, saya melihat beliau sebagai salah satu bukti emansipasi perempuan Indonesia.

Kepedulianya terhadap dunia pendidikan tidak diragukan lagi. Sebagai anggota dewan pusat, beliau tidak ragu untuk berkunjung hingga ke desa-desa. Itu membuat saya mengagumi kiprah beliau di dunia pendidikan.

Bantuan dan aspirasi beliau juga sangat membahagiakan bagi sekolah dan warga sekolah karena terbukti nyata.

Ibu Marlinda adalah sosok perempuan cantik yang tangguh, hebat, dan pekerja keras tak kenal lelah. Beliau enerjik, supel, ramah, dan memasyarakat sehingga layak menjadi suri tauladan yang baik bagi perempuan-perempuan Indonesia lainnya.

Sebuah kehormatan bagi saya sebagai kepala sekolah di desa dapat duduk bersama bahkan bernyanyi bersama penuh canda dan tawa. Seperti tiada jarak antara anggota dewan yang terhormat dengan masyarakat biasa. Semoga Ibu

Kiprah Perempuan Parlemen

Marlinda tetap eksis dan selalu berkontribusi untuk memajukan dunia pendidikan. Semoga Allah selalu meridhoi dengan penuh keberkahan dalam setiap langkahnya dan selalu diberi kesehatan dalam menjalankan aktivitasnya. Aamiin.



Tugas pengawasan PIP dan gerbang sekolah oleh ibu Marlinda sekaligus pamitan yang mengharukan.



Kepala SMP Negeri 1 Blado, Batang
Sri Mulyani,S.Pd.,M.Pd.

Saya mengenal ibu Dr. Marlinda Irwanti,SE.,M.Si. mulai tahun 2018. Menurut pendapat saya kinerja ibu Marlinda Irwanti sebagai anggota DPR RI perempuan sangat baik dan ramah. Beliau merakyat, mau mengenal rakyat tanpa membedakan kaya atau miskin.

Ibu Dr. Marlinda Irwanti,S.E., M.Si. telah banyak membantu SMP Negeri 1 Blado Kabupaten Batang yaitu dengan pemberian dana PIP bagi siswa – siswi SMP Negeri 1 Blado yang tidak mampu dan juga telah memberikan *blockgrant* ke SMP Negeri 1 Blado berupa rehabilitasi 2 ruang belajar yang memang sangat dibutuhkan karena kondisi ruang belajar (kelas) yang rusak.

Kepribadian ibu Marlinda menurut saya sangat baik. Beliau sangat bersahabat, pandai, tegas, dan selalu semangat. Terbukti di tengah kesibukannya sebagai anggota DPR RI masih sempat mengunjungi dan bertemu dengan orang tua penerima PIP dan masih sempat untuk menulis buku.

Kiprah Perempuan Parlemen

Ibu Dr. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si. sangat menginspirasi, mempunyai kepribadian yang santun, pandai, ramah, tegas, dan menyenangkan saat berkomunikasi. Semoga ibu tetap memperhatikan dan peduli dengan dunia pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan.



Kepala SMK Negeri 1 Blado, Batang
Dra. Lutfah Barliana, M.Pd.

Kurang lebih 11 bulan yang lalu saya berkenalan dengan Ibu Dr. Marlinda Irawati, S.E., M.Si. Tepatnya, saat menghadiri peringatan HUT RI di lapangan Desa Cokro, Kab. Blado, Provinsi Jawa Tengah pada bulan Agustus 2018 atas undangan dari Kepala Desa, Bapak Rozikin. Sejak itu sy mulai mengenal bagaimana sosok Bu Marlinda.

Sebagai anggota DPR RI perempuan, beliau sangat aktif memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya di bidang pendidikan, baik saat rapat di forum anggota dewan DPR RI maupun saat berkunjung ke daerah-daerah. Hal itu saya lihat dari beberapa kiriman video yang diberikan kepada saya melalui *whatsApp*. Selain itu, juga beberapa kali kiprahnya diekspos oleh media cetak.

Ibu Marlinda adalah sosok anggota dewan perempuan yang sangat getol dan peduli memperjuangkan pendidikan. Hal itu terbukti dari pemberian dana aspirasi melalui PIP yg diberikan kepada para siswa dan juga pemberian beasiswa kepada para mahasiswa yang kurang mampu. Hal ini bisa mengangkat mereka untuk tidak putus sekolah dan bisa mengentaskan kemiskinan sehingga mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Kiprah Perempuan Parlemen

Secara pribadi saya merasakan bahwa beliau sangat ramah, supel, mampu berkomunikasi dengan baik dengan semua kalangan, dan juga amanah. Itu terbukti dari yang saya ketahui secara langsung yakni dalam hal penyaluran dana PIP bagi para siswa dan beasiswa bagi mahasiswa. Selain itu juga ada pemberian bantuan sarana olahraga.

Kesan saya selama bergaul dengan beliau adalah bahwa walaupun anggota dewan, beliau tetap rendah hati dan tidak sombong. Harapan saya terhadap beliau adalah untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya dalam bidang pendidikan karena kemajuan pendidikan mampu mengentaskan kemiskinan.

Semoga Ibu Dr. Marlinda Irawati, S.E., M.Si. senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT, konsisten, dan amanah. Aamiin ya.



Kepala SD Negeri 01 Kajen, Batang
Sri Windaryani, S. Pd.

Saya mengenal ibu Dr. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si. sejak bulan Oktober 2017. Beliau sangat inspiratif, karena sebagai anggota DPR RI telah melaksanakan amanah dari rakyatnya dengan memberikan bantuan aspirasi dewan dalam bidang pendidikan.

Sebagai anggota dewan yang aspiratif, beliau telah memberikan dana KIP sejumlah 69 siswa @ 450.000 pada tahun 2017 dan memberikan bantuan pembangunan MCK pada SD kami (SDN 02 Kajen, Kabupaten Batang).

Pribadi ibu Marlinda sangat ramah, familiar, supel dengan siapa saja.

Semoga dana yang telah diberikan kepada SD Negeri 01 Kajen menjadi amal baik dari Ibu Dr. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si. dan mendapat imbalan dari Allah SWT. *Aamiin yra.*



Kepala SMK Peternakan Lembah Hijau, Batang
Dani Irawati S.Psi.

Saya mengenal profil ibu Dr. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si. sejak tahun 2014, kemudian mengenal secara langsung pada tahun 2018.

Sebagai anggota DPR RI perempuan, ibu Dr. Marlinda Irwanti, S.E, M.Si. memiliki kinerja yang luar biasa. Beliau aktif terjun secara langsung ke dapilnya, menyapa semua lapisan masyarakat dan mampu berbaur dengan segala lapisan masyarakat tanpa melihat status sosial. Beliau mampu mengurai persoalan-persoalan terkait pendidikan dengan jelas dan mampu memberikan solusi-solusi dengan cermat dan tepat sasaran.

Sebagai seorang perempuan yang mempunyai sikap keibuan dan kelembutan, beliau mampu menjadikan sikap tersebut untuk berkomunikasi dengan baik antara Ibu Marlinda Irwanti dengan masyarakat umum.

Sebagai anggota DPR RI, ibu Dr. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si telah menunaikan tugasnya dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan beliau telah banyak membantu kemajuan dunia pendidikan di Dapil X Jawa Tengah, baik dalam hal membantu

Kiprah Perempuan Parlemen

penerimaan PIP, membantu beasiswa, membantu sertifikasi guru, membantu sarana dan prasarana sekolah, dan lain sebagainya. Beliau mampu merealisasikannya secara profesional.

Ibu Marlinda adalah sosok yang visioner, ramah, keibuan, dan penuh dengan keinginan untuk membantu atau dermawan.

Kesan saya terhadap beliau adalah pribadi yang apa adanya, memiliki semangat nasionalisme tinggi, bersungguh-sungguh pada apa yang menjadi amanatnya, dan berjiwa besar. Semoga ibu Marlinda terus mengabdikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun pada periode tahun ini ibu tidak duduk kembali sebagai anggota DPR RI. Allah SWT akan memberikan jalan yang terbaik bagi hamba-Nya yg amanah seperti Ibu.

Kenangan menarik bersama ibu Marlinda Irwanti adalah saat mengantar beliau ke stasiun Pekalongan menuju Jakarta setelah beliau memberi materi mengenai 4 Pilar di SMK Peternakan Lembah Hijau. Kereta yang beliau naiki berangkat pada pukul 17.00 WIB, sementara jalanan macet dan waktu sudah menunjukkan pukul 16.40 WIB, sedangkan di malam harinya beliau harus melakukan persiapan untuk tugas sebagai anggota DPR RI ke Amerika Latin.

Terima kasih untuk ibu Dr. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si. karena telah memberikan pelajaran mengenai ketulusan kepada kami semua. Dharma Bakti ibu kepada negara akan kami kenang sepanjang masa. Dari SMK Peternakan Lembah Hijau, kami doakan semoga Ibu beserta keluarga dan staff senantiasa dijaga kesehatan dan diberi kemudahan di setiap urusannya. Kami bangga bisa mengenal sosok anggota DPR RI seperti Ibu. Terima kasih.



Tokoh Masyarakat Batang
Mbah Pari

Ibu Marlinda adalah sosok figur yang humanis. Wanita tangguh. Tidak pernah lelah dalam menyampaikan program. Beliau sosok wanita kuat yang bisa menerima segala kemungkinan. Bagi kami, beliau adalah Srikandi.



Kepala Desa Pungangan, Batang
Siswono

Pandangan saya terhadap bu Marlinda, beliau adalah satu-satunya anggota DPR RI yang selama ini sangat perhatian dengan rakyatnya khususnya di bidang pendidikan, olah raga, dan pariwisata di Kabupaten Batang.

Beliau benar-benar mau terjun ke lapisan masyarakat bahkan sering tidur di berbagai pelosok desa di Kabupaten Batang. Beliau tidak pernah mengenal lelah dan betul-betul sangat dekat di hati masyarakat Batang.

Saya sendiri sudah sering mengikuti selama beliau terjun di dapilnya dan sambutan masyarakat sangat luar biasa. Itu yang saya ketahui tentang jejak perjalanan bu Marlinda selama 3 tahun saya mendampingi beliau.



Ketua Cabang IGTKI Limpung, Batang
Siti Mutmainah, S.H., S.Pd.

Saat pertama bertemu dengan beliau, kami yang bukan orang kota agak minder karena sosok ibu yang cantik dan orang terkenal. Siapa sih yang tidak kenal dengan MARLINDA, presenter yang sangat terkenal pada saat itu. Eh ternyata beliau orang yang sangat supel, ahdap asor, dan mau bergaul dengan semua kalangan.

Seumur hidup kami tak akan pernah lupa pada ibu Marlinda karena baru pertama kali ini kami bertemu namun hubungan kami melebihi saudara. Padahal beliau anggota DPR Pusat namun mau terjun langsung di dapilnya. Kami bisa bertatap muka dan bisa langsung menyampaikan apa yang menjadi unek-unek kami selama sekian tahun kami pendam namun tidak tahu harus curhat kepada siapa.

Karena kami guru tetap yayasan maka puncak karir tertinggi kami adalah mendapatkan tunjangan IMPASING, yaitu tunjangan kesetaraan bagi guru swasta yang gajinya setara dengan PNS golongan 3A. Harapan kami untuk menjadi PNS terganjal oleh suatu aturan yaitu usia karena kebanyakan usia kami sudah di atas kepala empat.

Kiprah Perempuan Parlemen

Dua belas tahun kami menunggu dengan proses atau tahapan yang kita tempuh tapi SK Impassing itu tak kunjung datang. Akhirnya berkat beliau kami sekarang sudah bisa berfasfas lega karena SK itu sudah kami miliki. Tidak hanya SK Impassing saja yang kami peroleh. Banyak TK di wilayah Kabupaten Batang yang mendapatkan bantuan APE, bola volley, dan bola kaki yang semua itu sangat kita butuhkan.

Harapan kami semoga ibu tetap gigih berjuang untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia khususnya kaum wanita dan dunia pendidikan walaupun sudah tidak di gedung DPR lagi. Saya yakin ibu orang baik, pintar, dan tangguh. Dimanapun tempatnya, ibu akan tetap berkarir dan kesuksesan akan tetap berada dalam genggamannya.

Yang paling berkesan adalah kami mendapatkan figur seorang wanita yang gigih, pekerja keras, loyal, dan tangguh menjalankan tugasnya sehingga menjadikan motivasi sekaligus inspirasi bagi kami kaum wanita agar tidak selalu kalah dengan kaum laki-laki. Beliau adalah Kartini jaman sekarang dan pejuang IMPASING bagi guru TK Swasta Kabupaten Batang. Sukses karir juga sukses dalam keluarga. Sebuah contoh figur yang patut kita teladani. Sukses selalu ibu. Doa kami selalu mengiringi langkah ibu dalam berjuang mengisi kemerdekaan ini. LUP U IBU DR. MARLINDA IRWANTI, S.E. jasmu akan kami ingat sepanjang hidup.

Indonesia akan maju dengan Iptek untuk mensejahterakan rakyat.

(Marlinda Irwanti)

Bab 6



Problematika Caleg Perempuan

Dalam bab ini, saya akan sedikit memaparkan cerita-cerita dan buah pikir saya yang mungkin bisa diambil hikmahnya bagi teman-teman anggota dewan maupun anggota masyarakat yang di pemilu depan berminat untuk maju mencalonkan diri. Dengan menyelami cerita yang saya uraikan, mungkin para calon anggota legislatif akan lebih terbuka wawasan berpolitiknya karena bagaimanapun terjun kedalam parlemen adalah terjun kedalam politik yang kadang sungguh indah namun juga kadang kejam tidak pandang bulu.

Setiap 5 tahun sekali, Indonesia melakukan PILEG (Pemilihan Legislatif) sama dengan pemilihan Presiden, Gubernur, atau Bupati / Walikota. Setiap pemilihan selalu mempunyai keunikan tersendiri karena jumlah peserta akan berbeda sesuai

Kiprah Perempuan Parlemen

situasi dan kondisi saat itu. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2019 misalnya, diselenggarakan pada 17 April 2019 untuk memilih 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2019–2024. Pemilihan Legislatif 2019 dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Presiden Indonesia 2019.

Dari 27 partai yang mendaftar kemarin, hanya terdapat 14 partai yang memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional. Verifikasi ini mencakup keberadaan pengurus inti parpol di tingkat pusat, keterwakilan perempuan minimal 30%, dan domisili kantor tetap di tingkat DPP. Cara penempatan perempuan dalam dapil adalah dengan sistem *zig-zag*, misalnya no urut 1 laki-laki maka nomor urut 2 perempuan, demikian seterusnya.

Caleg perempuan merupakan fenomena yang tidak akan pernah selesai untuk dibahas. Para caleg perempuan biasanya merupakan perempuan-perempuan perkasa yang harus berjuang mati-matian. Kalau mereka bukan istri bupati, istri gubernur, anak bupati, anak gubernur, kerabat, atau keterikatan lain dengan penguasa setempat, sangat berat untuk bisa menang. Kalau perempuan itu menang, apalagi tanpa embel-embel keterkaitan yang saya sebutkan di atas, itu hal yang luar biasa. Apalagi kalau murni perjuangan sendiri.

Kiprah Perempuan Parlemen

DAPIL

Perlu dipahami bahwa saat seseorang maju mencalonkan diri menjadi caleg (laki-laki / perempuan) maka ia akan berkompetisi dengan caleg lain, baik caleg partai lain maupun caleg sesama partai. Mudah tidaknya tantangan yang dihadapi para caleg akan sangat tergantung pada DAPIL (Daerah Pemilihan) masing-masing.

Seperti kita ketahui bersama, seorang caleg harus dicalonkan oleh partai politik dan memilih daerah pemilihannya di seluruh Indonesia. Ada 80 dapil pada Pileg 2019 yang bisa dipilih caleg. Jumlah tersebut meningkat dibanding Pileg 2014 yang hanya 77 dapil. Jateng dibagi menjadi 11 dapil. Berikut adalah rincian Dapil DPR RI di Jawa Tengah :

Dapil Jateng I	Kabupaten Semarang, Kendal, Kota Salatiga, Kota Semarang
Dapil Jateng II	Kabupaten Kudus, Jepara, Demak
Dapil Jateng III	Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, Pati
Dapil Jateng IV	Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri
Dapil Jateng V	Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Kota Surakarta
Dapil Jateng VI	Kabupaten Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung, Kota Magelang
Dapil Jateng VII	Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen
Dapil Jateng VIII	Kabupaten Cilacap, Banyumas
Dapil Jateng IX	Kabupaten Tegal, Brebes, Kota Tegal

Kiprah Perempuan Parlemen

Dapil Jateng X Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Batang, Kota Pekalongan

Caleg memilih dapilnya disesuaikan dengan berbagai pertimbangan dan faktor. Misalnya pemilihan dapil berdasar tempat tinggal calon, tempat lahir calon, atau karena ditugaskan oleh partai. Tahun 2014 misalnya, saya ditempatkan partai di Dapil X karena di DIY dimana saya berasal ada kader perempuan sesama partai yang lebih senior yaitu mbak Titik Soeharto dan ketua DPD Golkar DIY.

Jumlah caleg di setiap dapil disesuaikan dengan perolehan kursi di DPR. Dapil saya di Jateng X pada pemilu sebelumnya mendapatkan 7 kursi (Golkar 1, PDIP 1, PPP 1, PKB 2, PAN 1, Gerindra 1) sehingga jumlah caleg yang ditempatkan ada 7 orang setiap partai untuk memperebutkan 7 kursi tersebut.

Kalau ada 14 partai yang memperebutkan kursi tersebut, maka ada 14×7 caleg = 98 caleg. Bayangkan ada berapa potensi gambar caleg yang bertebaran untuk tingkat DPR RI saja. Bagaimana perebutan wilayah terjadi tidak hanya antar partai tapi lebih mengerikan lagi sesama partai saling sikut memperebutkan wilayah untuk mendapatkan suara. Itulah sistem pilihan langsung dan suara terbanyak.

Antar partai berebut suara rakyat, sesama kader partai juga berebut suara rakyat. Kondisi tersebut bermuara pada mahalny suara rakyat. Satu suara bisa sangat menentukan dan mengalahkan yang lain. Suara rakyat menjadi mahal.

Kiprah Perempuan Parlemen

Padahal pemilik 1 suara berasal dari latar pendidikan, sosial, dan profesi yang berbeda-beda namun memiliki harga yang sama. Suara petani, nelayan, buruh, ibu rumah tangga, emak-emak di pasar, akan sama dengan suara guru, dosen, maupun profesor. Semuanya sama-sama 1 suara.

Sistem pemilihan langsung "*one man one vote*" hanya ada di Indonesia dengan tingkat pendidikan dan sosial berbeda. Akibatnya muncullah istilah pragmatisme, money politik, dan "beli rakyat / beli suara" mulai dari beli di tingkat rakyat *grassroot* hingga KPU (walau tidak semua bisa dibeli juga, tergantung wilayah dan komitmen petugas).

Meski demikian, tidak semua elemen masyarakat bisa dibeli. Ada rakyat yang bisa dibeli dan ada yang tidak bisa dibeli. Semua tergantung tergantung pada tingkat pendidikan, sosial, ketaatan agama, dan kecenderungan lebih menyukai aspirasi bantuan atau "amplop". Sistem politik kita yang menggunakan sistem pemilihan langsung mulai dari kepala desa, bupati/walikota, gubernur, DPR dan Presiden, memang menyisakan permasalahan.

NOMOR URUT

Pada Pemilu 2014, saya maju menjadi caleg dengan mendapatkan nomor urut 2 dan saya kalah. Pun begitu, capaian tersebut menurut saya sudah luar biasa mengingat keterbatasan-keterbatasan yang saya miliki termasuk akses-akses dan dapil yang baru saya kenal.

Kiprah Perempuan Parlemen

Saat itu saya diberi nomor urut 2 karena nomor 1 dipegang *incumbent* semua. Saya menerima nomor 2 tersebut dengan lapang dada karena *incumbent* sedang menjadi anggota DPR RI dan sudah berkontribusi memberikan suara pada partai Golkar.

Takdir Allah SWT kadang tak bisa diduga maupun dinyana. Meski saya kalah, ternyata di kemudian hari saya tetap berkesempatan masuk parlemen menggantikan nomor urut 1 yang mengalami masalah hukum.

Seperti telah saya sebutkan pada Bab V Eksistensi Perempuan Parlemen, saya dilantik pada tanggal 23 Agustus 2016 sebagai anggota DPR Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah X. dalam pelantikan tersebut, saya bersumpah dan berjanji untuk melakukan tugas dewan dan wakil rakyat. Sumpah tersebut selalu menjadi penjaga hati saya untuk tidak melakukan korupsi, agar datang ke gedung dewan sesuai ketentuan yang berlaku, dan agar berjuang demi kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat di Dapil X pada khususnya. Saya berusaha menjalankan tugas dan kewajiban saya sebaik mungkin, bahkan melebihi yang diperlukan.

Dalam Pemilu 2019, saya mencalonkan diri lagi sebagai *incumbent* di dapil yang sama yaitu Dapil X Jateng dan gagal mendapatkan kursi karena hanya meraih 60.000 suara. Ketua Umum Partai Golkar menempatkan saya pada nomor yang sama seperti saat Pemilu 2014 yaitu nomor urut 2, sebuah kenyataan yang dari berbagai sisi profesional tidak dapat ditemukan jawabannya. Nomor urut 1 diberikan kepada caleg yang di Pemilu 2014 hanya memperoleh 3.000 suara

Kiprah Perempuan Parlemen

(bandingkan dengan perolehan saya yang 50.000 suara). Ditinjau dari aspek apapun, seharusnya saya yang berhak mendapatkan nomor urut 1.⁷

Beberapa aspek yang menunjukkan hak saya mendapatkan nomor urut 1 adalah :

1. Saya incumbent
2. Saya pengurus harian partai
3. Saya aktif di DPR dan kegiatan organisasi (tidak semua anggota turut aktif)
4. Saya adalah Wakil Ketua Umum Ormas MKGR (pendiri Partai Golkar)
5. Saya kader perempuan
6. Saya menyumbang 50.000 suara di pemilu sebelumnya

⁷ Mendapatkan nomor urut 1 memang masih menjadi incaran banyak orang karena statistik menunjukkan nomor 1 cenderung lebih dipilih daripada nomor lain. Alasannya, selalu ada saja pemilih yang tidak mengenal semua caleg sehingga mencoblos nomor teratas (nomor 1). Alasan lainnya, selalu saja ada pemilih yang mencoblos partainya atau bukan calegnya. Otomatis suara yang mencoblos partai akan mengalir pada nomor 1 terlebih dahulu. Kalau jumlah melebihi yang dipersyaratkan untuk 1 kursi maka kelebihan suara akan dilimpahkan ke nomor selanjutnya. Tentu saja yang selalu menikmati suara partai adalah nomor urut 1. Kelebihan suara yang melimpah ke nomor urut selanjutnya seringkali tidak cukup untuk mencapai 1 suara.

Kiprah Perempuan Parlemen

Dengan sederet alasan logis tersebut di atas, wajar kalau saya terheran-heran dan kemudian mempertanyakan alasan saya diposisikan pada nomor urut 2. Sejumlah orang yang saya tanya dari Bidang Pemenangan Pemilu Jateng DIY, Ketum KPPG, dan team caleg semua tidak bisa menjawab. Jawaban datang dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto yang menyatakan bahwa penempatan nomor urut 1 karena yang bersangkutan adalah teman baik.

Sangat ironis. Ditinjau dari sisi manapun sangat ironis. Saya *incumbent* di dapil yang sama sehingga seharusnya saya diposisikan pada nomor urut 1. Saya pengurus harian partai yang lebih tinggi jabatannya daripada yang bersangkutan. Saya adalah wakil ketua umum MKGR yang mendirikan Golkar. Saya adalah kader perempuan yang seharusnya diutamakan di nomor jadi agar tercapai afirmasi 30%.

Nomor urut 1 mungkin bukan segalanya tapi sekali lagi secara statistik masih memiliki prosentase besar, dan seharusnya diberikan pada yang berhak. Kalau dalam internal dengan teman separtai saja tega, perlu dipertanyakan apakah secara external selalu berpihak kepada kepentingan rakyat.

Nomor urut 1 bisa kalah dengan apa yang masyarakat sebut sebagai politik uang atau amplop meski sulit dibuktikan. Sama dengan pencurian suara (termasuk pencurian suara teman separtai) yang masyarakat mengatakannya sebagai fenomena namun sulit untuk dibuktikan di ranah hukum. Hanya beberapa kasus di KPUD yang bisa diproses sementara yang lain tidak. Fenomena ini bisa terjadi pada pileg, pilgub, maupun pilbup/wal.

Kiprah Perempuan Parlemen

TEKANAN PENGUASA

Politik seringkali tidak mengenal kawan maupun lawan. Pada saat pemilihan kepala daerah di salah satu daerah di dapil saya, saya memberikan support kepada salah satu calon sehingga yang bersangkutan menang. Dari mulut beliau terucap bahwa program selanjutnya adalah ganti mensupport saya pada Pemilu Legislatif 2019.

Pada saatnya tiba, ternyata yang bersangkutan justru mendukung nomor urut 1 dan kemudian menjegal langkah-langkah saya. Melalui kekuasaannya, dilakukan tekanan-tekanan kepada para pendukung saya melalui dinas yang menaungi mereka sehingga memaksa mereka dan keluarganya untuk tidak memberikan suara pada saya.

Para pendukung saya menangis minta maaf tidak bisa memberikan suara pada saya, sambil menceritakan sikon yang dia hadapi. Di kemudian hari saat saya jelas tidak mendapatkan kursi, mereka sangat kecewa karena sebenarnya sangat membutuhkan program-program saya. Saya mendapat suara yang signifikan meski dijegal, namun belum cukup untuk mendapatkan 1 kursi.

AFIRMASI

Seperti sudah saya paparkan pada bab sebelumnya, afirmasi 30% diwajibkan dalam kepengurusan partai dan dalam pencalonan legislatif, tapi dengan sistem suara terbanyak tidak ada manfaatnya karena laki – laki dan perempuan harus berkompetisi dengan aturan yang sama untuk memperoleh suara rakyat (padahal suara rakyat perempuan belum tentu

Kiprah Perempuan Parlemen

memilih perempuan). Para perempuan parlemen yang mendapatkan kursi merupakan perempuan yang berjuang sederajat dengan kaum laki-laki, tidak ada hubungannya dengan afirmasi 30%. Afirmasi 30% hanya membuka peluang bagi kita para perempuan untuk bisa terdaftar sebagai caleg, selanjutnya tergantung usaha kita sendiri.

ASPIRASI

Saya berjuang meningkatkan kesejahteraan rakyat di dapil saya dengan mengucurkan aspirasi puluhan milyar dan terjun ke dapil setiap minggu. Di waktu yang sama, banyak anggota dewan yang sama sekali tidak menginjakkan kaki di dapilnya. Pernah saya bertanya mengapa tidak pernah terjun membangun dapil, jawabannya sungguh miris, “Kan suara mereka sudah saya beli.” Karena sudah dibeli, maka kondisi rakyat di dapil sudah tidak penting lagi.

Saya tidak mempunyai masa bakti sepanjang anggota dewan lain karena saya hanya Pengganti Antar Waktu. Kurang lebih 3 tahun saja saya mendharmabaktikan diri bagi bangsa Indonesia. Dalam waktu yang singkat tersebut, saya telah memaksimalkan tugas dan wewenang saya untuk kesejahteraan rakyat. Saya memang sengaja memfokuskan dapil saya untuk berbagai kegiatan dengan tujuan menjadikannya sebagai Pilot Project. Sebenarnya bisa saja kegiatan saya lakukan di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia karena saya mempunyai hak dan otoritas untuk itu, saya bisa memanfaatkannya sekaligus untuk jalan-jalan ke seluruh Indonesia. Namun saya tidak melakukannya. Saya fokus melakukannya di dapil saya. Saya ingin melihat sekaligus menunjukkan, bahwa kalau mau anggota dewan bisa memajukan dapilnya masing-masing.

Kiprah Perempuan Parlemen

Setelah saya tahu kalau saya kalah dalam Pemilu 2019, saya tetap berkeliling memberikan aneka bantuan. Saya tetap menjalankan aneka program. Saya tetap berkunjung ke dapil setiap minggu untuk menjalankan program. Hingga sebulan sebelum masa jabatan saya berakhir, yaitu saat buku ini disusun, saya masih berkunjung ke dapil saya meresmikan aneka sarana prasarana di sekolah-sekolah dan melakukan pengawasan pemberian beasiswa apakah sudah diberikan sesuai ketentuan. Kedatangan saya selalu disambut haru oleh para kepala sekolah dan guru di penghujung masa jabatan ini. Sebagian dari mereka menangis.

Saya juga terharu. Saya sedih tidak kehilangan banyak aspirasi yang seharusnya bisa saya berikan 5 tahun kedepan. Saya tidak bisa lagi memberikan puluhan ribu PIP untuk pelajar dari keluarga tidak mampu. Saya tidak bisa lagi membantu ribuan pelajar cerdas melalui program Bidikmisi (gratis 8 semester sampai lulus). Ribuan anak menangis karena saya tidak bisa membantu di periode yang akan datang. Beban moril tak terhingga sering membuat kami hanyut dalam suasana haru saat saya bertemu anak-anak Bidikmisi dan PPA. Ada kepala sekolah yang sudah langsung membuktikan. Biasanya saya bisa membantu 100 anak untuk satu sekolah, saat kepala sekolah mencoba mengajukan sendiri ternyata hanya mendapat maksimal 5 orang anak saja.

Setiap anggota dewan memiliki kesempatan yang sama seperti saya untuk mendayagunakan mitra kerja. Kementerian Pariwisata misalnya, saya telah menggandeng mereka untuk mengadakan Bimbingan Teknis sebanyak 7 – 8 kali setahun

Kiprah Perempuan Parlemen

dengan peserta yang betul-betul saya sortir. Saya tidak menginginkan peserta yang hanya ingin datang demi souvenir dan amplop semata namun tidak menyerap materi presentasi. Saya selalu menggarisbawahi dalam setiap sambutan yang saya sampaikan agar peserta melaksanakan visi misi acara.

Demikian pula dengan mitra kerja kementerian dan lembaga lain saya maksimalkan untuk *pilot project* di dapil saya. Jumlah teknisnya bisa dilihat pada Bab Komunikasi dengan Konstituen. Padahal masa jabatan saya lebih pendek dari anggota lain yang duduk sejak awal, namun demikian banyaknya aspirasi dan program nyata yang bisa saya sampaikan pada masyarakat. Saya bahkan bisa bertukar program dengan komisi lain, misalnya saat saya menurunkan traktor di area pertanian dapil saya yang sangat membutuhkan. Dari BPPT, saya juga bisa menurunkan mesin besar pengolah nanas untuk area Pematang. Saya membayangkan, apabila setiap anggota dewan melakukan yang saya lakukan maka Indonesia akan maju.

**Kekuatan utama seorang perempuan ada di dalam hatinya,
lalu tercermin lembut di setiap sikap dan langkahnya**

(Marlinda Irwanti)

Bab 7



Penutup

Sistem demokrasi dengan memilih secara langsung dianggap baik bagi sebagian kalangan namun berbiaya sangat mahal dan kadang membawa korban seperti saya. Amerika yang konon merupakan negara adidaya paling maju dan menjunjung tinggi HAM, tidak memakai sistem pilihan langsung. Mereka memakai sistem distrik. Indonesia perlu menimbang dan mengkomparasi baik-buruknya sistem distrik dibanding sistem langsung.

Salah satu penyebab banyaknya korupsi menurut saya adalah karena pemilihan langsung. Setiap selesai atau jelang pemilihan bupati / walikota atau gubernur biasanya ada yang tertangkap tangan. Mereka mencari dana yang besar untuk membiayai keperluan suara mereka. Kalau pra – pasca pemilihan selamat, setelah menjabat biasanya ada yang

Kiprah Perempuan Parlemen

tertangkap saat mengumpulkan dana untuk mengembalikan biaya kampanye. Sistem yang ada saat ini sulit mendapatkan pemimpin dengan kualitas terbaik yang berkompentensi tinggi karena ukurannya kemampuan finansial. Banyak calon yang sebenarnya cerdas, kualitas bagus, dan berkompentensi tinggi namun kalah dengan yang mempunyai uang banyak.

Sudah menjadi rumor yang mendarah daging bahwa di setiap pemilihan selalu ada amplop yang bertebaran. Para pejabat di legislatif maupun eksekutif yang menghalalkan segala cara tersebut akhirnya berpikir untuk mengembalikan dana besar yang dikeluarkan. Biasanya nada-nada lama seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme kemudian dijalankan. Apakah KPK dan semua penegak hukum hanya bertugas menunggu “operasi tangkap tangan” atukah bisa diadakan pencegahan?

Selama ini, penghargaan partai terhadap caleg yang belum berhasil dirasa kurang. Utamanya terhadap caleg yang suaranya signifikan. Partai tidak memikirkan bahwa caleg tersebut berapapun suaranya bisa memberikan 1 kursi di DPR kalau di-*support*.

Sistem-sistem perhitungan jumlah suara (ada berbagai sistem) terkadang menimbulkan korban suara hilang. Di suatu dapil ada yang berhasil mendapatkan kursi DPR karena suara partai banyak daripada suara caleg A. Sebaliknya, ada caleg B di dapil tertentu mendapatkan lebih banyak suara dibanding caleg A namun tidak jadi.

Kiprah Perempuan Parlemen

Sistem demokrasi di Indonesia belum mewadahi para *incumbent* anggota DPR RI yang bekerja keras menyampaikan aspirasi dibanding *incumbent* yang malas – malasan atau pendatang baru yang lebih lihai bermain *money politics* atau mempunyai akses ke pimpinan daerah. Di lain pihak, masyarakat juga masih harus terus mendapatkan pendidikan politik agar tidak mudah tergiur memberikan suaranya kepada siapapun pemberi amplop yang bahkan tidak peduli pada kondisi rakyat di dapilnya.

Masyarakat harus terus menerus diberikan pendidikan politik sehingga kedepan mereka akan berhati-hati apakah akan memberikan suara pada caleg aspiratif yang baik kinerjanya dan mau terjun kontinyu membangun dapil selama 5 tahun, atau memilih caleg pemberi amplop yang isinya habis untuk 1 – 2 kali makan saja. Dengan kata lain, pertanyaan besarnya adalah, akankah masyarakat memilih caleg aspiratif atau caleg yang melakukan *money politics*?

**Kenapa perempuan itu unik,
karena perpaduan antara keindahan dan kekuatan**

(Marlinda Irwanti)

Narasi Pemikiran Marlinda



Defisit Profesor di Indonesia

Kualitas pendidikan merupakan hal utama. Kemajuan di berbagai bidang sangatlah dipengaruhi oleh pengelolaan bidang pendidikan. Karenanya, salah satu fokus penguatan dan pemberdayaan yang harusnya menjadi prioritas pemerintah adalah pendidikan. Sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung dunia pendidikan harus senantiasa dikelola, diperkuat, dan diberdayakan. Termasuk di antaranya menjaga dan memperkuat eksistensi guru besar atau profesor di perguruan tinggi. Sudah lama kita mengalami defisit jumlah profesor jika dibandingkan dengan kebutuhan beragam program studi yang ada, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Kepastian Proses

Dalam rapat kerja Komisi X dengan Kementerian Ristek – Dikti pada Rabu, 20 April 2016, telah disepakati untuk menyelesaikan proses jabatan fungsional dosen lektor kepala dan guru besar yang menjadi tugas dan fungsi Kemenristek – Dikti adalah 45 hari kerja. Tentu, kesepakatan ini menjadi penting guna mendorong percepatan pengurusan guru besar yang sebelumnya sering panjang dan kerap tak pasti. DPR mendorong Kemenristek untuk memperkuat SOP (standard operating procedure) sehingga bisa menjamin kepastian baik waktu maupun prosedur baku pengurusannya.

Kiprah Perempuan Parlemen

Melihat data, saat ini dari 24.219 program studi yang tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, hanya ada sekitar 4.730 profesor (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi / PDDIKTI, 2016). Padahal, idealnya diperlukan minimal seorang profesor di setiap satu program studi perguruan tinggi. Data ini menunjukkan, kita masih defisit profesor, dan jarak antara seharusnya dan kenyataannya sangatlah jauh. Ironisnya, kekurangan profesor justru terjadi di bidang yang merupakan prioritas pembangunan, seperti pertanian, kedokteran, energi terbarukan, transportasi, pertahanan, dan keamanan, sistem komunikasi dan informasi serta bidang kemaritiman yang dampaknya bisa dirasakan dalam kehidupan sehari – hari.

Data lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2015 yang dirilis United Nations (UNDP) memosisikan Indonesia di peringkat 110 di dunia atau di posisi kelima di ASEAN. Hal ini menggambarkan bagaimana kondisi sumber daya manusia Indonesia saat ini. Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand masing-masing sudah menempati posisi 11,31, 62, dan 93. Kualitas pendidikan kita sudah seharusnya terus dipacu karena berkejaran dengan waktu dan kemajuan yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di kawasan. Kita tentu tak ingin lari tunggang langgang setiap saat mengejar beragam capaian negara-negara lain. Indonesia harus serius mengelola dunia pendidikan, termasuk yang sudah lama tak diperhatikan secara saksama adalah problem defisit profesor ini. Pemerintah wajib mengambil sejumlah langkah strategis baik dari sisi pengalokasian anggaran hingga melakukan debirokratisasi dalam pengurusan guru besar dan profesor.

Kiprah Perempuan Parlemen

Jika dianalisis, defisit profesor di perguruan tinggi ini disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, soal birokratisasi pengurusan guru besar. Sebelumnya seorang dosen rata-rata memerlukan waktu 2-6 tahun untuk mengurus jenjang kepangkatan akademik menjadi guru besar. Hal tersebut membuat sejumlah dosen menjadi malas mengurus proses yang panjang dan lama tersebut.

Dampaknya laju pertumbuhan dosen-dosen yang sudah bergelar S-3 atau doktor menjadi profesor tersendat dan jalan di tempat. Proses ini berujung pada minimnya jumlah profesor di perguruan tinggi. *Kedua*, beban kewajiban publikasi di jurnal internasional bereputasi yang kerap membuat lambatnya pengurusan guru besar tersebut. Kewajiban memublikasikan hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi ini kerap menjadi hambatan bagi sejumlah dosen yang ingin menjadi guru besar atau profesor.

Di satu sisi, kewajiban ini bagus karena mendorong para dosen untuk aktif dan produktif memublikasikan karya-karyanya di jurnal yang diakses secara internasional. Dengan begitu, selain memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dunia dengan konteks Indonesia, hasil penelitian mereka juga dapat meningkatkan jumlah publikasi Indonesia di kancah internasional.

Kiprah Perempuan Parlemen

Di sisi lain, ketentuan publikasi di jurnal internasional terindeks seperti Scopus juga bukan perkara mudah. Ada aspek ekonomi yang juga harus dibaca sebagai problem bawaan dari banyaknya para pemburu jurnal internasional yang terindeks tersebut. Proses yang lama dan antrean para penulis membuat banyak yang tak sabar dan tak sedikit pula yang akhirnya mengambil cara pintas dan cenderung pragmatis. Misalnya, memublikasikan karya di jurnal internasional “predator” atau membayar mahal tulisan yang akan diterbitkan di salah satu jurnal internasional. Mereka yang tak memiliki uang, atau segan membayar, biasanya tak termotivasi untuk memublikasikan karya dan hasil penelitian mereka. Defisit profesor pun nyata adanya.

Debirokratisasi Pengurusan

Perlu upaya mengatasi hambatan birokrasi. Dalam konteks itulah Kemenristek – Dikti dan Komisi X DPR sepakat untuk memangkas sejumlah aturan administrasi pengurusan gurubesar menjadi hanya 45 hari kerja saja. Secara prosedural maupun substansial, pemangkasan waktu pengurusan tersebut dijamin tak akan mengurangi kualitas gosok guru besar atau profesor yang dilahirkan. Proses pemangkasan dan langkah debirokratisasi hanya pada hal-hal yang sifatnya administratif, sementara hal yang sifatnya substantif tetap dijaga kualitasnya. Misalnya syarat guru besar harus sudah menjadi dosen minimal 10 tahun, sudah memenuhi jumlah kum atau angka kredit minimal 850, sudah pernah memublikasikan hasil penelitian di jurnal internasional yang bereputasi sebagai penulis utama. Hal-hal substansial tersebut tetap harus dipenuhi oleh para calon profesor.

Kiprah Perempuan Parlemen

Perlu adanya sinergi komunikasi yang baik antara Kemenristek - Dikti dan para calon profesor. Jangan sampai birokrasi mereduksi pesan dan harapan. Meminjam teori Janet Beaving Bavelas (1990), birokrasi kerap melangsungkan komunikasi *equivocal*. Maksudnya, dalam berkomunikasi pesan-pesan sering secara sengaja dibuat tidak jelas, tidak langsung dan tidak berterus terang. Dalam proses pengurusan guru besar yang panjang dan tak pasti birokrasinya, banyak calon guru besar yang akhirnya frustrasi. Hal ini tak boleh terjadi lagi. Jika bisa dipermudah kenapa harus dipersulit?

Kiprah Perempuan Parlemen



Lensa Harian

Sabtu, 31 Agustus 2019

**Marlinda: Apresiasi Langkah Presiden
Dalam Membentuk Badan Riset dan Meningkatkan Anggaran Riset
Sebuah “Lompatan Besar” Pak Jokowi Untuk Mensejahterakan Rakyat**

Lensaharian.com, Jakarta – Anggota Komisi X DPR, DR. Marlinda Irwanti dari politisi Golkar mengapresiasi dan berterimakasih pada Presiden tentang surpres UU Sisnas-Iptek, sehingga telah keluar UU No. 11 Tahun 2019. Menurutnya, dengan UU ini maka pak Jokowi dapat melakukan “lompatan besar” dengan menjadikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai landasan dan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (*Science based Policy*).

Selain itu, UU Sisnas- Iptek ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman,” kata Marlinda, kepada harianperistiwa, di Jakarta, Jumat (30/8). Dalam memenuhi kontribusi Iptek dalam pembangunan Nasional dan memenuhi hak asasi setiap orang dalam memperoleh manfaat Ilmu pengetahuan dan Teknologi, maka perlu diatur mengenai sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pembangunan

Kiprah Perempuan Parlemen

agar mampu memperkuat daya dukung Iptek dalam rangka mencapai tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, tujuan Sisnas- Iptek adalah sebagai berikut :

- A. Memajukan dan meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi.
- B. Meningkatkan Pemanfaatan IPTEK untuk pembangunan berkelanjutan, menjadi dasar pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat, memajukan peradaban, menjaga kelestarian, dan melindungi segenap bangsa Indonesia.

Selain itu, Marlinda berharap UU Sisnas Iptek ini bisa menjadi landasan pembangunan (*Sains based Policy*) dan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan Pembangunan Nasional baik jangka Panjang, jangka Menengah dan Tahunan. Oleh karenanya, untuk mewujudkan tujuan tersebut disusun Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Penyelenggara Iptek dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, badan usaha , lembaga pemerintah, atau swasta dan perguruan tinggi.

Dalam UU ini diatur soal hak atas royalti dari komersialisasi Kekayaan Intelektual, ahli teknologi, dan di dalam pasal-pasalnya diatur pula Intermediasi teknologi untuk mendorong implementasi hasil inovasi dari lembaga penghasil

Kiprah Perempuan Parlemen

Teknologi kepada calon pengguna, dapat berupa temu bisnis Teknologi, kemitraan dan atau promosi hasil invensi (Pasal 31).

Pemerintah wajib memfasilitasi perlindungan kekayaan intelektual (Pasal 35). Pemerintah Pusat dan Daerah wajib mengembangkan invensi dan inovasi (Pasal 34). Pemerintah Pusat dan daerah wajib menggunakan hasil invensi dan inovasi nasional (Pasal 36). Pemerintah pusat wajib menjamin pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan dalam bentuk Invensi dan Inovasi untuk Pembangunan Nasional (Pasal 37).

Badan Usaha yg menghasilkan Invensi dan Inovasi Nasional diberi Insentif (Pasal 38) , seperti :

A. Jaminan pembelian produk inovasi .

B. Jaminan pencantuman naman produk inovasi dalam katalog elektronik pengadaan barang / jasa pemerintah.

Menurut Marlinda, salah satu faktor penting dalam UU ini telah diamanatkan untuk menjalankan Penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yg terintegrasi dibentuk BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL. Badan ini dibentuk oleh Presiden.

Badan ini sangat penting agar Litbang yang saat ini tersebar di beberapa kementerian dapat terintegrasi program kegiatan Riset dan Anggarannya, sehingga yang diharapkan pak Jokowi bahwa anggaran riset selama ini cukup besar kurang lebih

Kiprah Perempuan Parlemen

24 triliun tidak efektif karena selama ini Kemenristekdikti tidak dapat melakukan koordinasi dan integrasi program di litbang yang ada di kementerian lain.

“Inilah salah satu indikator permasalahan mendasar, mengapa hasil riset belum dapat mensejahterakan rakyat Indonesia,” ungkapnya. Oleh karena itu, agar iptek dapat mensejahterakan rakyat dan hasil-hasil riset dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, maka Badan Riset dan Inovasi dapat segera dibentuk untuk mengejar ketertinggalan kita dan untuk pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Adapun pendanaan penyelenggaraan IPTEK, selain dari APBN bisa menggunakan APBD, Dana Abadi Penelitian, Badan Usaha, dan sumber lain yang tidak mengikat (Pasal 59). Badan Usaha yang mengalokasikan dananya untuk iptek, akan diberikan insentif (Pasal 64). Misalnya bisa berupa pengurangan pajak (sesuai peraturan perundang-undangan).

Semoga UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi segera dilaksanakan oleh Presiden Jokowi dan Badan Riset segera dibentuk agar pelaksanaan UU ini ada Badan yang melakukan Integrasi program dan dana. Marlinda meyakini, bahwa Ilmu Pengetahuan dapat mensejahterakan rakyat Indonesia dan UU Sisnas IPTEK dapat menjadi kekuatan bangsa Indonesia.



Lensa Harian

Sabtu, 31 Agustus 2019

Marlinda Mendukung Langkah Jokowi Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul, Indonesia Maju

Lensaharian.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo menaikkan anggaran pendidikan, untuk meningkatkan SDM, sebesar Rp 505,8 triliun untuk pendidikan pada tahun 2020, meningkat 29,6 persen. Anggota Komisi X DPR RI, DR. Marlinda Irwanti memberikan apresiasi dan mendukung penuh langkah yang diambil Presiden Jokowi Widodo.

la menilai, peningkatan anggaran yang dilakukan pak Jokowi sebagai wujud nyata pasal 31 UUD 1945 bahwa "Setiap WNI berhak mendapatkan pengajaran," ujarnya. Manusia adalah pangkal atau ujung dari Pembangunan dan Pendidikan akan menjadikan manusia Indonesia mempunyai jiwa merdeka, meningkatkan kreatifitas, ide, gagasan, sehingga kita mampu menciptakan generasi yang mampu berdiri sendiri.

la melihat, Indonesia mampu meningkatkan IPM, indikator makro dari UNDP, tentang bagaimana menakar Pembangunan Manusia. Apalagi Indonesia saat ini HDI/IOM masuk pada ukuran menengah dunia, diperlukan kebijakan, *good will* dari

Kiprah Perempuan Parlemen

pemerintah, khususnya presiden, untuk mengambil kebijakan tentang gizi buruk, stunting, perbaikan pendidikan baik menengah maupun tinggi.

Kebijakan yang dilakukan presiden Jokowi harus kita dukung, dengan anggaran yang ditingkatkan perlu *road map* atau peta jalan pendidikan Indonesia sampai 2024. Bagaimana menjadikan Iptek / ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi dasar pembangunan dalam mengambil kebijakan.

Presiden sudah menandatangani supres UU No 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, menjadikan UU ini "lompatan besar" seperti yang dicita-citakan Presiden Jokowi, bagaimana menjadikan riset/penelitian sebagai kekuatan untuk mensejahterakan rakyat, mencetak Insinyur muda (karena Indonesia defisit Insinyur).

Selain itu, cetak biru, *road map* atau peta jalan harus juga dipersiapkan kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia, karena bonus demografi kita cukup tinggi 2020- 2030. Penduduk produktif mencapai kurang lebih 52% dan dapat kita manfaatkan dengan baik apabila cetak biru manusia Indonesia disiapkan dan menjadilompatan besar bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan besar di Asia.\

Kiprah Perempuan Parlemen

Menurut Marlinda, manusia adalah akar dari segala hal dengan melihat bagaimana China dengan penduduk yang sangat besar mampu memanfaatkan manusianya untuk kekuatan pembangunan negara tersebut. Marlinda meyakini, dalam APBN 2020 DPR sepakat untuk memangkas belanja barang untuk meningkatkan pembangunan manusia.

Dengan membuat cetak biru yang terprogram dan tersistem, maka tingkat kemiskinan akan menurun, pengangguran terbuka akan teratasi, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila ke-5) Pancasila akan terwujud. Mari kita bangun manusia Indonesia dengan sepenuh hati," kata politisi Golkar itu.

Kiprah Perempuan Parlemen



Harian Peristiwa
Sabtu, 31 Agustus 2019

Membentuk Badan Riset dan Meningkatkan Anggaran Riset Sebuah “Lompatan Besar” Pak Jokowi Untuk Mensejahterakan Rakyat

Jakarta, harianperistiwa.com – Anggota Komisi X DPR, DR. Marlinda Irwanti sebagai politisi Golkar mengapresiasi dan berterimakasih pada Presiden bahwa dengan adanya surpres UU Sisnas-Iptek, telah keluar yaitu UU no 11 tahun 2019. Dengan UU ini maka pak Jokowi dapat melakukan “lompatan besar” dengan menjadikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai landasan dan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (*Science based Policy*).

Selain itu, UU Sisnas- Iptek ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman,” kata Marlinda, kepada harianperistiwa, di Jakarta, Jumat (30/8). Dalam memenuhi kontribusi Iptek dalam pembangunan Nasional dan memenuhi hak asasi setiap orang dalam memperoleh manfaat Ilmu pengetahuan dan Teknologi maka perlu diatur sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pembangunan agar mampu memperkuat daya dukung Iptek dalam rangka mencapai tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa,” ujarnya.

Kiprah Perempuan Parlemen

Ia mengungkapkan, tujuan Sisnas- Iptek adalah sebagai berikut : A. memajukan dan meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi. dan B. Meningkatkan Pemanfaatan IPTEK untuk pembangunan berkelanjutan, menjadi dasar pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat, memajukan peradaban, menjaga kelestarian dan melindungi segenap bangsa Indonesia.

Marlinda berharap UU Sisnas Iptek ini bisa menjadi landasan pembangunan (*Sains based Policy*) dan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan Pembangunan Nasional baik jangka Panjang, jangka Menengah dan Tahunan. Oleh karenanya, untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu disusun Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Penyelenggara Iptek dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, badan usaha, lembaga pemerintah, atau swasta dan perguruan tinggi.

Dalam UU ini diatur soal hak atas royalti dari komersialisasi Kekayaan Intelektual, ahli teknologi dan di dalam pasal-pasalnya diatur pula Intermediasi Teknologi untuk mendorong implementasi hasil inovasi dari lembaga penghasil Teknologi kepada calon pengguna, dapat berupa temu bisnis Teknologi, kemitraan dan atau promosi hasil inovasi (Pasal 31).

Kiprah Perempuan Parlemen

Pemerintah wajib memfasilitasi perlindungan kekayaan intelektual (Pasal 35). Pemerintah Pusat dan Daerah wajib mengembangkan invensi dan inovasi (Pasal 34). Pemerintah Pusat dan daerah wajib menggunakan hasil invenai dan inovasi nasional (Pasal 36). Pemerintah pusat wajib menjamin pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan dalam bentuk Invensi dan Inovasi untuk Pembangunan Nasional (Pasal 37). Badan Usaha yg menghasilkan Invensi dan Inovasi Nasional diberi Insentif (Pasal 38), seperti A. Jaminan pembelian produk inovasi. B. Jaminan pencantuman nama produk inovasi dalam katalog elektronik pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Menurut Marlinda, salah satu faktor penting dalam UU ini telah diamanatkan untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yg terintegrasi dibentuk BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL. Badan ini dibentuk oleh Presiden.

Badan ini sangat penting agar Litbang yang saat ini tersebar di beberapa kementerian dapat terintegrasi program kegiatan Riset dan Anggarannya sehingga yang diharapkan pak Jokowi bahwa anggaran riset selama ini cukup besar kurang lebih 24 triliun, tidak efektif karena selama ini Kemenristekdikti tidak dapat melakukan koordinasi dan integrasi program di litbang yang ada di kementerian lain.

“Inilah salah satu indikator permasalahan mendasar, mengapa hasil riset belum dapat mensejahterakan rakyat Indonesia,” ungkapnya. Oleh karena itu, agar Iptek dapat mensejahterakan rakyat dan hasil-hasil riset dapat

Kiprah Perempuan Parlemen

dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat maka Badan Riset dan Inovasi dapat segera dibentuk untuk mengejar ketertinggalan kita dan untuk pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Adapun pendanaan penyelenggaraan IPTEK, selain dari APBN, APBD, Dana abadi Penelitian, Badan Usaha, dan sumber lain yang tidak mengikat (Pasal 59).

Badan Usaha yang mengalokasikan dananya untuk Iptek, akan diberikan insentif (Pasal 64), dapat berupa pengurangan pajak (sesuai peraturan perundang-undangan). Semoga UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi segera dilaksanakan oleh Presiden Jokowi dan Badan Riset segera dibentuk agar pelaksanaan UU ini ada Badan yang melakukan integrasi program dan dana. Marlinda meyakini bahwa Ilmu Pengetahuan dapat mensejahterakan rakyat Indonesia dan UU Sisnas IPTEK dapat menjadi kekuatan bangsa Indonesia.



Harian Peristiwa
Minggu, 28 Juli 2019

**UU SISNAS - IPTEK Harus Dijadikan Landasan dan Satu Kesatuan
Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (*Sains based Policy*)**

Jakarta, harianperistiwa.com – Dalam memenuhi kontribusi Iptek dalam pembangunan Nasional dan memenuhi hak asasi setiap orang dalam memperoleh manfaat Ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu diatur mengenai sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pembangunan agar mampu memperkuat daya dukung Iptek dalam rangka mencapai tujuan negara , serta meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa .

Wakil Pimpinan Pansus SISNAS – IPTEK DR. Marlinda Irwanti mengapresiasi atas disahkannya UU Sisnas – Iptek ini melalui sidang Paripurna pada tanggal 16 Juli 2019 lalu.

Menurut Marlinda, UU Sisnas – Iptek ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman sehingga bisa menyempurnakan dan mengharmonisasikan UU nomor 18 tahun 2002,” kata Marlinda, kepada harianperistiwa, Minggu (28/7).

Kiprah Perempuan Parlemen

Adapun tujuannya adalah untuk memajukan dan meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan serta teknologi yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi.

Juga meningkatkan Pemanfaatan IPTEK untuk pembangunan berkelanjutan, menjadi dasar pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat, memajukan peradaban, menjaga kelestarian dan melindungi segenap Bangsa Indonesia,” ujarnya.

Marlinda berharap UU Sains dan Teknologi ini bisa menjadi landasan pembangunan (*Sains based Policy*)



Kiprah Perempuan Parlemen

dan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan Pembangunan Nasional, baik jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, disusunlah Rencana I untuk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Penyelenggara Iptek dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, badan usaha, lembaga pemerintah atau swasta dan perguruan tinggi.

Dalam UU ini diatur soal hak atas royalti dari komersialisasi Kekayaan Intelektual, ahli teknologi dan di dalam pasal-pasalnya diatur pula Intermediasi teknologi untuk mendorong implementasi hasil invensi dari lembaga penghasil teknologi kepada calon pengguna, dapat berupa temu bisnis teknologi, kemitraan atau promosi hasil invensi (pasal 31). Selain itu, pemerintah juga wajib memfasilitasi perlindungan kekayaan intelektual (pasal 35). Pemerintah Pusat dan Daerah wajib mengembangkan invensi dan inovasi (pasal 34). Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menggunakan hasil invensi dan inovasi nasional (pasal 36).

Pemerintah pusat wajib menjamin pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan dalam bentuk Invensi dan Inovasi untuk Pembangunan Nasional (pasal 37). Badan Usaha yang menghasilkan Invensi dan Inovasi Nasional diberi Insentif (pasal 38), seperti A. Jaminan pembelian produk inovasi. B. Jaminan pencantuman produk inovasi dalam katalog elektronik pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Kiprah Perempuan Parlemen

Dalam UU ini juga diatur mengenai Etika (pasal 39). Wajib Serah dan Wajib Simpan (pasal 40). Untuk menjalankan Penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional.

Badan ini dibentuk oleh Presiden. Dalam UU ini diatur usia pensiun 70 tahun bagi jenjang jabatan fungsional ahli utama dan dapat diperpanjang apabila masih bersedia, kompetensi keilmuannya masih dibutuhkan, sehat jasmani, dan rohani (pasal 53).

Sumber daya iptek diberikan perlindungan jaminan sosial dan bantuan hukum (pasal 57). Pendanaan penyelenggaraan IPTEK selain dari APBN bisa menggunakan APBD, Dana abadi Penelitian, Badan Usaha, dan sumber lain yang tidak mengikat (pasal 59).

Badan Usaha yang mengalokasikan dananya untuk iptek akan diberikan insentif (pasal 64), dapat berupa pengurangan pajak (sesuai peraturan perundang-undangan). Dalam UU ini juga diatur sanksi, baik Administratif (pasal 91) berupa peringatan tertulis, penghentian pembinaan, denda administratif, pencabutan izin, dan pencantuman para pelanggar dalam daftar hitam (pasal 91).

Kiprah Perempuan Parlemen

Bagi orang asing yang melakukan pelanggaran tanpa izin maka dapat dipidana paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 4 miliar serta larangan memperoleh izin penelitian di wilayah Indonesia paling lama 5 tahun (pasal 93). Bagi orang yang tanpa hak dan secara melawan hukum mengalihkan spesimen lokal Indonesia ke luar negeri baik fisik maupun digital tanpa dilengkapi perjanjian pengalihan material dapat dipidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 2 miliar dan larangan memperoleh izin penelitian (pasal 94). Penelitian yang beresiko tinggi dan berbahaya diatur sanksinya dalam pasal 95 sedangkan untuk badan usaha dalam pasal 96.

Semoga UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi segera dilaksanakan oleh Presiden Jokowi agar Ilmu Pengetahuan menjadi landasan Kebijakan Pembangunan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Kiprah Perempuan Parlemen



Berdayakan Rektor Lokal Untuk Tingkatkan Kapasitas PT

19 04 2019 / 14:58:18



Azzoda Ramli (DPR RI) Memberi Penyuluhan Kepada Masyarakat

Berdayakan Rektor Lokal Untuk Tingkatkan Kapasitas PT

Para rektor lokal yang memimpin di sejumlah perguruan tinggi (PT) Tanah Air sebaiknya kembali diberdayakan untuk meningkatkan kapasitas kampus agar masuk kelas dunia. Saat ini, baru tiga PT di Indonesia yang masuk peringkat dunia, yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Pemberdayaan para rektor lokal lebih populis daripada harus mengimpor rektor asing.

Anggota Komisi X DPR RI Marlinda Poernomo saat dimintai komentarnya lewat saluran *Whatsapp* soal polemik impor rektor asing itu kepada Parlementaria, Jumat (9/8/2019) mengatakan, sejauh ini Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) belum berkomunikasi dengan Komisi X DPR RI soal impor rektor asing. Tak ada notulensi atau catatan persetujuan dari Komisi X RI.

“Kalau kebijakan mengimpor rektor asing hanya untuk mencapai target 2024 menjadi 5 perguruan tinggi, mengapa kita tidak membuat *mapping* sendiri dan memberdayakan rektor-rektor Indonesia yang sudah mampu perguruan tingginya

Kiprah Perempuan Parlemen

masuk peringkat dunia, diberikan penghargaan dan kesempatan bagi para rektor tersebut dengan anggaran yang memadai untuk melakukan *assessment* dan memberdayakan perguruan tinggi yang ditargetkan pemerintah,” ulasnya.

Menurut politisi Partai Golkar itu, Indonesia mampu meningkatkan kapasitas PT dengan melakukan evaluasi sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berbadan hukum dan dibebani target menjadi world class university. Pemerintah harus melihat apakah anggaran dan fasilitas sarpras standar internasionalnya selama ini sudah terpenuhi atau belum. Bukan justru dengan menempatkan rektor asing di PT dalam negeri. Ini bukan hanya persoalan individu rektor.

“Kita punya rektor di Indonesia yang berprestasi dan mampu PTN-nya masuk peringkat dunia. Mengapa tidak kita hargai dan kita manfaatkan dengan baik? Bila indikator program dalam renstra belum tercapai, kita evaluasi bersama mengapa jumlah perguruan tinggi yang masuk peringkat dunia tidak beranjak dari 3 PT? Tetapi jalan keluarnya tidak harus mencari rektor asing. Kita berdayakan potensi para rektor Indonesia yang telah mampu mencapai target peringkat dunia,” tandasnya.

Legislator dapil Jawa Tengah X ini memaparkan, akar masalah yang menghambat pencapaian peringkat dunia PTN di Indonesia salah satunya adalah dilema birokratisasi. Dalam UU Dikti sudah ada otonomi akademik PTN. Tetapi PTN masih banyak dibebani dengan aturan-aturan yang menghambat inovasi dan keberanian untuk melakukan reformasi. “Di PTN

Kiprah Perempuan Parlemen

politicking sangat kental dalam pemilihan rektor, dekan, dan lain-lain. Idealnya tidak melihat dari merit system,” tandasnya.

Akar masalah lainnya adalah soal anggaran dan pendapatan PTN-BH yang diharapkan mampu generate income lewat kerja sama industri. Pada kenyataannya masih banyak generate income dari SPP mahasiswa. Porsi terbesar income masih dari mahasiswa. Selain itu, PTN-BH belum mampu mengembangkan bisnis. Baru UI yang berhasil merekrut tenaga profesional non dosen untuk mengembangkan usaha.

Masih ada akar masalah yang membelit, yaitu pendapatan dosen rendah dan standar PT belum maksimal. “Menurut saya, buat road map yang jelas untuk 5 tahun ke depan, berapa PT yang ditargetkan dan didukung anggaran serta kebijakan. Insya Allah Indonesia mampu memperdayakan kekuatan bangsa sendiri. Bukan karena anti-asing, tapi rektor bukan satu-satunya komponen untuk meningkatkan peringkat dunia,” tutup Marlinda.

GOLKARPEDIA

BERITA | OPINION | KALAM BUNDA | KALAM BUNDA | KALAM BUNDA | KALAM BUNDA | KALAM BUNDA | KALAM BUNDA | KALAM BUNDA

Marlinda Irwanti Ingin UU Sisnas Iptek Jadi Landasan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

19/06/2019



Baca Juga: Marlinda Irwanti Apresiasi Langkah Pemerintah Dorong Sekolah Sekolah Dasar Pukung Kerja

Anggota Komisi IX DPR RI (DPR) dan Wakil Ketua Komisi IX DPR Sisnas Iptek Marlinda Irwanti mengatakan bahwa UU Sisnas Iptek adalah landasan sistem perencanaan pembangunan nasional yang akan menjadi landasan bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional.

"Marlinda Irwanti mengatakan bahwa UU Sisnas Iptek

adalah landasan sistem perencanaan pembangunan nasional yang akan menjadi landasan bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Berita Gelar - DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Nasional (RUU) Perencanaan Sistem Teknologi (RUU Sisnas Iptek) menjadi Undang-Undang melalui rapat paripurna DPR pada 14 Juni 2019.

UU tersebut akan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang akan menjadi landasan bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Artikel Lainnya



Drk. Saiful Huda - Ketua Komisi XI DPR RI
Komisi XI DPR RI



Titik Nita - Ketua Komisi XI DPR RI
Komisi XI DPR RI



Yusuf Hidayat - Ketua Komisi XI DPR RI
Komisi XI DPR RI



Dr. H. Hidayat - Ketua Komisi XI DPR RI
Komisi XI DPR RI



Dr. Hidayat - Ketua Komisi XI DPR RI
Komisi XI DPR RI



Dr. Hidayat - Ketua Komisi XI DPR RI
Komisi XI DPR RI

Golkar Pedia
Selasa, 30 Juli 2019

**Marlinda Irwanti Ingin UU Sisnas Iptek
Jadi Landasan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

Berita Golkar - DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sisnas Iptek) menjadi Undang-Undang melalui rapat paripurna DPR pada 16 Juli lalu. UU tersebut menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman sehingga menyempurnakan dan mengharmoniskan UU No. 18 Tahun 2002.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Golkar, Marlinda Irwanti, mengatakan UU Sisnas Iptek menjadi landasan dalam perumusan kebijakan pembangunan agar mampu memperkuat daya dukung Iptek dalam rangka mencapai tujuan negara.

Marlinda menjelaskan ada dua tujuan dari UU Sisnas Iptek. Pertama, memajukan dan meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi. Kedua, meningkatkan pemanfaatan Iptek untuk pembangunan berkelanjutan, menjadi dasar pembangunan

Kiprah Perempuan Parlemen

untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat, memajukan peradaban, menjaga kelestarian dan melindungi segenap bangsa Indonesia.

"Diharapkan UU Sisnas Iptek ini menjadi landasan pembangunan (*Sains based Policy*) dan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan Pembangunan Nasional, baik jangka panjang, jangka menengah dan tahunan," katanya kepada wartawan, Selasa (30/7/2019).

Dalam undang-undang ini, diatur penyelenggaraan Iptek yang dapat dilakukan perseorangan, kelompok, badan usaha, lembaga pemerintah atau swasta dan perguruan tinggi. Satu di antaranya yakni pemerintah pusat wajib menjamin pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan dalam bentuk invensi dan inovasi untuk pembangunan nasional.

"Semoga UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi segera dilaksanakan oleh Presiden Jokowi agar Ilmu Pengetahuan menjadi landasan Kebijakan Pembangunan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia," kata Wakil Pimpinan Pansus Sisnas Iptek ini. *[tribunnews]*



Merdeka.com
Kamis, 18 Juli 2019

Tanpa Airlangga, Empat Kader Golkar Deklarasi Maju Munas 2019

Merdeka.com - Tiga politisi Partai Golkar turut mendeklarasikan diri bersama Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo sebagai calon ketua umum untuk bertarung di Musyawarah Nasional (Munas). Tiga politisi tersebut adalah Ketua Umum Satkar Ulama Golkar Ali Yahya, Dewan Pembina KPPG Ula Nurachwati, dan politikus perempuan Marlinda Irwanti.

Sedianya dalam deklarasi hari ini hadir Ketua DPP Golkar Indra Bambang Utoyo dan Ketua DPP Golkar Ridwan Hisjam sampai petahana Ketua Umum Airlangga Hartarto. Namun sampai deklarasi ketua umum dibacakan ketiganya tidak terlihat hadir.

Sebagai pemimpin ormas, Ali Yahya mengatakan, memiliki suara di Munas berbeda dengan calon lainnya seperti Bamsuet, Indra Utoyo dan Ridwan. Sehingga, dia merasa pantas untuk deklarasi sebagai calon ketua umum Golkar. Dia mengaku memiliki visi untuk membangun perubahan di Golkar. Dalam deklarasi ini Ali berharap, Munas segera dilaksanakan pada bulan September sesuai dengan masa akhir siklus lima tahunan partai. "Saya siap maju untuk menjadi

Kiprah Perempuan Parlemen

salah satu Caketum Golkar. Kita harapkan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih," kata Ali di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (18/7).

Sementara calon lainnya, Marlinda membawa visi supaya Golkar menjadi pemenang Pemilu 2024. Sementara, Ula hanya menyatakan siap untuk maju sebagai calon ketua umum. "Saya akan menjalankan organisasi sesuai AD/ART organisasi. Terima kasih mudah-mudahan saya bisa mendapatkan dukungan penuh para pengurus DPD I dan II dan hasta karya," kata Marlinda.

Usai deklarasi, empat calon ketum yang berlaga dalam Munas 2019 menandatangani surat kesepakatan bersama. Surat dibacakan oleh kader milenial Golkar bernama Novel Saleh. Berikut isi surat kesepakatan deklarasi :

1. Partai Golkar harus menjadi rumah besar bagi Ormas yang mendirikan dan didirikan, serta keluarga besar TNI dan ulama.
2. Meminta untuk segera diadakan Rapat Pleno, Rapimnas, menuju Munas pada akhir Agustus atau awal September 2019 sesuai dengan AD/ART.
3. Partai Golkar sebagai salah satu anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang diharapkan menjadi andalan pemerintah kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin, sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa bakti 2019-2024, perlu secepatnya melakukan konsolidasi internal kepemimpinan di tingkat pusat sesuai ketentuan ADART Partai Golkar sebelum Presiden dan Wakil Presiden dilantik secara resmi.

Kiprah Perempuan Parlemen

4. Penyelenggaraan Munas harus mencerminkan semangat demokrasi, kompetisi yang sehat sehingga tidak boleh ada perpecahan dan kegaduhan, termasuk pemecatan.
5. Jika menjadi Ketua Umum, akan merangkul semua pihak termasuk tim pesaing, karena Partai Golkar adalah rumah besar bagi semua stakeholder.
6. Menciptakan Partai Golkar sebagai tempat yang nyaman bagi generasi milenial serta mendorong terciptanya regenerasi secara sistematis dan keberlanjutan.

Kiprah Perempuan Parlemen



Harian Peristiwa
Kamis, 27 Juni 2019

Marlinda: Kebijakan PPDB III Jalur Menyisakan Masalah, Harus Ada Evaluasi

Jakarta, harianperistiwa.com – Sejak diimplementasikan kebijakan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), Nomor 51 tahun 2017 telah menuai berbagai masalah ditengah-tengah masyarakat. Meskipun kebijakan PPDB tersebut untuk menjamin Penerimaan Peserta Didik Baru tidak diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, namun pada kenyataannya permasalahan PPDB dari tahun ke tahun selalu menyisakan masalah, terutama pada sekolah dan masyarakat yang tinggal diperkotaan.

Menurut Anggota DPR RI, Komisi X, Dr. Marlinda, PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur dengan prosentase quota, yakni : zonasi (quota 90%), prestasi (quota 5%), dan perpindahan orang tua peserta didik (quota 5%). Sistem Zonasi masih jadi kebijakan yang sensitif dan terus muncul pada setiap pelaksanaan PPDB dan tahun 2019 menjadi resistensi yang sangat tinggi di masyarakat.

Permasalahan mendasar PPDB adalah kebijakan yang bagus, tetapi pelaksanaannya dan sosialisasinya harus masif dan belum bisa diberlakukan sama bagi semua daerah di Indonesia yang belum dapat melaksanakan PPDB secara optimal.

Kiprah Perempuan Parlemen

Selain itu, permasalahan lain terkait zonasi berbasis jarak rumah dan nilai UN yang menggunakan sistem online (*daring*), menemukan masalah dalam sistem IT yang digunakan.

Dalam kebijakan tersebut juga ditemukan dengan sistem PPDB yang menggunakan jarak rumah sebagai pertimbangan belum memenuhi rasa keadilan karena ternyata ada anak yang tidak diterima disekolah yang dekat dengan rumahnya, sedangkan anak lain yang jarak jauh diterima di sekolah tersebut,” ujar Marlinda, melalui selulernya, kepada harianperistiwa, Kamis, 27 Juni 2019.

Meskipun pemerintah mempunyai niat baik dengan sistem PPDB dan kebijakan ini sudah tiga kali perbaikan dan pemerintah mengeluarkan SE Mendikbud nomor 3 tahun 2019 yang memberikan pengecualian kepada daerah yang belum dapat melaksanakan PPDB secara optimal, Marlinda berpendapat bahwa ada 6 solusi yang harus diperhatikan yakni :

1. Sistem PPDB ini dapat dilaksanakan dengan *platform Adaptif-Aspirasi*, dapat disesuaikan oleh pemda masing-masing melakukan formulasi dan penyesuaian dalam pelaksanaan PPDB.
2. Design distribusi akses disempurnakan (harus ada baseline data daya tampung sekolah).
3. Peta demografi juga harus menjadi ukuran.
4. Sarana Prasarana juga harus diperbaiki.
5. Pembangunan sekolah- sekolah juga menggunakan sistem zonasi /pemetaan jumlah sekolah.

Kiprah Perempuan Parlemen

6. Persiapan para guru sangat penting dalam sistem PPDB karena kompetensi murid sangat heterogen / pemetaan Guru

Yang paling penting adalah sosialisasi secara masif dan kesiapan Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan modifikasi. Akselerasi disesuaikan wilayah masing-masing sehingga cita-cita dan tujuan pendidikan di Indonesia agar anak Indonesia bisa cerdas bisa memperoleh pendidikan yang layak.

Kiprah Perempuan Parlemen



The screenshot shows the official website of the Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Indonesian House of Representatives). The header includes the national emblem and the text "DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA". A navigation bar contains links for "BERITA", "AGENDA", "LEGISLASI", "RRI", "DIRJEN ANGGARAN", "ALAT KELENGKAPAN", and "TENTANG DPR".

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Memberatkan Perguruan Tinggi

17-07-2017 / KOMNASK

Revisi lebih lanjut mengenai regulasi tinggi akan dibahas di Indonesia dalam rapat dengan peserta utama Page 33 Dikti, Menteri Dikti, dan Kepala lembaga dan lembaga yang terkait dengan regulasi.

Anggota Komisi X DPR RI Marissa (swara) sedang berbicara kepada para undangan lembaga pemerintah yang berkaitan dengan regulasi pendidikan yang berkaitan dengan regulasi pendidikan.



SHARE

- Facebook
- Twitter
- WhatsApp

Kiprah Perempuan Parlemen

Parlementaria
Rabu, 17 Juli 2019

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Memberatkan Perguruan Tinggi

Kehadiran beberapa Rektor perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia dalam rapat dengar pendapat umum Panja SN DIKTI Komisi X DPR RI mendapat apresiasi dan sambutan hangat dari para legislator. Anggota Komisi X DPR RI Marlinda Irwanti dengan tegas mengatakan, setelah mendengar berbagai paparan yang disampaikan para Rektor tersebut, semakin meyakinkan bahwa Keberadaan Panja SN DIKTI itu ternyata memang sangatlah penting.

“Regulasi dari Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 itu ternyata sangat memberatkan perguruan tinggi, ini seperti tsunami perguruan tinggi. Kami merasa miris setelah kami mendengarkan paparan dari Universitas-universitas yang World Class Univercity. Kalau yang sekelas World Class Univercity saja seperti ini tanggapannya, lalu bagaimana dengan perguruan tinggi yang baru? karena regulasinya disamaratakan,” tandas Marlinda di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/07/2017).

la menyatakan, harus ada diskresi bagi perguruan tinggi yang sudah dinyatakan sebagai World Class. Menurutnya selama ini Menristekdikti selalu mengatakan bahwa pihak kementerian telah melakukan pembinaan dari perguruan tinggi yang

Kiprah Perempuan Parlemen

sudah mencapai World Class dengan bangganya. Padahal hal itu justru mempersulit dan menekan habis-habisan perguruan tinggi-perguruan tinggi tersebut.

“Bagaimana mereka akan bekerja dengan cepat kalau regulasi-regulasi itu membuat mereka kemudian menjadi terhambat. Selain itu kita juga sudah defisit profesor, bahkan mungkin suatu saat kita sudah tidak ada profesor lagi, akibat adanya aturan-aturan yang sangat dipersulit,” jelasnya.

Sementara itu, dalam paparan salah seorang Rektor yang hadir, ia menyampaikan bahwa ketika berbicara tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT), maka peserta didik yang miskin itu harus ditolong. Seharusnya bagi yang memiliki kemampuan tinggi, diakomodasikan untuk dapat mensubsidi yang tidak mampu, namun justru kenyataannya tidak demikian.

“Ada dua hal yang membuat seseorang mau menurunkan martabatnya, yakni di bidang pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, ketika masuk kalau bisa mendapat beasiswa, dibayari dan juga murah. Lalu di bidang kesehatan, ketika dilayani minta pelayanan kesehatan yang hebat, tetapi sesudah dilayani dan mengetahui besarnya tarif, kemudian minta pindah ke kelas yang lebih rendah,” ujar salah seorang Rektor tersebut. “Di satu sisi kita dibatasi oleh UKT, tetapi kita juga dituntut memiliki penelitian-penelitian yang hebat. Tidak mungkin kita memiliki penelitian yang hebat sementara kita juga dihambat oleh masalah regulasi. Publikasi Indonesia sering gagal di tingkat Internasional, karena penelitian-penelitian eksperimental itu menjadi ditolak sebab menggunakan alat yang sudah *out of date*.”

**Ibu adalah perpustakaan anaknya,
penentu maju mundurnya sebuah bangsa.
Dari tangannya akan lahir generasi penerus bangsa Indonesia.**

(Marlinda Irwanti)

Sekilas Penulis

Marlinda Irwanti dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 16 Oktober 1964 oleh pasangan ayah Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H. dan ibu Dra. Roosmaniar. Ayah adalah seorang guru besar Fakultas Hukum UGM sementara ibu adalah seorang pengajar di kota Medan sebelum menikah. Setelah mengenyam pendidikan dasar di SD Keputran (Ungaran) Yogyakarta, SMP Negeri 5 Yogyakarta yang pada jaman Belanda disebut *Normaal School*, dan SMA 9 Yogyakarta yang di awal berdirinya merupakan sekolah *paedagogik* binaan para profesor Universitas Gadjah Mada. Marlinda melanjutkan pendidikan di Fakultas Ekonomi UII lalu setahun kemudian dobel kuliah di Hubungan Internasional Fisipol UGM karena ingin menjadi dubes yang bisa keliling dunia. Saat berkuliah di dua kampus ternama tersebut, ada lowongan reporter TVRI. Marlinda tidak menyangka kesempatan, ia mencoba mengikuti seleksi dan berhasil terpilih setelah menyisihkan 500 orang pendaftar. Kuliah tetap berjalan lancar hingga ia dua degree. Tidak puas dengan pendidikan strata satu, Marlinda melanjutkan kuliah S2 Kajian Perempuan di Universitas Indonesia dan S3 jurusan Dakwah di Fakultas Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.



Marlinda Irwanti menikah dengan Dr. Ir. Abdullah Puteh, seorang putra Aceh yang menjadi Ketua Umum KNPI, pada tanggal 14 April 1992 di Jakarta dan dikaruniai sejumlah putra – putri yaitu Shandi Nurul Adysta (almarhumah), Martha Nurul Putri, Raudha Putri, Muhammad Rajendra, dan Muhammad Irfan.

Saat Abdullah Puteh menjadi Gubernur Aceh di usia pernikahan kedelapan tahun, Daerah Istimewa Aceh masih berstatus Daerah Operasi Militer yang penuh gejolak. Marlinda sebagai Ketua TP PKK Provinsi Aceh cukup mencengangkan berbagai pihak saat tetap bersikeras mengunjungi 500 desa hingga pelosok Aceh yang rawan tembakan peluru, granat, maupun bom. Ia juga membuat program *GAMMAWAR (Gampoeng Mawadah Warahmah)*. Marlinda bahkan menelurkan mahakaryanya yaitu Taman Sulthanah Shafiatuddin yang masih bisa dinikmati hingga sekarang.

Inspirator Marlinda dalam hidup adalah ayah dan ibu. Ayahnya adalah seorang profesor hukum yang meninggalkan mahakarya di bidang hukum (Asas-Asas Hukum Pidana) dan merupakan perintis KKN / Indonesia Mengajar sementara sang ibu mengajarkan nilai-nilai keagamaan. Karena sang ayah, Marlinda bercita-cita menjadi profesor yang saat ini sedang berproses. Dari ibu, Marlinda masih terus berpuasa sunnah setiap Senin dan Kamis.



Biodata Parlemen

Nama : **Dr. dra. MARLINDA IRWANTI, SE., M.Si.**
Nomor Anggota : A-280
Fraksi : Partai Golongan Karya
Daerah Pemilihan : JAWA TENGAH X
Tempat / Tanggal Lahir : Yogyakarta / 16 Oktober 1964
Agama : Islam



Pendidikan

SD Ungaran Yogyakarta 1967 – 1973

SMP Negeri 5 Yogyakarta 1973 – 1976

SMA Negeri 9 Yogyakarta 1976 – 1979

S1 Ekonomi UII Yogyakarta 1983 – 1987

S1 Hubungan Internasional UGM Yogyakarta 1983 – 1987

S2 Kajian Perempuan, UI Jakarta 1995 – 1997

S3 Dakwah, Komunikasi, UIN. Tahun: 2008 – 2011

**PPSA XVIII
LEMHANAS**

Training PR
Murdoch University Singapore

Training Komunikasi
ABC Television Australia

Training Kepemimpinan
Shanghai China



Karir

STIKOM Interstudi
Ketua STIKOM (2014 - 2017)

London School of Public Relation
Dosen (2014)

Universitas Muhammadiyah Jakarta
Dosen Pasca Sarjana (2014 – 2015)

STIKOM INTERSTUDI

Dosen dan Kajur PR (2009 – 2014)

Universitas Al-Azhar

Dosen (2000 – 2015)

Universitas Assafyah

Direktur Studi Perempuan

PT Pamor Sapta Dharma

Direktur Utama

TVRI

Humas (1995 – 2000)

TVRI

Penyiar (1985 – 2000)



Organisasi

ISKI

Dewan Pakar (2017 – 2019)
Ketua Bidang Keeleman (2014 – 2017)

IKA UII

Ketua Biro Komunikasi (2014 – 2019)

KPPG

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (2014 – 2019)

DPP Partai GOLKAR

Wakil Sekjen (2014 – 2016)

Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat (2016 – 2019)

MAAI

Ketua Bid. Komunikasi (2014 – 2017)

APJATI

Ketua Bidang Informasi (2014)

Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia

Ketua Umum (2013 – 2017)

Daiyah Majelis Dakwah Islamiyah

Ketua (2012 – 2017)

Gerakan Perempuan MKGR
Ketua Umum (2012 – 2016)

Masyarakat Ekonomi Syariah
Dewan Pakar

DPP Perhumas
Dewan Pakar

(2000 – 2004)

Ketua PKK Aceh
Ketua Dekranasda
Penasehat Dharma Wanita



Penghargaan

Panitia Seleksi Dewan Pengawas RRI
Kementerian Komunikasi & Informasi
2015

Panitia Seleksi Tenaga Humas Pemerintah
Kementerian Komunikasi & Informasi
2015

Pemberi Materi THP

Kementrian Komunikasi & Informasi
2015

Satya Lencana Bidang Kependudukan

Presiden RI
2002

Rekor MURI

Pembuatan Taman Syafiatudin

Pengaplikasian Syariat Islam

Dalam 10 Program Pokok PKK yang Islami bersama MUI Aceh

Pembuatan Asmaul Husna

Di seluruh desa di Aceh

Kunjungan ke 500 desa binaan PKK selama Darurat Militer dan Darurat Sipil



Buku

Setiap Orang Mencari Alamatnya
Cahaya Group Mizan

Catatan Seorang Musafir
Mizan Group 2001

Pendidikan Gender Dimulai Dari Keluarga
PKK Aceh

Etika Kepribadian Muslim

PKK Aceh

Public Speaking

Cahaya Group Mizan

Komunikasi Politik Perempuan di DPRD DKI Jakarta

Orbit Press

Komunikasi Politik Partai Golkar Masa 2004-2009

Kitabaca Press

Ratu Safiatuddin Penggagas Tamaddun dan Penganjur Emansipasi

Bumi Aksara Press 2004

Kepemimpinan Perempuan Dalam Politik

(Ratu-Ratu Aceh Abad-17)

Oniontwo Press 2012

Galeri Penutup

BHINNEKA TUNGGAL IKA TAN HANA DHARMA MANGRWA

Mari kita implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Indonesia Jaya dan pegang teguhlah PANCASILA di dadamu.

Pegang erat "Bhinneka Tunggal Ika" dengan jemari kakimu, untuk negeri tercinta INDONESIA.





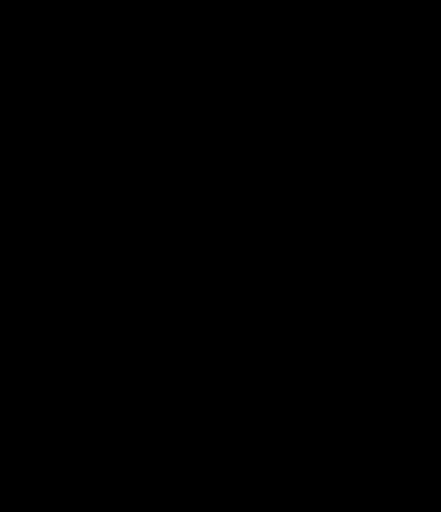
Masa-masa sebulan terakhir berkantor di gedung parlemen DPR RI.





Mari jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hindari radikalisme, majukan iptek untuk kemajuan bangsa.





Dalam aneka kesempatan bersama bapak Presiden RI Joko Widodo dan bapak Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Kiri bawah adalah saat Sidang Tahunan MPR / DPR / DPD hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019, merupakan sidang terakhir di gedung parlemen yang dihadiri bapak Presiden di periode 2014 – 2019. Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta ijin kepada DPR RI untuk **memindahkan ibukota pemerintahan ke pulau Kalimantan.**



Indonesia akan maju kalau Sumber Daya
Manusianya unggul. Itulah kenapa saya bersikeras
menyalurkan beasiswa PIP ke 20.000 anak yang
memerlukan, karena PENDIDIKAN itu PENTING.



**Bangsa akan kuat dan maju jika kuat pemudanya,
guyup masyarakat, dan berpendidikan perempuannya.**

(Marlinda Irwanti)